



MAJALAH Parlementaria

EDISI 207 • TH. 2022



Dari Bali untuk Bumi

All for One, One for All
Parlemen dunia mencanangkan Deklarasi Nusa,
menyatukan komitmen
mengatasi dampak perubahan iklim



PENGANTAR REDAKSI

ALL FOR ONE, ONE FOR ALL. Kata-kata bermakna persatuan itu terlontar dari mulut Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani di penghujung pidatonya pada penutupan Sidang IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali. 24 Maret 2022 ini. Sidang yang mengadirkan delegasi parlemen dari 115 negara dunia ini mengangkat tema 'Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change'. Parlemen-parlemen negara yang tergabung dalam IPU berkomitmen untuk sama-sama mengatasi dampak perubahan iklim yang kian nyata.

'Dari Bali untuk Bumi', dipilih tim redaksi **Parlementaria** untuk diangkat menjadi laporan utama di edisi 207 ini. Dimana, dalam sidang yang berlangsung marathon selama lima hari ini menghasilkan Deklarasi Nusa Dua yang merupakan komitmen bersama untuk membuat bumi lebih baik lagi.

Di samping isu lingkungan, para delegasi Sidang IPU ke-144 ini juga membahas mengenai keterlibatan perempuan dan pemuda dalam pengambilan keputusan, isu perdamaian, kesehatan, hingga isu kesetaraan pendidikan antar masing-masing negara.

Di Rubrik Pengawasan, Tim Redaksi membahas mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi prasyarat untuk mengurus berbagai administrasi. Salah satunya adalah jual-beli tanah. Komisi II DPR RI yang membidangi pertanian berharap pemerintah memikirkan cara lain yang lebih logis dalam meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan.

Selanjutnya, pada Rubrik Anggaran, Tim Redaksi menurunkan berita tentang PPN 11 persen yang mulai diterapkan sejak 1 April 2022. Kemudian di Rubrik Legislasi dikupas mengenai RUU Pendidikan Kedokteran yang sudah dirasa perlu untuk dibahas dan disahkan.

Masih banyak lagi yang disajikan **Tim Redaksi Parlementaria** seperti rubrik Sorotan, kemudian berita mengenai kegiatan Anggota DPR RI di dapilnya dalam rangka melaksanakan amanat konstitusinya sebagai wakil rakyat. Semuanya disajikan secara komprehensif sehingga sangat layak untuk dibaca.

Selamat membaca!

Parlementaria



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id



DPR RI



@DPR_RI



@DPR_RI



DPR RI

w w w . d p r . g o . i d



Parlementaria

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Wiryawan Narendro Putro, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds, Prima Danutirto, A.Md,

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullil, Puntho Pranowo, Singih Kinanti Rimhani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firda Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulstiwati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Parlementaria

EDISI 207 • TH. 2022



10



22



32



58

- 4 DINAMIKA PARLEMEN
Pemerintah Harus Serius Tanggapi KKB
- 5 MIMBAR DEMOKRASI
Rachmat Gobel: Ini Bukan Sekedar Pekerjaan, Ini Soal Memanusiakan Manusia
- 6 PROLOG
Sukses IPU, Bangga Indonesia
- LAPORAN UTAMA
- 10 Indonesia Dorong Dunia Wujudkan Masa Depan Rendah Karbon
- 12 Solidaritas Wujudkan Perdamaian Dunia
- 14 Dorong Terwujudnya Kesetaraan Gender
- 16 Indonesia Perkuat Diplomasi Dengan Parlemen Dunia
- 18 Momentum Kebangkitan Ekonomi dan Pariwisata Bali
- 20 SUMBANG SARAN
Peta Jalan Parlemen Dunia Setelah Sidang IPU Bali
- 22 PENGAWASAN
Absurd, Syaratkan BPJS dalam Jual Beli Tanah
- 24 ANGGARAN
Menimbang Kembali PPN 11 Persen
- 26 LEGISLASI
RUU Pendidikan Kedokteran : Upaya Wujudkan Layanan Kesehatan yang Berkualitas

- 28 FOTO BERITA
- 32 PROFIL
Johan Budi : Prinsip Mengalir dan Bermanfaat Lebih Banyak
- 36 KUNKER
- 58 SOROTAN
Lonjakan Harga Bahan Pokok, jangan jadi Agenda Tahunan'
- 60 DAPIL
- 70 TOKOH
Sahabat Alam, Sang Pengelola Lingkungan
- 72 PERNIK
Forum ASGP, Indra Inskandar sampaikan Penerapan *Green Energy* di DPR
- 74 KIAT SEHAT
Tips Jaga Kesehatan Ditengah Lonjakan Varian Omicron
- 76 WISATA
Nusa Penida, Pulau Indah Nan Eksotis
- 78 HOBI
Ruslan M. Daud : Trail Adventure, Gotong Royong Tanpa Syarat
- 79 POJOK PARLE
Kenalkan Bali Pada Presiden IPU

PEMERINTAH HARUS SERIUS TANGGAPI KKB

Tak sedikit Anggota TNI yang gugur dalam menjalankan tugas menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Menanggapi ulah KKB harus disikapi dengan sangat hati-hati, cara pendekatannya pun harus dengan perhitungan secara matang, baik diplomasi internasional atau pun pendekatan militer. Terahir gugurnya Sertu Eka Andriyanto, prajurit TNI AD di Pos Ramil Yalimo dan istrinya Sri Lestari pada Kamis 31 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 WITA.

Sebelumnya KKB di bawah pimpinan Egianus Kagoya telah melancarkan serangan terhadap Pos Satgas Mupe TNI AL di Kware Bawah, di Kampung Traslala, Kenyam, Nduga, Papua, pada Sabtu Sore 26 Maret 2022. Danrem 172/PWY Brigjen TNI yakni Izak Pangemanan telah membenarkan adanya insiden penyerangan tersebut.

Izak Pangemanan mengatakan bahwa mereka diserang oleh KKB dari berbagai arah hingga menyebabkan jatuhnya 10 korban. Tak hanya itu peristiwa tragis tewasnya delapan karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT) yang disebabkan kekerasan para KKB di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua juga menjadi peristiwa yang memprihatinkan.



“Peristiwa kekerasan yang menewaskan warga sipil di Papua tersebut merupakan tindakan biadab yang harus segera direspon secara tegas oleh pemerintah”

Anggota Komisi I DPR RI F-PKS Sukanta. Foto: Jaka/Man



“Sudah berapa banyak prajurit gugur di Papua, kok dianggap seperti angin lalu?”

Anggota Komisi I DPR RI F-Gerindra Fadli Zon. Foto: Andri

DINAMIKA PARLEMEN menghadirkan pandangan, masukan, serta advokasi Anggota DPR terkait isu-isu aktual sebagai wujud implementasi fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran.

Rachmat Gobel: Ini Bukan Sekadar Pekerjaan, Ini Soal Memanusiakan Manusia

Aspirasi Dari JALA PRT


Koordinatoriat Nasional Jaringan Advokat Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menemui Pimpinan DPR RI guna memperjuangkan aspirasi terkait RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Mereka menuntut PRT masuk ke dalam katagori pekerja, bukan pembantu. Dengan demikian, PRT mempunyai hak cuti, hak libur, hak jam kerja, standar gaji pekerja, jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan menghapus perlakuan diskriminatif terhadap PRT.



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Foto: Azka/Man

Menerima Aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyampaikan dalam pertemuan itu sebetulnya sudah banyak juga dibahas di RUU yang lain. Sudah menjadi tanggungjawabnya untuk menerima aspirasi tersebut.

“Menurut pandangan saya, ini bukan sekadar pekerjaan, ini soal memanusiakan manusia. Ini bukan sekadar soal regulasi dan hubungan timbal balik antara pemberi kerja dan pekerja tapi juga soal etik dan moral serta soal kemanusiaan. Namun butuh waktu untuk memperjuangkan RUU PPRT karena harus meyakinkan semua pihak melalui komunikasi politik yang baik,” ujar Gobel.

Senada dengan Gobel, Anggota DPR RI Komisi VIII Lida Hendrajoni yang juga ikut menerima aspirasi saat itu menyatakan, mendukung agat RUU PPRT ini bisa segera masuk di dalam Prolegnas, dibahas dan segera disahkan. “Namun demikian, tentu semuanya berproses. Dalam artian, apa-apa yang sudah ada misalnya RUU TPKS, itu kan juga yang mereka harapkan untuk perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia, salah satunya termasuk PPRT,” jelas Lida. 



Anggota DPR RI Komisi VIII Lida Hendrajoni. Foto: Jaka/Man

Sukses IPU, Bangga Indonesia

Indonesia atau tepatnya Bali menjadi tuan rumah terselenggaranya 144th Assembly of the Inter Parliamentary Union (IPU). Sempat diragukan, perhelatan yang menghadirkan ratusan anggota parlemen dari 115 negara ini diakhiri dengan sukacita.



DEKLARASI

Nusa Dua adalah hasil yang disepakati di Sidang IPU ke-144 ini. Dimana, para anggota parlemen dunia untuk mengatasi

perubahan iklim dengan mengadopsi Deklarasi Nusa Dua.

"Bumi seperti apa yang akan kita wariskan untuk generasi mendatang? Bagaimana solusi permanen menciptakan perdamaian? Apakah dunia akan siap dalam menghadapi ancaman krisis, yang mungkin lebih buruk, di masa mendatang?" ujar Ketua DPR RI Puan Maharani saat penutupan Sidang IPU ke-144 di Bali (24/3).

Sebagaimana diketahui, saat ini dunia menghadapi bermacam tantangan pada saat bersamaan. Untuk itu, perubahan iklim perlu komitmen dan dukungan kuat untuk melakukan upaya mitigasi dan adaptasi.

Deklarasi Nusa Dua dibuat setelah delegasi melakukan *General Debate 'Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change'*. Adopsi dokumen Deklarasi Nusa Dua merangkum keseluruhan komitmen parlemen global untuk menuju *net zero* di tahun 2050 atau sesuai target masing-masing negara.

Selain Deklarasi Nusa Dua, Sidang IPU kali ini juga menyepakati beberapa resolusi untuk menjawab tantangan kondisi saat ini. Pentingnya prinsip-prinsip yang tertuang dalam piagam PBB serta peran parlemen dalam mempromosikan rekonsiliasi, dan stabilitas di wilayah konflik dirangkum menjadi sebuah resolusi di *Standing Committee on Peace and Security*.

Kemudian Resolusi di *Standing Committee on Sustainable Development* mengajak parlemen untuk terus meningkatkan peran teknologi komunikasi dan informasi di dunia Pendidikan. "Parlemen, telah menegaskan pentingnya bukan sekedar untuk membuat komitmen, namun



Ketua DPR RI Dr (HC) Puan Maharani bersama pimpinan IPU saat penutupan sidang IPU ke-144. Foto: Rumi/Man

melakukan aksi nyata dalam setiap komitmen bersama mengatasi masalah global,” ungkap Puan.

Penanganan pandemi Covid-19 tak luput dari pembahasan di forum ini. Selain menekankan akan pentingnya pemerataan vaksin, tiap-tiap negara diminta untuk memperkuat kesiapan jika terjadi pandemi di masa depan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu memastikan, DPR RI akan terus berkomitmen mengadopsi produk dari IPU. Termasuk

Deklarasi Nusa Dua, yang namanya diambil dari lokasi tempat IPU digelar.

“DPR RI akan memastikan komitmen ini tidak akan berakhir menjadi hanya sebatas dokumen. DPR RI berkomitmen untuk memastikan dukungan nyata mengatasi perubahan iklim di Indonesia dan dunia,” tegasnya.

APRESIASI DARI NEGARA PESERTA

Di sisi lain, sebagai tuan rumah, Indonesia mendapat sanjungan dari para delegasi peserta perhelatan ini. Mereka menilai, penyelenggaraan IPU naik kelas dan menyebut Indonesia menjadi barometer baru pelaksanaan forum-forum IPU.

Menurut Puan, DPR ingin memberikan pesan kepada dunia bahwa Indonesia mampu melaksanakan *event* internasional di saat pandemi Covid-19. “Kita tunjukkan eksistensi Indonesia ke dunia,” tukas Puan.

Kesuksesan penyelenggaraan IPU ke-144 pun dinilai buah dari kerja bersama seluruh pihak tak terkecuali

masyarakat Bali. Puan secara khusus mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bali yang mendapat banyak pujian dari delegasi IPU.

“Saya sampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah Bali, masyarakat Bali, dan tentunya untuk delegasi Indonesia dan panitia DPR RI. Gotong royong kita bersama bisa membuat pariwisata Bali kembali dipercaya setelah sebelumnya sangat terdampak pandemi,” tuturnya.

Bukti kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Sidang IPU juga diakui oleh Presiden IPU Duarte Pacheco. Bahkan Pacheco menyarankan agar delegasi Negara Rwanda mengambil pelajaran Indonesia sebab IPU ke-145 akan diselenggarakan di Kigali.

“Rwanda, Anda harus bekerja keras, untuk menyaingi kerja ibu Puan Maharani melihat bagaimana kesuksesan Indonesia menggelar pertemuan kali ini,” kata Duarte Pacheco. ●Tim

**DPR RI BERKOMITMEN
UNTUK MEMASTIKAN
DUKUNGAN
NYATA MENGATASI
PERUBAHAN IKLIM
DI INDONESIA DAN
DUNIA,**



Apa itu IPU ?

Inter-Parliamentary Union (IPU) berdiri sejak 1889 sebagai sekelompok kecil anggota parlemen yang didedikasikan untuk mempromosikan perdamaian melalui diplomasi parlemen dan dialog. Sejak itu IPU tumbuh menjadi organisasi parlemen-parlemen dunia.



IPU ke-144

Tahun ini IPU mengadakan pertemuan di Nusa Dua, Bali, dengan Indonesia sebagai tuan rumah.



Topik IPU ke-144 adalah "Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change"



Sidang IPU dihadiri - 115 negara



Delegasi anggota parlemen - 1000 orang



Ketua parlemen negara anggota - 33 orang.

IPU ke-144 Menghasilkan Deklarasi Nusa Dua

Getting to zero: Memobilisasi parlemen untuk bertindak terhadap perubahan iklim (climate change)

“

Anggota parlemen IPU memastikan bahwa komitmen iklim sejalan dengan yang digariskan dalam Perjanjian Paris (Paris Agreement) dan perjanjian internasional lainnya, serta sejalan pula terhadap Sustainable Development Goals

”

- Parlemen memperkuat aksi nasional setiap negara untuk memenuhi komitmen global
- Parlemen mempercepat transisi energi bersih untuk pemulihan COVID-19 yang lebih hijau
- Parlemen mendorong aksi iklim yang inklusif
- Mempromosikan parlemen yang lebih hijau (greener parliaments)
- Parlemen meningkatkan kerjasama regional dan global untuk atasi dampak perubahan iklim

“

Seluruh anggota parlemen IPU setuju bahwa hanya melalui kerja sama internasional, parlemen-parlemen dunia dapat mengatasi peningkatan risiko perubahan iklim, membangun solidaritas, dan menemukan solusi nyata untuk bumi yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang

”



Indonesia Dorong Dunia Wujudkan Masa Depan Rendah Karbon

Semarak rangkaian Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali sepanjang 20-24 Maret 2022 menandakan saatnya parlemen dunia bersatu menyelamatkan bumi. Bertajuk '*Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change*', DPR RI menegaskan dukungan terhadap pencapaian masa depan rendah karbon berbasis ekonomi hijau demi generasi kini dan nanti.



WAKIL Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus, di hadapan para delegasi parlemen yang berasal dari 155 negara dalam *General*

Debate-Presentation of the 2022 Global Parliamentary Report, mengatakan mengatasi kerusakan bumi bukan isu eksklusif milik komisi atau negara tertentu saja.

“Untuk mencapai target *net sink* di sektor kehutanan, Indonesia berupaya menerapkan pengendalian kebakaran hutan, pengelolaan lahan gambut, moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut,” terangnya.

Ia menegaskan isu lingkungan harus menjiwai kerja seluruh parlemen, mulai dari proses pembuatan legislasi hingga penentuan anggaran. Tanpa keterlibatan parlemen, komitmen aksi dan mitigasi penyelamatan bumi yang berpijak pada prinsip inklusif dan setara tidak akan jadi nyata.

“Salah satunya melalui peningkatan ambisi dan upaya bersama-sama menahan laju pemanasan global,” ucap Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Lodewijk pun memaparkan, pencapaian Indonesia yang telah memenuhi target *Updated Nationally Determined Contribution (NDC)*, termasuk melalui Indonesia *Forest and Land Use (FOLU) net sink* tahun 2030, serta target *Net Zero* tahun 2060 atau lebih cepat.

Di sisi lain, dirinya menyoroti soal mobilisasi berbagai sumber pembiayaan



Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat general debate dalam Sidang IPU ke-144. Foto: MarioMan

global untuk kebutuhan mitigasi dan adaptasi terhadap isu perubahan iklim. Menurutnya, transisi menuju energi bersih perlu didukung oleh pendanaan yang masif. Indonesia pun terus berupaya mobilisasi pendanaan iklim di luar anggaran nasional sekaligus mempromosikan pembiayaan inovatif untuk mencapai target NDC.

“Dengan memanfaatkan instrumen keuangan baru, seperti obligasi hijau, sukuk hijau, serta platform untuk investasi sektor swasta dalam aksi iklim,” urai Lodewijk.

Sehingga, Indonesia menetapkan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan yang mewajibkan lembaga keuangan untuk meningkatkan portofolio hijau. Terakhir, ia berharap seluruh parlemen di berbagai belahan dunia menyuarakan terobosan inovasi untuk melindungi dunia, terutama negara sekaligus masyarakat yang paling rentan akibat dampak iklim.

GAUNGAN KEARIFAN LOKAL

Meyakini kebahagiaan tercipta akibat keseimbangan hadir antara Tuhan, alam, dan manusia, Wakil Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menegaskan filosofi ‘Tri Hita Karana’ yang diyakini oleh masyarakat Bali berpotensi menguatkan penerapan ekonomi hijau, tidak hanya Indonesia, namun juga seluruh dunia.

“Filosofi Tri Hita Karana menjadi sebuah pemikiran serta sumbangsih untuk tatanan global. Jadi korelasi (filosofi) ini luas sekali Kami pun mengawal betul-betul isu yang berkaitan dengan lingkungan dan perubahan iklim agar mampu menjadi bahasan utama,” tutur Putu kepada *Parlementaria*.

Turut jadi landasan filosofi agar hidup tangguh, wakil rakyat dapil Bali itu menekankan dalam konsep perubahan iklim, filosofi tersebut secara konsisten berupaya tidak merusak lingkungan, menerapkan energi bersih, sekaligus tidak mengeksploitasi alam.

Sebagai contoh, Hari Raya Nyepi yang merupakan salah satu kearifan lokal yang bisa jadi solusi mengatasi

FILOSOFI TRI HITA KARANA MENJADI SEBUAH PEMIKIRAN SERTA SUMBANGSIH UNTUK TATANAN GLOBAL.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana.
Foto: Andri/Man



isu perubahan iklim dalam balutan budaya yang lekat di masyarakat. Tidak berhenti di Bali, nilai-nilai serta laku dalam Hari Nyepi menjadi inspirasi bagi dunia untuk hidup selaras dengan Tuhan, alam, dan manusia.

Selain Hari Raya Nyepi, Subak turut berpotensi mendorong percepatan transisi menuju energi yang ramah lingkungan. Subak adalah energi yang berasal dari aliran air gunung menuju laut melalui lekuk sungai atau hamparan sawah. Energi yang tercipta dari gerak air ini dinilai berkelanjutan (sustainable) dan bersih karena merupakan hasil sinergi dengan alam.

Putu menekankan, gaung kearifan lokal sepanjang rangkaian Sidang IPU ke-144 perlu menjadi perhatian seluruh parlemen dunia. Ia

menjelaskan masyarakat telah hidup ratusan tahun bersama kebiasaan dan laku berupa budaya yang diwariskan oleh nenek moyang. Menghadirkan solusi melalui kebijakan yang dekat dengan budaya masyarakat, tentu menghasilkan dampak yang sesuai dengan harapan sekaligus berkelanjutan.

“Filosofi kearifan lokal tentu sudah kita suarkan. Di sini kita tunjukkan bagaimana rakyat, negara, atau pemerintah dan parlemen untuk turun langsung berkontribusi mengawal isu perubahan iklim yang jadi tantangan ke depan. Sekarang, isu perubahan iklim memang isu yang nyata dan betul-betul kritis, serta memberikan dampak begitu besar terhadap kehidupan manusia,” tuturnya.

Sehingga, ia berharap setiap negara berupaya menggali kearifan lokalnya untuk disatukan sebagai solusi menghadapi tantangan global. Dengan begitu, dirinya berharap semua pihak bergerak bersama untuk berkomitmen dalam penerapannya.

Pada kesempatan yang berbeda, Presiden Joko Widodo menyampaikan tantangan yang dihadapi global semakin tidak mudah. Ada sebuah tantangan yang paling berbahaya jika tidak dilakukan bagi parlemen seluruh dunia yaitu perubahan iklim.

Dirinya menuturkan perubahan iklim sering dibicarakan dan diputuskan dalam pertemuan global, tapi aksi lapangannya belum kelihatan. Misalnya, transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT), dari energi batu bara ke *renewable energy*.

Sehingga, lanjut Jokowi, menekankan pendanaan iklim, investasi dalam energi baru terbarukan, dan transfer teknologi harus segera diselesaikan. “Kalau ini tidak riil dilakukan, sampai kapan pun saya pesimis yang namanya perubahan iklim betul-betul tidak dapat kita cegah. Kalau itu hanya kita bicarakan dari tahun ke tahun dan tidak ada keputusan, saya pesimis bahwa namanya perubahan iklim tidak bisa kita cegah sama sekali,” pungkasnya. ● ts/es

Solidaritas Wujudkan Perdamaian Dunia

Pada Sidang IPU ke-144, DPR RI mendorong perdamaian dunia termasuk memecahkan masalah dari konflik Rusia-Ukraina. Tak hanya itu, parlemen Indonesia juga turut menyuarakan persoalan konflik di Palestina-Israel dan Myanmar, dimana penting bagi organisasi IPU berperan mewujudkan perdamaian di seluruh belahan dunia manapun.



FORUM

parlemen dunia menyepakati munculnya *emergency item* yang mengangkat konflik antara Rusia dengan

Ukraina. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon berharap resolusi yang dihasilkan dalam Sidang IPU ke-144 dapat mendorong aksi nyata bagi parlemen seluruh dunia untuk merawat perdamaian serta demokrasi dan memperjuangkan hukum internasional juga Hak Asasi Manusia (HAM).

Oleh karena itu parlemen Indonesia mengusulkan *emergency item* terkait penyelesaian konflik Rusia-Ukraina dalam Sidang IPU itu. Dimana terdapat upaya negara-negara di Eropa yang juga telah membuat suatu resolusi terkait agresi Rusia dan Belarusia terhadap Ukraina.

“Draft resolusi (Eropa) itu cukup keras, karena memang satu pihak. Karena itu, kami merasa peran parlemen perlu ditonjolkan dalam memediasi, terutama untuk perdamaian dan mencari solusi, tidak hanya sekedar mengecam,” ujar Fadli.

Fadli

Ketua BKSAP DPR RI
Fadli Zon. Foto: Andri/Man

PARLEMEN INDONESIA MENGUSULKAN *EMERGENCY* *ITEM* TERKAIT PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA- UKRAINA DALAM SIDANG IPU ITU

mengatakan, dalam situasi krisis dan konflik, parlemen memiliki peran mendasar dalam menyelesaikan konflik atau membangun perdamaian abadi melalui proses dialog dan rekonsiliasi. Lebih lanjut, ia menjelaskan parlemen dunia memiliki dampak yang sangat besar terhadap perdamaian dunia.



“Ketika Indonesia mengajukan proposal itu sangat moderat, karena kita ini juga politik yang bebas aktif. Dari sisi parlemen, kita ingin mengambil peran untuk menjembatani dengan parlemen Rusia dan juga parlemen Ukraina karena parlemen ini mewakili rakyatnya,” jelas politisi fraksi Partai Gerindra itu.

Pada akhirnya keputusan sidang IPU menyepakati usulan *emergency item* dari New Zealand melalui mekanisme voting, yang secara substansi sejalan dengan usulan Indonesia. Dimana menurut Fadli, *emergency item* yang terpilih itu merupakan perpaduan dari usulan Indonesia dengan New Zealand yang berfokus pada penyelesaian konflik dan menghindari krisis kemanusiaan.

SELURUH BELAHAN DUNIA

Di sela-sela sidang IPU, Fadli juga menemui Presiden IPU Duarte Pacheco guna menawarkan agenda pembahasan konflik antara Palestina dengan Israel. Bersama dengan perwakilan *The League of Parliamentarians for Al-Quds*, ia menyampaikan Indonesia hadir berupaya mewujudkan perdamaian dunia. “Kami berharap dengan pertemuan ini, bisa menjadi usaha untuk menghentikan konflik,” tutur Fadli

Lebih lanjut, di tengah polemik terjadi di belahan dunia, konflik Palestina dan Israel dinilai sudah berlangsung cukup lama. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda yang signifikan untuk menghentikan konflik tersebut. Untuk itulah delegasi parlemen Indonesia terus berupaya melobi perwakilan parlemen yang hadir pada gelaran IPU untuk mendukung kemerdekaan penuh atas Palestina.

Tak berhenti sampai disana, menurut Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera, DPR RI berupaya mendorong penyelesaian masalah konflik yang terjadi di sana. “Lobi-lobi masih dilakukan, di (forum IPU) sebagian

DELEGASI PARLEMEN INDONESIA TERUS BERUPAYA MELOBI PERWAKILAN PARLEMEN YANG HADIR PADA GELARAN IPU UNTUK Mendukung KEMERDEKAAN PENUH ATAS PALESTINA

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera. Foto: Erman/Man



teman-teman juga ada di *general debate* untuk merapikan draf,” sebutnya. Ia berharap isu Palestina-Israel nantinya mendapatkan perhatian khusus oleh peserta Sidang IPU.

“IPU dan PBB yang kami jadikan dasar. Kami tidak ingin berdialog secara langsung. Jadi melalui IPU dan PBB yang akan mengusulkan (ke forum), kemudian kami ikut. Pokoknya, posisi kami *two-state solution* harus segera diwujudkan,” terang Mardani.

Dalam kesempatan yang berbeda, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani turut menyoroti situasi demokrasi di Myanmar akibat konflik internal yang sudah terjadi setahun belakangan ini. Puan pun mendorong Myanmar kembali ke jalan demokrasi. “Terkait situasi di Myanmar, kita dapat

mendorong agar Myanmar kembali ke jalan demokrasi,” ujarnya.

Puan berharap IPU atau forum perlemen internasional itu bisa mengambil bagian untuk memastikan masing-masing negara memperkuat demokrasi. Apalagi, ia bilang, demokrasi mengalami tantangan di tengah situasi pandemi Covid-19 sehingga perlu diperkuat fondasinya.

“Sesuai tujuan IPU, kita harus menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat demokrasi, perdamaian, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan,” tandas Puan. Ia juga menyebut, Sidang IPU ke-144 dapat menjadi momentum bagi parlemen dunia untuk menyebarkan ‘budaya damai’ (*culture of peace*) yang selalu mempromosikan toleransi, dan dialog, serta menolak kekerasan. ● aha/es

Dorong Terwujudnya Kesetaraan Gender

Forum of Women Parliamentarians menjadi salah satu forum yang menjadi perhatian dalam Sidang IPU ke-144. Sebab, isu kesetaraan gender yang dialami perempuan, utamanya mengenai kesehatan perempuan, anak dan remaja di kala pandemi, menjadi pembahasan penting dalam forum tersebut.



ANGGOTA
Badan Kerja
Sama Antar
Parlemen
(BKSAP) DPR
RI Irine Yusiana
Roba Putri yang
mendapatkan
kesempatan

menjadi Ketua Panel Diskusi *Forum of Women Parliamentarians* mengatakan bahwa untuk merespon berbagai tantangan yang dialami perempuan,

khususnya di masa pandemi, diperlukan energi yang lebih kuat antara seluruh pemangku kepentingan.

“Saya memandang bahwa kita memerlukan energi yang lebih kuat antara seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional, regional, global dengan peran sentral parlemen, terutama melalui peran parlemen perempuan,” kata Irine.

Irine mengatakan, parlemen perempuan harus terus mendorong dan memastikan segala upaya

pemulihan global dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi perempuan. “Upaya ini tentu tidak dapat kita lakukan sendiri, anggota parlemen laki-laki bukan hanya harus dilibatkan, tapi mereka juga harus berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pemenuhan hak perempuan, karena manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat,” sebut Irine.

Lebih lanjut, dalam forum parlemen perempuan IPU tersebut, diskusi dan usulan berbasis gender dilakukan untuk dua rancangan resolusi, yakni resolusi mengenai tema *‘Rethinking dan reframing the approach to peace processes with a view to fostering lasting peace’* dan resolusi terkait *‘Leveraging Information and Communication Technology as an enabler for the education sector, including in times of pandemic’*.

Selama pembahasan dua resolusi tersebut, forum parlemen perempuan IPU mendorong terwujudnya kesetaraan gender secara global, bukan hanya di masa pandemi namun hingga masa mendatang. Terkait keterlibatan perempuan sebagai agen perdamaian, Irine pada pertemuan *Bureau of Women Parliamentarians* mempromosikan pemberdayaan serta keterlibatan perempuan menjadi *agent of peace*.

Sebab, menurutnya perempuan menjadi salah satu korban yang paling rentan dalam setiap konflik, namun tanpa keterlibatan perempuan, perdamaian akan sulit terwujud. “Tidak ada satu pun penyelesaian konflik dan perdamaian abadi tanpa keterlibatan perempuan,” imbuh legislator dapil Maluku Utara tersebut.

Terkait konflik Rusia dan Ukraina, *Bureau of Women Parliamentarian* merekomendasikan komposisi 50 persen anggota *task force* (gugus tugas) penyelesaian konflik Rusia-Ukraina adalah perempuan. Menurutnya, perempuan harus ditempatkan sebagai aktor utama



Anggota BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri. Foto: Poo/Man

KAMI BERHARAP KE DEPANNYA BERBAGAI ELEMEN Mendukung PARA PEMUDA BERPARTISIPASI (DALAM DUNIA POLITIK),

Anggota BKSAP DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: Rumi/Man



sekaligus agen perdamaian itu sendiri.

“Amandemen ini diberikan oleh *Forum of Women Parliamentarians* dan itu sejalan dengan semangat DPR, bagaimana kita membangun perdamaian dan kestabilan ini dengan menempatkan perempuan sebagai *agent of peace*,” terangnya.

Sementara itu, dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, Irine menekankan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak. Untuk itu pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dianggap penting sebagai alat untuk meningkatkan pendidikan, khususnya di masa pandemi yang telah memperparah ketimpangan pendidikan di beberapa tempat.

“Terutama bagaimana kita mampu dan harus *me-leverage* teknologi informasi ini sebagai alat yang membantu kita untuk meningkatkan pendidikan itu sendiri, dan memang di Indonesia banyak sekali contoh yang bisa diperparah mengenai penggunaan teknologi informasi ini,” ujarnya.

Selain Irine, Anggota BKSAP Puteri Anetta Komarudin yang juga menjadi pembicara pada panel diskusi *Forum of Women Parliamentarians* menilai isu ketidaksetaraan dan kekerasan berbasis gender merupakan isu eksisting yang semakin diperparah

dengan munculnya pandemi.

Oleh karena itu, Puteri dalam forum ini mempromosikan kebijakan yang berbasis perspektif gender dengan memasukkan isu kesehatan reproduksi wanita, kesejahteraan anak dan remaja sebagai bagian dari kunci pemulihan ekonomi dan fiskal.

Puteri menyampaikan, penurunan pelayanan kesehatan serta keterlambatan imunisasi dasar bagi anak-anak akan meningkatkan kasus risiko kehamilan bahkan kematian ibu dan anak. Selain itu, penanganan pandemi Covid-19 seperti pembatasan sosial dan penutupan sekolah ternyata berkontribusi pada kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Sepanjang tahun 2020, kami mencatat peningkatan sebesar 40 persen pada laporan kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan domestik dan *cyber* terhadap perempuan,” kata Puteri. Untuk itu, tambah politisi fraksi Golkar itu, diperlukan kebijakan berbasis perspektif gender sebagai kunci pemulihan pandemi.

Caranya adalah dengan melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kewirausahaan dan menempatkan perempuan, kualitas hidup anak dan remaja sebagai prioritas nasional. “Ke depan, kita perlu menguatkan kerja sama

kolaborasi antar parlemen guna mendukung tercapainya kebijakan berkeadilan gender dan inklusif di garis terdepan pemulihan pandemi,” tutupnya.

PARTISIPASI PEMUDA DALAM POLITIK

Sebagai salah satu anggota parlemen muda DPR RI, dalam *Forum of Young Parliamentarians*, anggota BKSAP Dyah Roro Esti mengajak para pemuda untuk aktif berpartisipasi ke dunia politik. Dirinya menyayangkan hingga saat ini kelompok pemuda Indonesia di bawah usia 40 tahun baru mewakili sekitar 10 persen dalam kuota parlemen DPR RI yang sebesar 575 orang.

“Kami berharap ke depannya berbagai elemen mendukung para pemuda berpartisipasi (dalam dunia politik),” ungkapnya usai mengikuti *Forum of Young Parliamentarians*, IPU ke-144, Nusa Dua, Bali. Untuk itu, Dyah Roro berharap para pemuda dunia, khususnya di Indonesia dapat saling menguatkan satu sama lain, agar tidak lagi menjadi kelompok minoritas dalam parlemen.

Ia mendorong pemuda berkolaborasi agar semakin memasifkan kepedulian dan wawasan masyarakat tentang peran pemuda di setiap aspek vital di Indonesia. “Dengan kolaborasi, kami ingin keterwakilan pemuda juga bisa meningkat,” kata Dyah Roro.

Sebagai informasi, dalam *Forum of Young Parliamentarians*, delegasi Indonesia diwakili oleh dua anggota BKSAP yakni Dyah Roro Esti dan Adde Rossi Khoerunnisa yang secara aktif menyampaikan masukan dan usulan dalam forum tersebut. Berbagai masukan dan usulan yang disampaikan adalah mengenai penegasan peran Indonesia terhadap keterwakilan pemuda dalam parlemen sekaligus peningkatan peran pemuda untuk menyelesaikan isu perubahan iklim. • [bia/es](#)

Indonesia Perkuat Diplomasi Dengan Parlemen Dunia



Momentum *Inter-Parliamentary Union* (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali pada 20-24 Maret 2022 lalu telah membuka ruang interaksi antar parlemen dari berbagai belahan dunia. Memperkuat komitmen demi tercapainya kesepakatan strategis, Indonesia melalui DPR RI bersama Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar pertemuan bilateral di sela-sela rangkaian sidang IPU ke-144.



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani melakukan pertemuan dengan Presiden Parlemen Liga Arab, Adel Bin Abdul Rahman Al Asoomi. Foto: Eno/Man

PUAN APRESIASI PELIBATAN PEREMPUAN DI PARLEMEN LIGA ARAB

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani melaksanakan pertemuan dengan Presiden Parlemen Liga Arab, Adel Bin Abdul Rahman Al Asoomi dan Ketua Parlemen Bahrain, Fawzia Bint Abdullah Zainal. Menyoroti peran perempuan dalam parlemen, dirinya menyampaikan keterwakilan perempuan di DPR RI yang saat ini berada pada angka 20,8 persen atau 120 orang dari total 575 anggota parlemen.

Puan mengapresiasi langkah progresif Parlemen Arab yang melibatkan perempuan dalam pembahasan isu pemberdayaan perempuan. Dirinya pun mengusulkan untuk segera dibentuk Grup Kerja Sama Bilateral antara DPR dengan Parlemen Arab. Sebab DPR RI memandang penting diplomasi parlemen baik secara regional dan global.

“Indonesia mengapresiasi langkah progresif Parlemen Arab melibatkan perempuan pada pertemuan Parlemen di kawasan Arab sekaligus perhatian terhadap isu pemberdayaan perempuan. Penting juga dilakukan kerja sama untuk memperkuat pembangunan demokrasi, kesetaraan gender terutama di sektor politik, dan hak asasi manusia,” terangnya. ● ts

RACHMAT GOBEL BAHAS POTENSI PENINGKATAN INVESTASI

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel turut melakukan pertemuan bilateral dengan Parlemen Jepang. Pada pertemuan tersebut, ia membahas potensi kerja sama Indonesia-Jepang di masa mendatang, salah satunya terkait proyek pembangunan di Indonesia, Ibu Kota Negara (IKN).

Politisi Partai NasDem itu menjelaskan proyek tersebut bernilai penting untuk pemerataan ekonomi di Indonesia sekaligus visi baru masa depan Indonesia. “Pertemuan bilateral ini turut membahas potensi peningkatan investasi Jepang dan Indonesia. Tidak hanya itu tapi juga (potensi) mendukung program-program dari pemerintah Indonesia termasuk proyek strategis,” ungkapnya. ● ts



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel bertukar cendera mata dengan Parlemen Jepang. Foto: Erman/Man

PERERAT KERJA SAMA DENGAN QATAR DAN SURIAH

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon, DPR RI melakukan pertemuan bilateral dengan Parlemen Qatar dan Parlemen Suriah. Ia mengungkapkan hubungan Indonesia dengan negara-negara Arab telah berlangsung lama dan baik, dimana negara-negara tersebut menjadi salah satu yang pertama mengakui kedaulatan Indonesia pada saat awal kemerdekaan.

“Juga karena kesamaan dalam hal agama dan berbagi kebudayaan, saya kira hubungan Indonesia dan Arab sangatlah dekat,” ucap Fadli Zon usai pertemuan tersebut. Fadli juga menekankan harapan kerja sama yang lebih erat bagi Indonesia dan negara-negara Arab di berbagai bidang. ● ts



Ketua BKSAP Fadli Zon bertukar cinderamata dengan Parlemen Qatar. Foto: Andri



Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana (tengah) saat pertemuan bilateral dengan Parlemen Swedia. Foto: Andri

INDONESIA JUNJUNG TINGGI PERDAMAIAN DUNIA

Senada dengan tajuk IPU ke-144 ‘*Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change*’ Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana melaksanakan pertemuan bilateral dengan Parlemen Swedia. Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak membahas isu perubahan iklim serta perdamaian hingga keamanan global.

“Kita meyakini bahwa esensi konstitusi kita adalah menjunjung tinggi perdamaian dunia. Sebetulnya, apa yang diperjuangkan oleh Indonesia dan juga negara - negara termasuk Swedia itu sama yaitu berupaya untuk mencari jalan keluar agar konflik tersebut tidak berkepanjangan,” terang Putu.

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan Indonesia menjunjung prinsip Piagam PBB sehingga penghormatan atas kedaulatan dan keutuhan wilayah adalah prioritas dalam menjalin hubungan diplomatik. Sebagai perwakilan dabil Bali, ia pun menekankan Bali adalah representasi perdamaian melalui filosofi Tri Hita Karana (hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Sang Maha Kuasa). ● ts

PERKUAT KERJA SAMA SEKTOR PENDIDIKAN

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menggelar pertemuan bilateral dengan Parlemen Pakistan dan Parlemen Belgia. Dirinya menyampaikan keinginan untuk membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan Indonesia.

“Parlemen Pakistan sudah punya (grup kerja sama bilateral), dia minta Indonesia juga segera membentuk, dan kami *directly agree* karena memang Pakistan sama Indonesia. Pakistan negara besar, kita negara besar, kita punya hubungan sejarah yang kuat,” ungkap politisi PKS itu.

Pada pertemuan tersebut, Mardani berharap, ada peningkatan kerja sama di sektor pendidikan sekaligus berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai bagaimana masing-masing negara menangani perubahan iklim. ● ts



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera saat menyambut Parlemen Belgia. Foto: Andri/Man



Gubernur Bali Wayan Koster (kiri) menerima kunjungan delegasi parlemen dunia di Pameran IKM Bali Bangkit. Foto: Eman/Prima

Momentum Kebangkitan Ekonomi dan Pariwisata Bali

Sidang IPU ke-144 menjadi momentum Bali untuk bangkit, khususnya sektor ekonomi dan pariwisata. Dimana, tak kurang dari 115 parlemen dari berbagai negara dunia hadir pada perhelatan yang dipusatkan di kawasan Nusa Dua, Bali, 20-24 Maret 2022 lalu.



BEBERAPA waktu lalu, tepatnya Jumat (4/2), penerbangan internasional menuju Bali resmi dibuka. Sejak saat itu pula, Bali dinyatakan telah siap menerima kedatangan para pelaku perjalanan

luar negeri (PPLN) non Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pembukaan penerbangan internasional tersebut ditandai dengan mendaratnya pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Narita Jepang ke Bandara I Gusti Ngurah Rai pada 3 Februari 2022. Hal ini diyakini menjadi langkah awal kebangkitan ekonomi Bali khususnya juga dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, tidak hanya bagi

masyarakat Bali tapi juga Indonesia secara keseluruhan.

MOMENTUM KEBANGKITAN BALI

Menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang IPU ke-144, merupakan bentuk penegasan bahwasanya di Indonesia terkhusus Bali sudah berhasil menerapkan protokol kesehatan sekaligus melaksanakan vaksinasi secara maksimal.

Di samping itu, kehadiran delegasi parlemen dunia akan membangkitkan citra Pulau Bali sekaligus membantu memulihkan perekonomian pariwisata di Pulau Dewata setelah cukup lama terdampak pandemi Covid-19. Forum parlemen dunia tersebut juga dinilai akan memberi kontribusi yang baik dalam menyebarkan informasi terkait

kondisi terkini pariwisata Bali secara global.

Gubernur Bali Wayan Koster, mewakili masyarakat Bali, secara khusus berterimakasih kepada DPR RI yang telah mempercayakan Nusa Dua, Bali sebagai tuan rumah penyelenggaraan Sidang IPU ke-144. Dirinya meyakini ini adalah momentum yang tepat memulihkan pariwisata dan ekonomi di Bali pasca Covid-19.

“Event ini menjadi citra baik untuk Bali dan Indonesia di mata dunia. Dan tentu ini menjadi catatan sejarah dalam keberhasilan Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI,” kata Wayan Koster.

Di sela-sela sidang, delegasi parlemen dunia diajak melihat langsung produk kerajinan lokal di Pameran IKM Bali Bangkit. Banyak produk buatan tangan yang berkualitas, estetika, bernilai seni dan budaya yang tinggi. Wayan Koster yang turut mendampingi para delegasi berharap, setelah dari kunjungan ini, produk IKM Bali makin mendunia.

“Kali ini rombongan *excom* sudah diajak berkunjung ke Bali Bangkit, untuk mengenal produk-produk lokal Bali yang diproduksi oleh masyarakat

Bali secara tradisional atau *handmade*. Sekaligus memperkenalkan produk UMKM Bali ke peserta sidang IPU, mudah-mudahan delegasi bisa melihat dan tertarik kepada produk-produk ini,” harap Wayan Koster.

Wayan Koster menerangkan, apa yang sudah dilakukan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Bali dalam rangka mengembangkan IKM ini bisa saja dicontoh oleh daerah lain. Selain menampung hasil kerajinan tangan masyarakat, kegiatan ini diyakini mengasah sisi kreativitas dan inovasi masyarakat.

“Apa yang sudah dilakukan oleh Dekranasda Provinsi Bali sudah sangat tepat, jika perlu ditegaskan lagi, sehingga para perajin, IKM bisa terus mengikuti aturan dalam Pameran IKM Bali Bangkit ini,” tuturnya.

Di Pameran IKM Bali Bangkit, para delegasi parlemen dunia dipandu langsung oleh Ketua Dekranasda Bali Ni Putu Putri Suastini Koster. Ia sangat kagum akan antusias para delegasi melihat dan melakukan transaksi atas produk buah tangan masyarakat Bali.

“Pertama terimakasih, karena delegasi ini tidak main-main. Mereka

datang dari penjuru dunia. Event ini mengingatkan bahwasanya Bali tetap ada, pariwisata tetap ada untuk wisatawan. Harapan kami juga, mereka semakin mengenal produk-produk asli buatan Bali,” ucap Putri Koster.

Pada perjalanannya, Pameran IKM Bali Bangkit telah dilaksanakan dari awal 2021 di Taman Budaya, Denpasar, ada beberapa peserta yang tereliminasi karena tak kuat menghadapi tantangan. “Selain bertujuan membantu pemasaran produk, Pameran IKM Bali Bangkit merupakan bagian dari upaya memperbaiki pola yang sebelumnya melenceng,” ujar Putri Koster.

Sebelum situasi pandemi, pelaku IKM dan UMKM Bali cenderung fokus pada pasar ekspor sehingga produknya lebih dikenal di luar negeri, tetapi asing bagi masyarakat lokal. Berangkat dari persoalan itu, Dekranasda Bali berusaha membangkitkan kembali IKM Bali sekaligus memperbaiki tata kelolanya. Pelan tapi pasti, banyak pihak mulai melirik pameran IKM Bali Bangkit karena menampilkan produk lokal berkualitas.

“Semoga, IKM-IKM ini mendapat hikmah dari pandemi yang ada, bahwa mereka tidak hanya berinovasi mengembangkan produk, tetapi mereka juga melestarikan. Itu yang ibu lihat, jangan sampai tugas kita melestarikan budaya leluhur itu tidak kita laksanakan,” terangnya.

Dalam mengembangkan kecintaan terhadap produk lokal, Istri Gubernur Bali ini mengusung jargon, *cintai produk dalam negeri, banggalah memakai produk daerah sendiri*. Ia berpandangan, masing-masing individu berkewajiban menjaga kelestarian adat dan budaya daerah masing-masing.

“Kami di Bali menjaga warisan-warisan yang sudah diwariskan, begitu juga saudara-saudara kita di daerah lain. Makanya Ibu bilang, kalau ingin memakai produk Bali, pakailah tenun asli Bali. Kalau ingin memakai Batik Jawa, harus yang asli buatan saudara kita di Jawa. Hanya dengan begitu kita bisa menjaga warisan nusantara,” pungkasnya. ● es/es



Ketua Dekranasda Bali Ni Putu Putri Suastini Koster memandu langsung delegasi parlemen dunia melihat produk IKM Bali di Pameran Bali Bangkit. Foto: Erman/Prima



Oleh : Efri Nirwan Pamoto Ritonga
Wartawan Senior Koran Tempo

Peta Jalan Parlemen Dunia setelah **Sidang IPU Bali**

Tanpa peta jalan yang jelas, kesepakatan-kesepakatan dalam IPU ke-144 di Bali berpotensi tidak terlaksana secara optimal. DPR RI punya pekerjaan rumah mengegolkan isu Palestina.

Sidang parlemen dunia (Inter-Parliamentary Union/ IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali pada 20-24 Maret 2022 rampung sudah. Jerih payah Indonesia sebagai tuan rumah terbayarkan. Sidang yang dihadiri delegasi parlemen dari 115 negara itu menelurkan Deklarasi Nusa Dua yang menyerukan penanganan perubahan iklim menuju target nol emisi karbon (*net zero emission*) pada 2050 atau sesuai target masing-masing negara.

Deklarasi Nusa Dua juga mendesak penguatan aksi nasional untuk mewujudkan komitmen global dalam penanganan perubahan iklim. Komitmen negara-negara maju untuk mendukung pembiayaan penanganan iklim dan transisi energi, utamanya untuk pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan di negara-negara berkembang, sebesar US\$ 100 miliar atau Rp 14.400 triliun kembali ditagih.

Di samping itu, IPU ke-144 juga menyepakati dua resolusi yang menjawab tantangan kondisi dunia saat ini. Pertama adalah resolusi yang menekankan kembali pentingnya menegakkan prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta peran parlemen dalam mempromosikan rekonsiliasi dan stabilitas di wilayah konflik.

IPU menyadari diperlukan komitmen kuat untuk menyelesaikan perang dan konflik di berbagai belahan dunia. Organisasi itu menggunakan istilah 'diplomasi preventif' sebagai alat deteksi dini untuk menyelesaikan potensi masalah sejak awal. Adapun resolusi kedua mengajak parlemen dunia mendukung peran teknologi komunikasi dan informasi bagi sektor pendidikan.

Sebagaimana lazimnya setiap sidang IPU, terdapat pembahasan *emergency item* atau masalah darurat yang kali ini memilih topik invasi Rusia ke Ukraina. IPU sepakat mengancam invasi Rusia, menyerukan penghentian perang, serta mendesak dilakukannya dialog dan diplomasi. IPU juga akan membentuk gugus tugas untuk menjembatani dialog antar parlemen kedua negara.

Sidang IPU memunculkan dorongan untuk memperkuat kesiapan setiap negara dalam menghadapi pandemi lain di masa depan pasca-pandemi Covid-19. Ada pula desakan di bidang pemberantasan korupsi yang menekankan peran parlemen dalam memperkuat peraturan perundang-undangan guna membasmi korupsi lintas negara, sekaligus pemulihan aset korupsi dan kejahatan lain.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan IPU ke-144 terbilang sukses. Semua agenda, mulai dari

sidang majelis, komite pengarah, forum-forum, diskusi panel, maupun pertemuan bilateral berjalan mulus. Meski masing-masing delegasi datang dengan membawa kepentingan nasionalnya, kata sepakat dapat dicapai pada semua isu.

Perdebatan dalam *emergency item* yang membahas tiga proposal resolusi yang disampaikan oleh Ukraina, Indonesia, dan Selandia Baru berhasil diselesaikan dengan proses pemungutan suara. Sebagai catatan, Ukraina mencabut proposalnya sebelum pemungutan suara digelar, sehingga yang tertinggal adalah proposal Indonesia 'melawan' Selandia Baru.

Meski akhirnya kalah dalam pemungutan suara, delegasi parlemen Indonesia tidak bisa dibilang mengalami kekalahan diplomasi. Sebabnya, secara keseluruhan proposal resolusi yang disampaikan Selandia Baru hampir sama moderatnya dengan dengan proposal 'jalan tengah' Indonesia.

Di luar sukses tersebut, tentu saja ada sejumlah catatan dalam penyelenggaraan sidang IPU Nusa Dua yang bisa menjadi bahan evaluasi bagi sidang-sidang berikutnya. Pertama ialah perlunya IPU menyusun peta jalan (*roadmap*) atas semua poin-poin kesepakatan yang tercapai di Bali.

Peta jalan tersebut memuat hal-hal apa yang harus dilaksanakan oleh parlemen untuk membuktikan komitmennya terhadap Deklarasi Nusa Dua maupun kesepakatan lainnya. Tanpa peta jalan yang jelas, target yang terukur, serta bingkai waktu yang pasti, sulit menguji implementasi kesepakatan IPU.

Ambil contoh resolusi IPU mengenai peningkatan peran teknologi komunikasi dan informasi (ICT) di dunia pendidikan. Resolusi ini menyerukan kepada parlemen dan pemerintah untuk menyusun undang-undang yang mendukung pembangunan infrastruktur ICT bagi kegiatan belajar-mengajar. Resolusi itu juga mengimbau pemberian pelatihan bagi guru serta memasukkan teknologi digital ke dalam kurikulum pendidikan.

Seharusnya, bersamaan dengan pembuatan resolusi itu, IPU juga membuat matriks yang akan diisi informasi mengenai upaya yang telah dilakukan parlemen dalam mengegolkan undang-undang tentang dukungan ICT bagi pendidikan. Matriks itu bukanlah sebagai penghakiman kepada negara tertentu, melainkan cara untuk mengambil pembelajaran dan

mengetahui praktik terbaik yang bisa direplikasi secara global.

Contoh lain masih pada resolusi sektor pendidikan. Mengutip UNESCO, resolusi IPU menyebutkan pada 2016 terdapat lebih dari 600 juta anak-anak dan remaja yang tidak dapat mencapai tingkat kecakapan minimum dalam membaca dan matematika. Data berikutnya, 53 persen anak-anak di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak dapat membaca dengan baik pada usia 10 tahun.

Di sini lagi-lagi, akan sangat baik jika IPU menetapkan target kecakapan minimum dalam membaca dan matematika yang hendak dicapai parlemen dunia dalam beberapa tahun ke depan. Target tersebut, sekalipun mengutip target dari lembaga lain seperti UNESCO, akan dapat menjadi pengukur keberhasilan parlemen dunia dalam menjalankan resolusi yang disusunnya sendiri.

Catatan kedua adalah kurangnya evaluasi terhadap pelaksanaan poin-poin deklarasi, resolusi, ataupun hasil kesepakatan lain dari IPU sebelumnya. Minimnya evaluasi itu membuat daya ikat sidang parlemen sedunia ini kendur. Sebagai contoh, sidang IPU ke-143

di Madrid, Spanyol menerbitkan deklarasi perihal penguatan demokrasi pada tingkat nasional dan global. Deklarasi Madrid menyerukan persatuan dan pencarian kesamaan di antara negara-negara untuk menghadapi tantangan demokrasi di berbagai belahan dunia. Beberapa isu yang digarisbawahi

Deklarasi Madrid adalah penurunan kepercayaan terhadap sistem politik, peningkatan kesenjangan ekonomi, ketidakadilan struktural, serta peningkatan polarisasi masyarakat. Akan sangat ideal, setelah berjalan beberapa bulan atau beberapa tahun, perkembangan semua isu tadi kembali diuji dalam IPU sebagai bahan evaluasi.

Hal yang lain kurang menonjol adalah agenda pembahasan ekonomi dan bisnis. Forum-forum bilateral memang sudah tersedia untuk membicarakan berbagai isu, termasuk bisnis dan investasi. Namun sayangnya, waktu pembicaraan yang singkat, hanya sekitar 30 menit, membuat dialog tidak mendalam. Walaupun tidak memiliki kewenangan eksekusi, parlemen dapat membuka jalan pembicaraan mengenai bisnis dan investasi.

Isu berikutnya yang juga terasa kurang mendapat perhatian peserta IPU ke-144 adalah pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil kejahatan lintas negara. Isu ini 'hanya' mendapat tempat dalam diskusi panel yang menghadirkan sebagian kecil anggota parlemen, ditambah pakar antikorupsi yang memberi pemaparan singkat. Tidak terlihat upaya sungguh-sungguh para wakil rakyat untuk membahas persoalan korupsi. Padahal kita tahu, dalam konteks Indonesia saja, korupsi yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat jamak terjadi.

Terakhir, parlemen sedunia, terutama DPR RI, masih memiliki pekerjaan rumah mengegolkan isu pelanggaran hak asasi manusia di Palestina sebagai agenda *emergency item* IPU. Setelah setidaknya dua kali gagal masuk *emergency item*, yakni di IPU Madrid karena tersingkir oleh isu pemerataan vaksin Covid-19, serta IPU Bali karena kalah oleh isu invasi Rusia, hendaknya dalam IPU ke-145 di Kigali, Rwanda, pada September mendatang, persoalan Palestina yang merupakan keprihatinan mayoritas rakyat Indonesia bisa menjadi topik *emergency item*. ●



Absurd, Syaratkan BPJS dalam Jual Beli Tanah

Pemerintah mewajibkan syarat baru untuk pendaftaran hak atas tanah atau satuan rumah susun yang diperoleh dari jual beli. Mulai 1 Maret 2022 setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan. Hal itu tertuang dalam surat bernomor HR.02/164-400/II/2022 yang ditandatangani Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayan.

Terkait syarat tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan bahwa ketentuan ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam Inpres 1/2022 diinstruksikan kepada berbagai kementerian untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk Kementerian ATR/BPN. Selain aturan terkait jual-beli tanah, pembuatan SIM, STNK, SKCK, dan beberapa sektor pelayanan publik lainnya juga mensyaratkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengimbau pemerintah agar tidak lagi membuat kebijakan yang bersifat mengada-ada dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ia berpendapat sebaiknya pemerintah mencari

cara lain dalam memikat masyarakat agar bersedia secara sukarela mengikuti program BPJS.

“Ini yang dikeluhkan oleh masyarakat, walaupun kita tahu persis apa yang menjadi latarbelakang ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurus jual beli tanah dikaitkan dengan BPJS. Boleh-boleh saja kita menyetujui apa yang dimaksudkan oleh

pemerintah, tetapi oleh masyarakat hal yang demikian dipandang sebagai salah satu yang dibuat-buat. Jadi tidak usah mengada-ada seperti itu,” tutur Syamsurizal.

Ia berpendapat, sebaiknya pemerintah mencari solusi lain dalam menjangkir kepesertaan BPJS dan tidak membuat aturan yang bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Kami dari Komisi II DPR menyarankan, kalau membuat kebijakan-kebijakan terkait apa yang dikerjakan pemerintah, jangan membuat sesuatu yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Yang kita harapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat menyejukkan masyarakat. Jadi carikan cara lain agar masyarakat

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal. Foto: Ariel/Man



MENGIMBAU AGAR PEMERINTAH TIDAK MENYULITKAN MASYARAKAT YANG INGIN MELAKUKAN JUAL BELI TANAH DENGAN KETENTUAN SYARAT KEPESERTAAN AKTIF BPJS KESEHATAN

Anggota Komisi II DPR RI Chairul Anwar.
Foto: Ridwan/Man



tertarik ikut BPJS. Jangan dikait-kaitkan seperti ini, yang menurut saya agak janggal.

Senada dengan Syamsurizal, Anggota Komisi II DPR RI Chairul Anwar mengimbau agar pemerintah tidak menyulitkan masyarakat yang ingin melakukan jual beli tanah dengan ketentuan syarat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan. Menurutnya, antara jual-beli tanah dan persoalan kesehatan adalah dua hal yang berbeda. Bisa jadi masyarakat yang akan menjual tanahnya adalah orang yang sedang kesulitan secara keuangan.

“Menurut saya (masyarakat) jangan dipaksa-paksa. Di antara mereka ini (mungkin) ada yang tidak mampu. Seharusnya jadi tanggung jawab pemerintah untuk masuk di APBN untuk (mendapatkan subsidi sebagai) masyarakat yang tidak mampu,” ujar Chairul.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Guspari Gaus juga menilai kebijakan yang di gagas pemerintah dengan mewajibkan fotokopi kartu BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat pendaftaran tanah atau rumah susun yang akan melakukan akad jual beli adalah kebijakan yang absurd, mengada-ada dan bisa di kategorikan

sebagai bentuk kesewenang-wenangan.

“Jauh panggang dari api dan tidak ada korelasinya. Kenapa rakyat harus dipaksa mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional, apalagi mengkaitkannya dengan transaksi bidang pertanahan. Kebijakan ini jelas terlalu mengada-ada dan berebihan. Keinginan Pemerintah untuk memastikan masyarakat memiliki jaminan kesehatan kenapa harus di kaitkan dengan transaksi jual beli tanah oleh masyarakat. Sungguh tidak adil, memanfaatkan segala infrastruktur yang ada di dalam pemerintahan untuk ‘memaksa’ masyarakat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional. *Gak* nyambung logikanya,” tegas politisi PAN ini.

Ia berpendapat, pemerintah seharusnya menekankan kepada pengelola BPJS untuk membenahi sistem dan meningkatkan pelayanan serta transparansi pengelolaan BPJS Kesehatan. Jika masyarakat merasakan manfaatnya dan puas terhadap *service* yang diberikan BPJS kesehatan. Maka tanpa dipaksa masyarakat akan dengan sendirinya ikut berpartisipasi dalam program jaminan kesehatan dari Pemerintah ini.

“Oleh karena itu, dengan keluarnya aturan baru itu, terkesan pemerintah memaksakan kepesertaan BPJS Kesehatan dengan segala cara. Aneh saja, korelasinya apa antara tanah sama jaminan kesehatan? Peralihan kepemilikan tanah dan jaminan sosial

KENAPA RAKYAT HARUS DIPAKSA MENGIKUTI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, APALAGI MENKAITKANNYA DENGAN TRANSAKSI BIDANG PERTANAHAN

Anggota Komisi II DPR RI Guspari Gaus.
Foto: Andri



kesehatan merupakan hak rakyat yang harus sama - sama dilindungi negara, sehingga dalam melindungi hak tersebut negara tidak boleh memberangus dan membungkam hak lainnya,” tukasnya. • dep.gal/es

Menimbang Kembali PPN 11 Persen



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sudah disahkan. Sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf a UU tersebut, per 1 April 2022 ini pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen mulai diberlakukan.

Optimisme bertambahnya pundi-pundi negara dari penerimaan pajak kian nyata. Namun, ada suara “lirih” yang perlu didengar untuk mengkaji ulang regulasi ini. Beberapa waktu lalu, **Parlementaria** mendapat siaran pers dari Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Ia memberi masukan dan

solusi atas kebijakan baru di bidang perpajakan itu. Menurutnya, regulasi ini perlu dikaji ulang, karena beberapa argumen, seperti belum ada aturan teknis dan tren kenaikan komoditas. Ia memahami bahwa kebijakan ini untuk menaikkan penerimaan negara di sektor perpajakan.

Mengapa harus dikaji ulang? Politisi Partai Gerindra itu membeberkan

pandangannya kepada **Parlementaria**. Ia menegaskan sikapnya, bukan tidak mendukung regulasi PPN tersebut, melainkan perlu diberi ruang penundaan atas pemberlakuannya dengan menyajikan argumen logis.

Menurut Hergun, begitu Heri Gunawan akrab disapa, aturan turunan UU HPP belum ada. Jadi, selama aturan turunannya belum turun, penerapan PPN 11 persen bisa ditunda dahulu. Apalagi, sosialisasi atas UU ini juga sangat minim.

Berbagai potensi penerimaan pajak memang terus digarap pemerintah untuk memperbaiki performa penerimaan pajak yang akan dimanfaatkan membiayai APBN. Namun, kondisi aktual hari ini tak

“SEJAK MEMASUKI 2022, EKONOMI RAKYAT MULAI TERDESAK OLEH KENAIKAN SEJUMLAH PRODUK, ANTARA LAIN MINYAK GORENG, KEDELAI, DAGING, BBM NON SUBSIDI, DAN YANG LAINNYA

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Foto: Jaka/Man



menguntungkan bagi para wajib pajak. Wabah virus corona atau Covid-19 masih belum sepenuhnya teratasi. Tentu kondisi ini masih menyulitkan ekonomi para wajib pajak. Kesulitan ekonomi terus menekan. Baik pengusaha maupun individu belum sepenuhnya bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Ketika regulasi perpajakan yang baru akan diterapkan, masyarakat belum siap dengan kondisi ekonominya. Menurut Hergun, kondisi saat ini juga dibarengi dengan kenaikan sejumlah komoditas plus kenaikan energi akibat perang Rusia-Ukraina. Kondisi ini belum ideal untuk menyambut penerapan PPN 11 persen. “Sejak memasuki 2022, ekonomi rakyat mulai terdesak oleh kenaikan

sejumlah produk, antara lain minyak goreng, kedelai, daging, BBM non subsidi, dan yang lainnya,” kilah Hergun.

PPN 11 persen diberlakukan saat pandemi belum selesai dan perang Rusia-Ukraina terjadi. Harga komoditas dan energi global pasti naik. Ini tentu berdampak ke perekonomian domestik. Argumen selanjutnya, sambung legislator dari Jabar IV ini, kinerja penerimaan perpajakan 2022 berpeluang melanjutkan capaian positif 2021. Realisasi penerimaan pajak 2021 mengakhiri tradisi shortfall pajak (penerimaan pajak di bawah target yang ditetapkan) selama 12 tahun.

“Penerimaan pajak di tahun 2021 mencapai Rp1.277,5 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 103,9 persen dari target penerimaan pajak dalam APBN 2021. Hal tersebut didorong oleh meningkatnya ekspor impor dampak dari kenaikan komoditas global dan energi,” paparnya. Jadi, maksud Hergun, mumpung tren penerimaan pajak sedang baik, maka penerapan regulasi PPN 11 persen bisa ditunda dulu sampai ekonomi domestik betul-betul membaik.

Dia mencontohkan, harga minyak Brent telah mencapai 131 dolar AS per barel. Sehingga, pemerintah bisa mendapatkan penerimaan negara dari kenaikan harga ICP (Indonesian Crude Price) dan sejumlah komoditas lainnya. Ini sudah cukup membantu untuk pemasukan kas negara, tanpa penerapan kenaikan PPN 11 persen. Artinya, regulasi itu masih bisa ditunda pemberlakuannya.

Sementara itu, dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri, sudah dipastikan masyarakat akan meningkatkan konsumsinya. Di sini penerapan PPN 11 persen perlu dilihat kembali.

“Memasuki bulan suci, biasanya masyarakat meningkatkan konsumsinya. Bila akan dikenakan PPN 11 persen, maka akan membebani dan sekaligus menurunkan daya beli masyarakat. Padahal, konsumsi masyarakat pada Ramadhan dan Idul Fitri jadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi

nasional,” jelasnya lebih lanjut.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal IV-2021, konsumsi masyarakat menyumbang 52,9 persen PDB (Produk Domestik Bruto). Sehingga, penurunan daya beli dikhawatirkan akan menurunkan pertumbuhan PDB. Begitulah pria asal Sukabumi, Jawa Barat itu mengutarakan pandangan kritisnya. Bila UU HPP ditunda sementara pemberlakuannya, itu bisa menyelamatkan semuanya.

UU HPP merupakan undang-undang yang terdiri atas 9 bab dan 19 pasal yang mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPH), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan UU Cukai. “Pemerintah perlu membuat kajian yang komprehensif mengenai kondisi perekonomian global, regional, nasional dan daerah, serta dampaknya terhadap kehidupan rakyat. Hasil kajian akan menentukan waktu yang tepat untuk memberlakukan PPN 11 persen,” seru Hergun.

Ia berharap, dari hasil kajian itu, selanjutnya pemerintah merancang aturan teknis mengenai pemberlakuan PPN 11 persen dengan menyosialisasikannya kepada masyarakat dalam waktu yang cukup. Dengan begitu, masyarakat memiliki pemahaman mengenai aturan PPN ini.

Bila kelak pemerintah mendapatkan penerimaan perpajakan yang berlipat dari kenaikan komoditas global dan energi seperti pada 2021, maka bisa memberlakukan insentif untuk penambahan tarif PPN 1 persen ditanggung oleh pemerintah (DTP). Aturan UU pun tetap bisa dilaksanakan tanpa membebani masyarakat.

“Namun, bila pemerintah tidak memiliki dana yang cukup dan khawatir akan menambah utang dan defisit, maka sebaiknya ketentuan PPN 11 persen diberlakukan pada kuartal IV-2022 yang biasanya terjadi lonjakan belanja pemerintah sebagai pendorong perekonomian nasional,” tutup Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tersebut.

● mh/es

RUU Pendidikan Kedokteran: Upaya Wujudkan Layanan Kesehatan yang Berkualitas

Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran memiliki implikasi penting dan strategis dalam konsepsi Sistem Pendidikan Kedokteran di Indonesia. Dalam mewujudkan kesejahteraan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia diperlukan dokter yang berkualitas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Dokter yang berkualitas dihasilkan dari penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang terbentuk dari sistem pendidikan kedokteran yang dapat menghasilkan lulusan dokter sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memiliki nilai-nilai kemanusiaan atau humanis.

Secara konkret, pendidikan kedokteran harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, penelitian, serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang bertujuan pada empat tujuan besar, yaitu menghasilkan dokter dan dokter gigi yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi dan profesional.

Lalu berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi, memenuhi kebutuhan dokter dan dokter gigi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkeadilan dan meningkatkan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi.

Diantara tujuan pendidikan kedokteran tersebut, terdapat satu aspek penting dan strategis yakni dokter atau dokter gigi yang dihasilkan melalui pendidikan kedokteran tidak cukup sekedar berkualitas dan humanis. Akan tetapi, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tersebar merata di seluruh wilayah tanah air agar pelayanan kesehatan benar-benar merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Romo H.R. Muhammad Syafi'i menilai, distribusi dokter ke seluruh penjuru Indonesia belum lah merata. Terkait hal itu, dalam revisi UU Dikdok nantinya akan mewajibkan masing-masing pemerintah daerah mengatasi

kekurangan dokter di berbagai daerah dengan cara memberikan beasiswa kepada tiap calon dokter yang berasal dari masing-masing daerah dengan ikatan dinas terutama.

Usai tamat pendidikan menjadi dokter nantinya maka bisa langsung bertugas di daerah yang kekurangan jumlah dokter. Apalagi, banyak warga yang berminat menjadi dokter tetapi mengalami kendala ekonomi. Maka,

diharapkan ke depan melalui partisipasi pemda menjadi solusi supaya distribusi dokter ke daerah-daerah

Anggota Baleg DPR RI
Romo H.R. Muhammad Syafi'i.
Foto: Jaka/Man





itu bisa lebih merata karena dibiayai masing-masing pemda terutama daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).

Dengan demikian, Romo menegaskan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok) yang bertujuan merevisi UU existing, UU Nomor 20 Tahun 2013, mendesak untuk disahkan. Tujuannya, mahasiswa yang telah lulus menempuh pendidikan di fakultas kedokteran terakreditasi yang memiliki kualitas akademik setara uji kompetensi dapat langsung memakai gelar dokter.

“UU Dikdok ini harus segera direvisi. Pertama, soal terhambatnya mahasiswa yang sudah lulus dalam akademik dan juga profesi di kedokteran memiliki gelar dokter karena ada uji kompetensi. Melalui fakultas terakreditasi maka seharusnya sudah dianggap mumpuni menghasilkan dokter berkualitas setara uji kompetensi. Jadi, mahasiswa

yang telah lulus bisa langsung memakai gelar dokter,” tandasnya usai memimpin kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, baru-baru ini.

Namun demikian, calon dokter yang akan membuka praktek tetap wajib untuk mengikuti uji kompetensi. Selain itu, biaya pendidikan kedokteran yang masih terbilang mahal di Indonesia menjadi sorotan Baleg. Maka, Romo mengusulkan opsi kemungkinan pemangkasan beberapa mata pelajaran, sehingga memungkinkan dokter tamat pendidikan lebih cepat tanpa harus

mengurangi kualitas.

Rekomendasinya, perlu segera diajukan RUU tentang Pendidikan Kedokteran untuk menggantikan UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang disusun khususnya berkenaan dengan batang tubuh Rancangan Undang-Undang serta disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan kedokteran berkaitan dengan upaya membangun atau mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat, termasuk dalam kaitannya dengan ketahanan nasional serta sebagai bagian dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. RUU Pendidikan Kedokteran merupakan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, karena

saat ini UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Pertimbangan secara filosofis adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan kedokteran merupakan upaya dalam menghasilkan dokter dalam mendukung dan mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat dalam mencapai tujuan nasional. Adapun, landasan sosiologis adalah saat ini terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan penyelesaian seperti masalah afirmasi penerimaan mahasiswa dan pemerataan penyebaran dokter di seluruh tanah air, dukungan beasiswa bagi calon mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar serta yang kurang mampu.

Sedangkan landasan yuridis adalah karena UU Nomor 20 Tahun 2013 yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang pendidikan kedokteran. Sasaran yang akan diwujudkan melalui ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan RUU tentang Pendidikan Kedokteran ini adalah untuk menata kembali penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat serta tantangan global dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran.

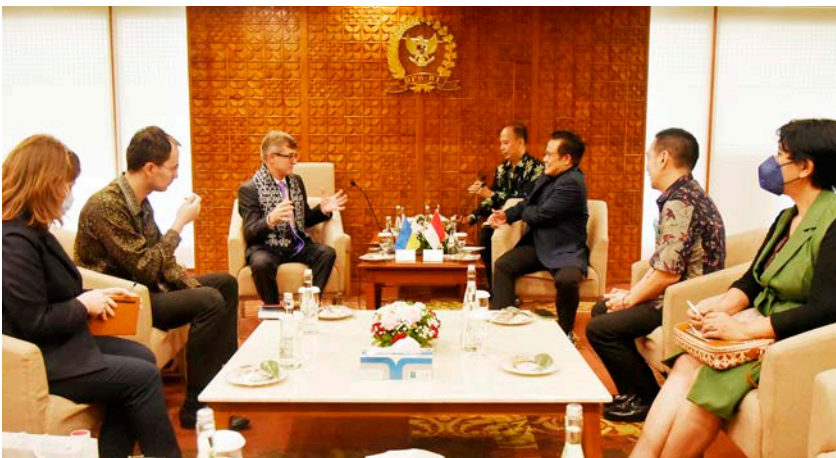
Peraturan-peraturan pelaksanaan atas amanat RUU tentang Pendidikan Kedokteran seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan Konsil Kedokteran Indonesia perlu segera dirancang secara simultan. Apabila rancangan ini telah disetujui, dalam waktu tidak lebih dari dua tahun seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya telah dibuat sehingga pada akhirnya dapat efektif dilaksanakan dan berguna untuk memperlancar pelaksanaan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran. ● pun/es



Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Presiden Jokowi ketika menyaksikan ajang MotoGP di Sirkuit Pertamina Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (20/3/2022). Foto: Gerald/Man



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat menghadiri pembukaan festival produk halal milenial di Gorontalo, Sabtu (26/3/2022). Foto: Azka/Man



Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar usai menerima kunjungan Dubes Ukraina, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (25/3/2022). Foto Munchen/Man



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meninjau usaha kecil menengah di Padang, Sumatra Barat. Foto: Yoga/Man





Suasana pengambilan suara pemilihan calon anggota BPK di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (18/3/2022).
Foto : Ubaid/Man



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi pada sesi foto bersama usai rapat audiensi dengan Tim Advokasi Hak Masyarakat Adat Intan Jaya di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (28/03/2022). Foto: Oji/Ma



Johan Budi:

**PRINSIP MENGALIR DAN
BERMANFAAT LEBIH BANYAK**

Hari menjelang siang, saat *Parlementaria* diterima dengan hangat oleh Johan Budi di 403, Gedung Nusantara 1 Lantai 4. Sungguh kesan yang berbeda dari citra *poker face* yang kerap disematkan padanya, terlebih kala masih aktif wara-wiri di media menjadi juru bicara. Meski begitu, suara tegas yang khas seolah tak hilang dari pria berbadan tegap ini.

“Ya silakan, *duh* bulan puasa *sih* jadi *nggak* bisa nawarin,” ujarnya sedikit berkelakar mempersilakan duduk sambil menunjuk pada air mineral yang tersedia di atas meja.

Johan Budi bercerita secara singkat tentang 56 tahun kehidupannya, khususnya di 16 tahun terakhir yang membuat dirinya dikenal masyarakat hingga kemudian berlabuh ke Senayan. Semua terangkum hanya dalam satu jam bincang santai di awal bulan Ramadan itu. Berbeda dari tokoh lainnya, tak mudah mencari kisah masa kecil seorang Johan Budi di portal-portal berita.

“Jadi, saya dilahirkan di sebuah desa, di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saya lahir dari seorang ibu rumah tangga biasa kemudian ayah saya pegawai negeri dulu. Pensiun pegawai negeri,” ungkapnya secara lugas saat membuka cerita tentang kehidupan pribadinya

Memiliki nama lengkap Johan Budi Sapto Pribowo, pria kelahiran 29 Januari 1966 ini menghabiskan masa kecilnya di Mojokerto, Jawa Timur hingga akhirnya lulus dari SMAN 1 Sooko dan hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan. Baginya, sosok Johan saat remaja termasuk yang cukup nakal dan suka dengan hal-hal yang memicu adrenalin. Tak ayal, banyak yang tak menyangka ia bisa melenggang ke kampus berjaket kuning kebanggaan Ibu Kota.

“Bapak saya *tuh* bangga banget. Saya dianggap nakal dulu, *kan* sering balapan (motor). Saya *tuh* jarang belajar, *senengnya* naik motor, balapan. Ayah saya *tuh* bener-bener *surprised* betul.

Tapi bandel saya bukan yang mabok, itu tadi main motor itu. Naik motor, Balapan. Itu saya suka!” sambil sedikit terkikik Johan menggambarkan betapa orangtuanya tak percaya dengan pencapaiannya.

JAKET KUNING DUNIA TEKNIK

Johan sendiri mengaku sebenarnya kala itu, ia pun sempat tak yakin bisa menembus Universitas Indonesia meski sadar menjadikan jurusan Gas dan Petrokimia di Fakultas Teknik UI sebagai pilihan pertamanya dalam Sipenmaru tahun 1985. Hasil yang ditunggu selama 2 bulan itu kemudian mengubah status Johan dari anak desa menjadi anak rantau, lakon yang dijalani hingga saat ini.

Saat itu, semua yang ia pilih dalam Sipenmaru berkaitan dengan teknik, tak ada yang bersinggungan dengan ilmu komunikasi, tidak pula politik.

Dunia kampus tak hanya memberinya ilmu tentang purifikasi bahan bakar fosil dan hal teknis lain yang diajarkan di dalam kelas. Lebih jauh dari itu, justru kemampuan menulis dan berbicara dari bapak dua anak ini diasah di fase ini.

Ketertarikannya di dunia tulis-menulis berangkat dari kegemarannya membaca buku, autobiografi adalah pilihan utamanya. Si anak rantau ini berusaha menyisihkan uang yang didapat dari beasiswa untuk membeli buku setiap

bulan, mengenalkan dia pada “orang-orang besar” lewat bacaan.

Jangan bayangkan berapa banyak organisasi yang ia ikuti saat menjadi mahasiswa. Ia mengaku hanya bergabung dengan ikatan mahasiswa, majalah kampus dan klub radio di fakultas teknik. Dua yang terakhir ini kemudian memiliki keterkaitan dengan pekerjaan yang ia geluti selama belasan tahun.

Lulus dari kampus, Johan sempat mencicipi posisi sebagai peneliti di Lembaga Minyak dan Gas Bumi (saat ini- BLU PPPTMGB “LEMIGAS”). Profesi yang sejalan dengan keilmuan yang dipelajarinya selama bertahun-tahun. Karirnya di lembaga ini tak panjang, tak sampai 2 tahun. Kegemarannya menulis



justru membawanya hijrah ke dunia jurnalistik.

“Saya itu dulu suka nulis ya. Saya beberapa kali *nulis* kolom di media, pokoknya di koran-koran itu sebelum saya jadi wartawan ya. Jaman kuliah saya suka nulis, waktu di Lemigas itu saya masih nulis,”

Sebagai orang yang memiliki latar keilmuan eksakta, Johan tak hanya menulis topik teknologi. Tema-tema sosial dan politik juga kerap kali disuarakannya dalam kolom-kolom media massa.

BANTING SETIR KEHIDUPAN

Namun, bisa jadi tahun 1995 adalah titik balik hidupnya. Sosok nan kalem ini ‘banting setir’ menjadi seorang wartawan dari yang semula sebagai teknokrat di bidang energi. Pengalaman menggeluti dunia jurnalistik saat di kampus membawanya diterima di Majalah Forum Keadilan hingga Tempo pada awal 2005.

Ternyata, ‘banting setir’ inilah yang membuatnya benar-benar masuk ke dalam dunia sosial dan hukum. Kemampuan investigasi menjadi syarat mumpuni dirinya untuk masuk ke dalam KPK di luar pejabat kementerian yang direkrut ke dalam lembaga antirasuah ini pada 2005. “KPK baru berdiri Desember 2003, tapi kan belum punya pegawai itu sampai 2004. Nah, saya angkatan pertama yang diseleksi yang direkrut dari luar kementerian,” ujarnya.

Awal mula masuk ke KPK, Johan melamar pada Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Tugas-tugas pelayanannya mirip dengan fungsi kehumasan, meskipun belum sampai pada nomenklatur jabatan. Beberapa tahun berjalan, ia diangkat menjadi direktur di posisi itu. Hingga, pada akhirnya di akhir 2006, ia resmi menyandang sebagai Juru Bicara KPK atas penunjukkan pimpinan KPK saat itu.

Berbekal memiliki tanggung jawab sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat juga sebagai Jubir KPK inilah, karir Johan merambah sebagai Deputy Pencegahan di KPK. Sehingga, dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun di KPK, Johan telah mengenyam banyak asam dan garam hingga harus tiap saat wajahnya muncul di televisi mewakili KPK.

Turbulensi yang sangat tinggi di internal KPK, membuat dirinya

memutuskan berhenti pada lembaga yang tumbuh besar bersama dirinya itu. Terhitung pada Januari 2016, ia meletakkan setiap jabatan yang pernah diembannya di KPK.

“Ketika saya keluar dari KPK, anak saya yang kecil itu nanya ‘kenapa ayah mundur?’. Tapi, anak saya yang *gede* bilang begini ‘kalau itu pilihan terbaik buat ayah ya silakan aja’. Kalau anak saya yang kecil memikirkan nanti ayah kerja apa?,” ungkap Johan.

Nasib baik selalu iringi orang baik. Tak lama undur diri, ia dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk menjadi staf khusus atau juru bicara presiden bidang komunikasi publik. Dari yang melakukan *assessment* terhadap



DILARANG PARKIR

Johan termasuk orang menikmati segala perjalanan, tak hanya secara filosofis namun juga lalu-lintas yang sebenarnya. Johan seringkali memilih untuk menyetir sendiri dan berjibaku dengan hiruk-pikuk jalanan bahkan hingga berkantor di Senayan. Namun, siapa sangka, di awal masa jabatannya anggota dewan ini pernah dikejar pamdal lantaran dilarang parkir.

“Saya mau parkir di gedungnya yang dekat air mancur itu. Itu kan ada parkir kan. Saya masuk lah. Ada pamdal itu. Saya mau parkir, dikejar ‘Oi gak boleh parkir disitu! Itu khusus anggota itu’ saya kaget,” ujarnya sambil menirukan ucapan petugas.

Karena merasa ditegur akhirnya Johan memutuskan untuk memindahkan kendaraannya, namun belum juga bergerak ia teringat sesuatu.

“Oh iya nggak boleh ya? Saya udah mau keluar itu. Terus saya (ingat) loh saya kan anggota DPR,” ceritanya sambil terkekeh.

Melihat mobil yang dikendarai Johan saat itu tak bergerak, sang petugas kemudian menghampirinya. Dengan tenang Johan membuka kaca dan melempar senyum yang kemudian dibalas dengan wajah kaget sang petugas. Tak lama menyadari sosok yang ditegurnya, sang petugas pun meminta maaf. Johan yang sempat bingung mengapa sang petugas bisa mengenalnya, tentu memaafkan peristiwa yang baru saja terjadi.

kinerja pemerintahan, kini ia sadari masuk ke dalam lingkaran pemerintahan itu sendiri. Terhitung, jabatan stafsus tersebut diembannya pada awal Januari 2016 hingga Oktober 2019. Ia memilih untuk mengalir saja, tanpa sedikitpun terlintas akan masuk di ranah eksekutif.

“Saya ke (stafsus) Pak Jokowi juga nggak *by design*. Kepikiran ke Pak Jokowi juga tidak. Saya kan sama Pak Jokowi juga nggak kenal,” urainya.

Namun, menjadi jubar KPK, diakuinya, berbeda dengan menjadi jubar istana. Baginya, menjadi Jubir KPK bisa menentukan banyak hal termasuk kerap kali Pimpinan KPK berdialog dengan dirinya. Namun, di lingkaran istana, gaya jubar tersebut berubah. Ia lebih memilih berbicara ke publik, setelah Presiden Jokowi bicara. Sehingga, yang disampaikan adalah murni keinginan presiden.

URUNG MUNDUR KARENA IBU

Pergulatan batin tak berhenti sampai itu. Setelah tiga tahun mengabdikan, ia merasa perlu untuk mengundurkan diri dari istana. Sayangnya, sang Ibu menolaknya. Sebabnya, Sang Ibu menilai Presiden Jokowi adalah orang baik, dan perlu didukung dengan tim yang baik..

“Nah, itu saya sampaikan ke ibu saya. Tapi, jawaban itu saya waktu itu nggak boleh (keluar dari istana). Kata ibu, tunggu sampai Pak Jokowi selesai. Pak Jokowi itu orang baik dia senang sama kamu. Sehingga saya ditarik gitu,” kenangnya menirukan pesan ibu.

Pasca dialog itu, ia urung mundur diri dari istana. Lalu, beberapa bulan sebelum pendaftaran pencalonan legislatif di Pemilu 2019, tawaran dari PDI-P masuk, Pergulatan batin pun kembali terjadi. Tersebab ibunya saat itu telah wafat, Johan berdiskusi dengan anak dan istri sebelum ambil keputusan. Bahkan, dua kali bicara dengan Presiden Jokowi, ia diminta untuk tidak mundur diri dulu dari istana karena sebab ingin maju di Pileg 2019.

“Ketika ditawari itu memang ada perdebatan di batin. Nah, anak dan

KEMEJA DAN GELAS DARI IBU

“Kamu saya beliin baju batik soalnya saya lihat kamu nggak pernah ganti bajunya” Johan menirukan seraya menerjemahkan ucapan sang ibu yang saat itu disampaikan dalam Bahasa Jawa.

Kisah dua lembar kemeja batik itu membawa Johan pada cerita beberapa tahun yang lalu saat ia masih wara-wiri di layar kaca sebagai juru bicara KPK. Menurut sang ibu, pakaian Johan terlalu sering berulang, sehingga beliau pun berinisiatif membeli beberapa helai kemeja untuk sang anak.

“Tapi saya dulu memang baju batiknya sedikit,” ungkap Johan sambil tertawa.

Anak ke 7 dari 9 bersaudara itu mengaku hingga kini ia masih menyimpan baju seharga Rp75.000 dan Rp50.000 yang dibeli sang ibu dari uang pensiunan yang diterimanya. Tak hanya itu, Johan juga menyimpan sebuah gelas kaca yang kala itu diberikan sebagai bentuk perhatian ibunya.

“Dikasih sama ibu saya. ‘Ini buat kamu banyak minum’. Perhatian banget ibu saya itu,” cerita Johan tentang gelas yang selalu ada di meja kerjanya bahkan hingga ia bertugas di istana.

istri saya ajak diskusi, tentunya karena ibu saya udah *nggak ada*. Kalau masih ada, ibu saya dulu (yang diajak diskusi),”ujarnya. .

Saat itu, Johan mengandaikan jika harus memilih antara menjadi seorang Camat atau Bupati, mana yang lebih banyak bermanfaat ke masyarakat. Sama halnya dengan menjadi Anggota DPR, banyak hal yang dapat dilakukan. “Pikiran saya di DPR tuh seperti itu. Bisa melakukan banyak hal kalau membuat undang-undang, membuat peraturan kemudian mengawasi pemerintah,” tegasnya.

Meskipun demikian, Anggota Komisi III DPR RI ini, tak menampik ada pandangan berbeda dari masyarakat terhadap dirinya saat sudah beralih menjadi politisi. Ada semacam *trust* yang kurang dibandingkan saat dirinya berada di KPK ataupun istana. Bahkan, belum melakukan hal apapun, predikat sebagai Anggota DPR itu sudah ada stigma sendiri di masyarakat. Terlepas dari kontroversi itu, ia akui juga masih banyak yang *respect* dengan kedudukan sebagai Anggota DPR.

DPR DAN PASCA 2024

Ada banyak pandangan tersendiri darinya tentang DPR. Menurut peraih penghargaan *The Golden Speaker*

dari salah satu media nasional ini, DPR perlu mengembalikan fungsi utamanya, yaitu Penganggaran, Pengawasan, dan Penyusunan Undang-Undang.

Ketiga fungsi tersebut harus diselaraskan dengan kebutuhan prioritas masyarakat (anggaran), bukan hal yang bersifat pro-kontra di masyarakat (penyusunan undang-undang), dan terus konsisten untuk mengawasi mitra kerja di masing-masing komisi terkait (pengawasan).

“Dulu kan saya di luar, sekarang kan saya pelaku. Ini kan otokritik. Saya ingin ikut melakukan itu. Bisa atau tidak, yang penting kan kita melakukan. Saya yakin yang punya suara seperti saya di DPR juga banyak,” jelasnya.

Di saat sesi wawancara akan berakhir, **Parlementaria** sempat bertanya kepada Johan Budi terkait rencananya setelah 2024. Diakuinya secara jujur, ia tak pernah merencanakan apapun karir yang dimilikinya. Ia hanya berpikir untuk bagaimana bisa berkontribusi kepada masyarakat. Selebihnya, ia tidak tahu bagaimana ke depannya.

“Yang pasti sampai hari ini bagaimana saya punya kontribusi kebaikan bersama melalui fungsi sebagai anggota DPR. Kalau 2024 ya nanti aja 2024 kamu kesini lagi *hahaha*,” ujar Johan menutupi sesi wawancara. ● rdn,uca/es

Serap Aspirasi dari Mitra Kerja di Daerah

Komisi I DPR RI melakukan tugas pengawasan terhadap kinerja mitra kerja di Bali, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan. Komisi ingin mendapatkan gambaran secara langsung terhadap kinerja mitra kerja terutamanya dalam menjalankan program-program nasional di daerah.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menyampaikan dengan adanya pandemi Covid-19, maka transformasi digital merupakan sebuah keharusan. Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, bahwa pemerintah memantapkan langkah untuk mempercepat realisasi transformasi digital pada 2024. Dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai *leading sector*-nya.

“Akselerasi pembangunan infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) diwujudkan dalam berbagai program antara lain penyediaan akses internet, pembangunan BTS, dan Palapa Ring. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan dalam rangka melihat perkembangan pembangunan infrastruktur TIK di Sumatera Selatan menuju Transformasi Digital 2024,” ungkap Bambang saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dengan BAKTI Kominfo

di Kota Palembang, Sumsel, baru-baru ini.

“Dari paparan BAKTI, bahwa sudah terlihat produktifitas yang diberikan BAKTI untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat namun harus diakui juga, di banyak sisi masih banyak kekurangan yang harus tetap disempurnakan sebagaimana saran-saran yang diberikan para anggota dewan dan dinas-dinas di Sumatera Selatan,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.

APRESIASI DETEKSI DINI BINDA BALI

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mengapresiasi atas deteksi dini dan cegah dini Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Bali terhadap rencana pelaksanaan tiga agenda internasional di beberapa waktu mendatang. Mulai dari IPU bulan Maret 2022, P20 bulan September 2022 hingga KTT G20 bulan November 2022 nanti.



Tim Kunker Komisi I DPR RI foto bersama dengan BAKTI Kominfo di Kota Palembang, Sumsel. Foto: Singgih/Man



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto saat pertemuan dengan Kepala Binda Bali beserta jajarannya di Denpasar, Bali. Foto: Agung/Man

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto menyebutkan upaya deteksi dari Binda Bali sangat penting, sebab akan menjadi rujukan kebijakan pemerintah dan para pemangku kepentingan. “Agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berlangsung dalam situasi aman, lancar serta terkendali,” kata Anton saat pertemuan dengan Kepala Binda Bali beserta jajarannya di Denpasar, Bali.

Anton pun berharap, kelancaran kegiatan internasional di Bali nanti akan dapat meningkatkan prospek dan nilai tambah Indonesia dalam kancah dunia internasional. “Maka kami mendorong Binda Bali untuk terus berkoordinasi dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan deteksi dini terhadap situasi dan kondisi bali,” kata politisi Partai Demokrat itu.

KUNJUNGI KODAM XIV/ HASANUDDIN

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Haris Almasyhari mengutarakan

bahwa Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kodam XIV/Hasanuddin untuk mengetahui dari dekat dan secara langsung seperti apa kesiapan Kodam XIV/Hasanuddin dalam menjaga keamanan dan pertahanan NKRI di wilayahnya yang terdiri dari

3 Provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara.

Dalam kunjungan tersebut, Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI menggelar pertemuan dengan Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Andi Muhammad ini berlangsung di ruang Bina Yudha Makodam, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan.

“Kami sudah mendapat gambaran dari Pangdam, termasuk juga ingin melihat dari jarak dekat dan jelas seperti apa vaksinasi yang dilakukan disini dan saya mengapresiasi langkah Kodam XIV/Hasanuddin dalam mengelola keamanan wilayah territorial,” ujar Haris.

Terkait permohonan Pangdam untuk mendapatkan lahan Batalyon Arhanud 4/AAY, Komisi I DPR RI akan berupaya membantu ketika dilaksanakan rapat di Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan dan Kementerian terkait untuk segera diselesaikan .

“Salah satu yang disampaikan Pangdam adalah berkaitan dengan permohonan untuk mendapatkan lahan Batalyon Arhanud 4, yang sampai sekarang masih dalam proses, mudah-mudahan kami bisa bantu untuk segera diselesaikan, ketika rapat nanti di Komisi I DPR RI, kami dengan Kepala Staf Panglima juga Menhan dan kementerian terkait lainnya, sehingga markasnya ada,” ujarnya. ● skr,ah,ran/es



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi I dengan Kodam XIV/Hasanuddin. Foto: Rizka/Man

Evaluasi Kinerja Pemda, Seleksi ASN, dan Program Pertanahan

Komisi II DPR RI pada Masa Reses Februari lalu melakukan kunjungan ke tiga daerah yaitu Batam, Samarinda, dan Lampung Utara dengan fokus pengawasan terkait kinerja Pemerintah Daerah, Evaluasi seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masalah pertanahan.



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kota Batam. Foto: Ridwan/Men

Komisi II DPR RI melakukan Kunker Reses ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang dipimpin oleh Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Kunjungan ini menitikberatkan perhatian pada empat topik utama, yaitu, pertama, penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Batam di masa pandemi Covid-19.

Kedua, Program KTP-Elektronik. Yaitu bagaimana hasil evaluasi dan perkembangan dari program ini di wilayah Kota Batam. Termasuk berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Batam dalam pelaksanaan program ini.

“Ketiga, evaluasi terhadap proses Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2021. Yaitu, berkaitan dengan koordinasi dilakukan oleh pemerintah daerah dengan Kantor Regional Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan

instansi terkait lainnya. Serta hal-hal yang perlu menjadi perhatian sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan seleksi CPNS di masa yang akan datang,” jelas politisi Partai Golkar ini.

Terakhir, hal-hal yang berkaitan dengan isu tata ruang di wilayah Kota Batam. Terutama kendala yang dihadapi dalam hal menyinkronkan penyusunan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang wilayah provinsi maupun nasional.

PELAYANAN PUBLIK HARUS TERJAMIN

Di Samarinda, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menyoroti masalah pelayanan publik di masa pandemi Covid-19. Ia menekankan bahwa proses reformasi birokrasi harus tetap dijaga dan dipastikan keberlangsungannya.

“Kami juga ingin mendengar evaluasi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021. Sejauh mana prosesnya berjalan dan apa saja yang menjadi kendalanya,” imbuh Luqman saat memimpin pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili Pj. Sekda Kaltim didampingi Kepala BKD Kaltim, Kepala Ombudsman Kaltim, dan Kakanwil BPN Provinsi Kaltim di Ruang Rapat Tepian I, Kantor Gubernur Kaltim beberapa waktu lalu.

Wakil rakyat dapil Jawa Tengah VI ini juga menyinggung mengenai penyelesaian kasus beberapa sengketa pertanahan di Kaltim yang masih menggantung sampai hari ini. Ke depan Luqman berharap penyelesaian ganti rugi atau ganti untung sebagian tanah milik rakyat di ruas Tol Samarinda-Balikpapan yang belum selesai dapat segera diselesaikan.

Sementara itu Penjabat (PJ) Sekda Kaltim Riza Indra Riadi mengungkapkan dengan adanya kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kaltim sangatlah penting, guna menjadi



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Iuqman Hakim bertukar cendera mata dengan Pj Sekda Kaltim. Foto: Ridwan/Man

pijakan peraturan di daerah khususnya bagi penyelenggaraan pemilu dalam melaksanakan keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022.

SEGERA BAYARKAN GANTI RUGI TANAH MASYARAKAT!

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengimbau pada pemerintah

untuk segera membayarkan uang ganti rugi kepada masyarakat Way Abung dalam kurun waktu sesegera mungkin.

Hal tersebut terungkap saat Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti hasil RDPU beberapa bulan lalu dengan masyarakat Desa Way Abung, Lampung

Utara, menyangkut ganti rugi tanah mereka sebanyak 25.000 hektar yang selama ini belum juga diselesaikan pemerintah.

“Dengan semua dokumen yang ada, pemerintah harus memberikan hak rakyat dengan membayarkan ganti rugi lebih kurang Rp125 miliar kepada masyarakat Way Abung. Kami juga sudah komunikasi dengan Bupati Lampung Utara, dengan Forkopimda termasuk juga Gubernur Lampung untuk sama-sama mengawal agar pembayaran masyarakat itu bisa segera direalisasi,” tandas politisi PDI Perjuangan ini usai menghadiri pertemuan dengan Bupati Lampung Utara Budi Utomo.

“Kita akan membawa aspirasi ini pada rapat kerja dengan kementerian terkait, kita akan melakukan rapat pleno dengan Anggota di Komisi II. Kita akan bersurat kepada Kementerian Keuangan, Kemendagri dan Kementerian ATR/BPN dalam rangka menyikapi temuan-temuan kita di Lampung Utara,” pungkas Junimart selaku Legislator dapil Sumatera Utara III ini. ● oji,rdn,mri/es



Tim Kunker Komisi II DPR RI foto bersama dengan Bupati Lampung Utara Budi Utomo. Foto: Oji/Prima

Apresiasi Mitra Kerja dalam Penanganan Pandemi

Komisi III DPR RI melakukan fungsi pengawasan terhadap mitra kerjanya di beberapa daerah. Adapun yang menjadi topik pengawasan diantaranya perkembangan vaksinasi yang diinisiasi oleh mitra kerjanya serta menyoroti peredaran narkoba di Lapas.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengapresiasi peran kepolisian

dalam pencegahan penularan Covid-19 di Kalimantan Tengah yang saat ini mengalami lonjakan kasus. Desmond mengimbau warga Kalteng juga harus berani untuk divaksin dosis I, II, termasuk vaksin dosis III atau *booster*.

“Peran polisi di Kalimantan Tengah sangat luar biasa, hanya tinggal kepatuhan dari warga saja yang perlu ditingkatkan. Jangan lupa juga vaksin *booster* bagi warga yang sudah melakukan vaksin dosis II dengan rentang waktu 6 bulan,” ujar Desmond saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Polda Kalteng, di Palangka Raya, baru-baru ini.

Politisi Partai Gerindra itu menilai edukasi dan sosialisasi harus selalu diberikan pada masyarakat. Edukasi mengenai vaksin, tak hanya pemerintah tapi berbagai pihak harus mengedukasi sesama. Serta hal mendasar seperti penggunaan masker dan mencuci tangan. “Penerapan protokol



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa saat pertemuan Tim Kunker Komisi III di Polda Kalteng, di Palangka Raya. Foto: Eno/Man

kesehatan (prokes) 3M dan Operasi Yustisi pun harus terus dilakukan dan disosialisasikan pada masyarakat,” pesan Desmond.

Sementara itu Kapolda Kalteng Irjen Pol Nanang Avianto mengatakan, Operasi Yustisi dilakukan dengan patroli dan pembagian 2.500 masker pada masyarakat. Selain tempat hiburan malam (THM), kafe, dan tempat ramai lainnya. Bahkan saat patroli juga menyisir kawasan Sanaman Mantikei, Palangka Raya.

Kapolda Kalteng menambahkan, para personel gabungan Operasi Yustisi juga melakukan sosialisasi pada waria. “Personel turut bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat Kalteng, jika masyarakat sehat makan roda perekonomian pun akan berjalan,” tutup Nanang.

APRESIASI VAKSINASI BAGI WARGA BINAAN

Anggota Komisi III DPR RI Romo H.R. Muhammad Syafi'i mengapresiasi sinergi antara Kepolisian Daerah (Polda)

Sumatera Utara dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sumut dalam menyelenggarakan proses percepatan vaksinasi Covid-19 bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tanjung Gusta Medan, Sumut.

“Saya kira cukup puas dengan pelaksanaan vaksinasi ini. Kita berharap (percepatan vaksinasi) ini mampu memberi imunitas kepada warga binaan,” ujar Romo saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI meninjau Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, di Medan, Sumut.

Politisi Partai Gerindra ini juga berharap ketegasan dari pimpinan lapas terhadap satuan kerjanya mengenai pelaksanaan protokol kesehatan di dalam lapas. “Tentu saja ketegasan dari pimpinan, untuk siapapun yang datang (ke dalam lapas) itu harus sudah lolos swab, supaya tidak mencemari warga yang ada di lapas maupun di rutan,” tandas



Anggota Komisi III DPR RI Romo H.R. Muhammad Syafi'i saat meninjau vaksinasi di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, Sumut. Foto: Prima/Man

legislator daerah pemilihan (dapil) Sumut I tersebut.

Vaksinasi yang dilaksanakan di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan ini ditargetkan menasar kepada 500 warga binaan, dengan dosis yang diberikan, baik itu dosis pertama, kedua maupun *booster*.

SOROTI PEREDARAN NARKOBA DI LAPAS

Sementara itu dari Kalimantan Utara Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi menyoroti peredaran narkoba yang cukup besar di Lembaga

Pemasyarakatan (Lapas) Kalimantan Utara. Andi Rio mendapat informasi dari BNN, peredaran narkoba di Lapas Kaltara ini sudah berlangsung lama. Menurutnya ini menjadi persoalan *klise* yang terus terjadi di lapas.

"Saya kurang mengerti dari laporan Pak Kakanwil yang mengatakan beliau sudah bekerja keras melakukan pelarangan penggunaan handphone di lapas untuk meminimalisir interaksi perdagangan narkoba yang diatur dari dalam lapas, tapi ya tetep aja hal ini terus berulang," kata Andi Rio saat pertemuan Tim Kunker Komisi III DPR

RI dengan Kakanwil Kemenkumham Kaltara di Tarakan.

Politisi Partai Golkar itu pun menyarankan kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Kaltara untuk memindahkan narapidana kasus narkoba yang mendapatkan hukuman berat untuk dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

"Apa yang menjadi momok di sini, terjadinya bisnis di dalam lapas akibat masih adanya orang-orang yang menggerakkan bisnis narkoba dari dalam lapas. jika hal ini terus berulang dan narapidana terkait perdagangan narkoba sebaiknya dipindah ke Nusakambangan," tegas Andi Rio.

"Kata Kakanwil, persoalan biaya menjadi hambatan untuk memindahkan narapidana ke Nusakambangan, di sini tugas kami dari Komisi III menyampaikan kepada mitra dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM bahwa ada persoalan ini di lapangan. Dan ini juga tugas kami untuk memberikan anggaran, tugas kita Komisi III DPR RI ini untuk *men-support* semua yang dibutuhkan mitra Komisi III DPR RI demi berjalanya kegiatan penegakan hukum yang ada di Indonesia," sambung legislator dapil Sulawesi Selatan II tersebut. ● man,eno,pdt/es



Tim Kunker Komisi III DPR RI foto bersama dengan mitra kerja di Kaltara. Foto: Andri/Man

Serap Aspirasi SKIPM Pekanbaru

Dalam rangka menyerap aspirasi di masa reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke 3 (Tiga) Provinsi berbeda, yaitu Riau, Sumut dan Sulawesi Selatan dengan fokus menyerap aspirasi sejumlah *stakeholder* mitra kerja di daerah.



Anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro (tengah) saat mengikuti Kunker Komisi IV DPR RI meninjau SKIPM Pekanbaru, Riau. Foto: Jaka/Man

Anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro mengatakan, setidaknya ada dua aspirasi yang mengemuka saat Komisi IV DPR RI meninjau SKIPM Pekanbaru. Yakni terkait sarana dan prasarana Stasiun Karantina Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) dan kenaikan jenjang eselon.

“Saya sangat terkejut, Kepala SKIPM yang menguasai laut seluas ini hanya setara dengan eselon IV. Saya pernah menjadi Dirjen di Kementerian Kehutanan, Kepala Balai yang mengurus gajah dan harimau saja eselon II. Ini yang perlu

kita perjuangkan, bahkan sebetulnya sudah berulang kali kami sampaikan pada rapat dengan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) periode yang lalu,” ujar Darori.

Selain itu, politisi Partai Gerindra ini menyatakan, pihaknya mendapat aspirasi juga terkait fasilitas alat laboratorium pendeteksi virus untuk pengiriman ikan maupun biota air lainnya. Alat yang ada saat ini ternyata belum canggih dan masih manual, sehingga butuh waktu lama untuk mendeteksinya.

“Mestinya ke depan beli lah mesin yang sudah otomatis, yang sudah modern walaupun harganya

lebih mahal tapi itu penting. Dapat mempercepat proses pemeriksaan barang yang akan dikirim, baik kedalam maupun luar negeri,” pungkas Darori.

Darori mengatakan, Komisi IV DPR RI akan mendorong anggaran KKP yang saat ini dinilai cukup minim. Imbasnya, pengawasan menjadi sulit, apalagi Riau berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia.

“Kalau anggarannya kurang pasti pengawasannya juga kurang, potensi kebobolannya tinggi. Kalau jabatan di SKIPM eselonnya dinaikkan, pegawainya juga pasti naik, semakin banyak pengawas di pantai-pantai lebih bagus. Tolonglah pihak-pihak yang berwenang seperti KemenPAN-RB dan KKP ini diperhatikan betul, paling tidak unit-unit di daerah ini disejajarkanlah seperti di KLHK atau Kementerian Pertanian,” tutup Darori.

SOROTI DUALISME PENGELOLAAN PPS BELAWAN

Komisi IV DPR RI berharap dualisme pengelola Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan di Sumatera Utara dapat segera terselesaikan. Pasalnya, hal itu menjadi penyebab utama dari berbagai permasalahan yang ada pelabuhan terbesar kedua di Sumut, setelah pelabuhan perikanan Muara Baru itu.

“Hari ini, secara resmi kami mendapat informasi adanya dualisme pengelolaan Pelabuhan Perikanan Belawan ini, yakni antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PT Perindo. Ini harus segera diselesaikan, agar tidak ada saling lempar tanggung jawab dan pada akhirnya saling mencari kambing hitam atas berbagai permasalahan yang ada di pelabuhan tersebut,” papar Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Syaiful Hidayat saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi IV



Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Syaiful Hidayat saat pertemuan dengan pengelola PPS Belawan, Sumut. Foto: Ayu/Man

DPR RI ke PPS Belawan, Sumut.

Sebagaimana diakui baik KKP dan berbagai organisasi nelayan yang hadir, bahwa PPS Belawan saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Dimana infrastruktur yang rusak, becek dan minimnya berbagai fasilitas lain yang seharusnya dimiliki oleh pelabuhan perikanan besar. Seperti masih kurangnya panjang dermaga, belum adanya pabrik es dan kurangnya *cold storage*.

“Karena ini merupakan pelabuhan perikanan, menurut saya lebih baik ada di bawah pengelolaan KKP. Dengan begitu, nantinya KKP lah yang bertugas untuk melakukan perbaikan berbagai infrastruktur, seperti jalan, penambahan panjang dermaga dan lainnya. Termasuk penyediaan berbagai fasilitas di PPS tersebut. Seperti pembangunan pabrik es dan cold storage, dan lain sebagainya,” tambah politisi PDI-Perjuangan ini.

GANDENG BULOG ATASI KELANGKAAN MINYAK GORENG

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah melibatkan Bulog untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng dan melambungnya harga kedelai. Menurut dia, Bulog tetap harus diberi peran

dalam rangka menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan komoditas pangan.

Akmal menjelaskan, Bulog dapat melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga di pasaran serta mengantisipasi kelangkaan. “Kalau mereka (swasta) menyimpan atau menimbun kita nggak tahu. Jadi, negara tidak punya instrumen untuk mengendalikan distribusi dan pasokan barang-barang kebutuhan pokok warga kita,” kata Andi Akmal usai mengikuti Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau Bulog

Divre Sulselbar di Makassar, Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, peranan Bulog menjadi *buffer stock* juga perlu diperkuat melalui dukungan anggaran. Sehingga, fungsi Bulog untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan dan juga kestabilan harga bisa terlaksana dengan baik.

“Misalnya, kalau harga jatuh kan dia (Bulog) bisa beli produk petani. Kalau harga melambung dia (Bulog) bisa operasi pasar melepas, sehingga harga bisa terkendali. Ini yang tidak bisa dilakukan karena Bulog terbebani dengan utang komersil. Jadi fungsi Bulog tidak bisa dikatakan berjalan dengan baik,” terang Akmal.

Akmal menuturkan, meski kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) telah diberlakukan sejak awal Februari namun ia menilai penerapan DMO agak terlambat.

“DMO ini terlambat diterapkan sebenarnya, tiga bulan lalu kita sudah ingatkan tidak boleh ekspor kalau kebutuhan dalam negeri memang tidak tercukupi. Kedua, kita juga berharap satgas pangan bisa lebih cekatan dalam mencari distributor yang nakal dan menimbun sehingga menyebabkan harga naik dan langka,” pungkasnya. ● [jk,ayu,ann/es](#)



Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin saat pertemuan Tim Kunker Komisi IV dengan Bulog Divre Sulselbar di Makassar, Sulawesi Selatan. Foto: Anne/Man

Tinjau Proyek Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI melakukan peninjauan dalam rangka fungsi pengawasan terhadap program pembangunan infrastruktur dan transportasi di sejumlah daerah diantaranya Jawa Timur dan Bali.

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhamad Arwani Thomafi meninjau

sejumlah proyek pembangunan di Jawa Timur. Di antaranya Proyek pembangunan Jembatan Ploso di Kabupaten Jombang, proyek pembangunan *Long Storage* Kalimati, Kabupaten Sidoarjo dan proyek pembangunan Bandara Kediri di Kabupaten Kediri.

Selain melakukan peninjauan, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI Jawa Timur juga melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala daerah diantaranya Bupati Jombang dan Bupati Sidoarjo serta sejumlah mitra kerja dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDTT, Basarnas hingga BMKG setempat.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhamad Arwani Thomafi mengatakan, Kabupaten Jombang memiliki posisi

strategis sebagai perlintasan antara jalur utara dengan selatan di Jawa Timur. Hal ini tentu membutuhkan satu perencanaan ataupun juga skema pembangunan infrastruktur yang baik dan strategis.

“Untuk memberikan pelayanan kepada publik yang lebih baik, baik dari sisi pelayanan di bidang transportasi dan termasuk juga pelayanan di bidang infrastruktur yang lainnya, Pemerintah Kabupaten Jombang perlu merespon beberapa kebutuhan yang nantinya dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah pusat,” ungkap Arwani saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dengan Bupati Jombang, di Pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Saat meninjau proyek pembangunan Jembatan Ploso di Kabupaten



Foto bersama Tim Kunker Komisi V DPR RI dengan mitra kerja pelaksana pembangunan infrastruktur. Foto: Dipa/Man

Jombang, Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati mengatakan keterlibatan yang baik antara daerah dan *stakeholder*, berimbas pada percepatan pembangunan di Jombang.

“Kita bisa lihat jembatan Ploso di Jalan Arteri ini, memang semula sempit sekali. Namun, sekarang kami melihat sudah dikerjakan dengan baik oleh seluruh *stakeholder*, termasuk dari kepolisian yang turut mengatur laju arus kendaraan. Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten Jombang juga sangat proaktif untuk bisa turut serta memberikan dukungan, agar pembangunan segera terselesaikannya,” tutur Estu, sapaan akrabnya.

Kemudian, terkait pembangunan pembangunan yang dilakukan di Bandara Kediri, apresiasi juga datang dari Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu mengapresiasi. Namun, Yayuk, sapaan akrabnya mengatakan meski menyambut baik proyek tersebut namun ia tetap berupaya memastikan pelaksanaan proyek pembangunan bandara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menyusul adanya efek negatif dari proyek pembangunan tersebut yaitu menyebabkan banjir di kawasan sekitar.

“Perlu diperhatikan efek samping dari pembangunan bandara ini. Dikarenakan banyak laporan yang masuk terkait banjir yang melanda kawasan sekitar. Saya minta tanggung jawab kepada (Ditjen) Sumber Daya Air dari (Kementerian) PUPR untuk menambah dua sungai besar sehingga tidak menyebabkan banjir lagi,” pungkas Yayuk.

APRESIASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI BALI

Sementara itu, di Bali Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae meninjau proyek pembangunan infrastruktur terkait persiapan penyelenggaraan Presidensi G-20 di Bali yang rencananya akan berlangsung bulan November mendatang.



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae memimpin Tim Kunker Komisi V meninjau infrastruktur transportasi udara di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Foto: Rizki/Man

Komisi V DPR RI mengunjungi sejumlah infrastruktur yang nantinya akan menjadi penunjang persiapan penyelenggaraan presidensi G-20 diantaranya Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan proyek rehabilitasi dan proyek penataan kawasan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai

Ridwan mengapresiasi sejumlah hal terkait persiapan penyelenggaraan presidensi G-20 diantaranya kesiapan infrastruktur penerbangan, pelayanan pengguna dan tamu VVIP, serta penerapan protokol kesehatan di bandara. Ia mengingatkan, persiapan infrastruktur untuk menyambut sejumlah Kepala Negara Anggota G20 dan tamu VVIP dari seluruh negara yang akan hadir.

Di sisi lain, Ridwan juga mengapresiasi terhadap proyek rehabilitasi di Kawasan Waduk Muara Nusa Dua. Ia menilai proyek yang dilakukan di waduk muara pertama di Indonesia tersebut telah terlaksana dengan baik, hal itu terlihat dari fungsi waduk yang kini telah kembali dimanfaatkan sebagai salah satu sumber air baku masyarakat.

“Saya kira ini indah sekali ya waduk ini. Bahkan saya lihat sudah dimanfaatkan untuk kebutuhan air buat masyarakat,” ungkap Ridwan

usai meninjau Kawasan Waduk Muara Nusa Dua.

Ridwan mengingatkan, persiapan infrastruktur untuk menyambut sejumlah Kepala Negara Anggota G20 dan tamu VVIP dari seluruh negara yang akan hadir di Pulau Dewata dalam forum internasional tersebut membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. “Sebagai ajang pertemuan tingkat tinggi pemerintahan dari berbagai negara, tentunya membutuhkan perhatian serius dari Negara penyelenggara, yang kali ini adalah Indonesia,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Selain itu, Ridwan Bae menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyukseskan puncak acara Presidensi G20 2022 di Indonesia. “Tentu dari kita komisi V memberikan dukungan yang maksimal,” tuturnya.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tenggara itu juga mengatakan Komisi V DPR RI berharap seluruh proyek terkait dapat segera selesai sebelum acara puncak Presidensi G20 di Bali, digelar November mendatang. “Tentunya kita harapkan sebelum november 2022 dimana acara puncak G20 akan diadakan di situ maka itu sudah selesai,” pungkasnya. ● rr,dip/es

Beri Atensi Pada Persoalan Kredit dan Sistem Resi Gudang

Maraknya kasus pinjol di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung. Sulitnya masyarakat mendapat akses kredit dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi alasan masyarakat untuk melakukan pinjol yang kebanyakan merupakan platform kredit ilegal dengan suku bunga yang tinggi.

Persoalan tersebut menurutnya harus menjadi perhatian himbara. Martin menekankan, dalam hal ini, himbara seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. untuk membuat dan memiliki produk pinjaman yang *accessible*, lebih murah, mudah dan cepat agar masyarakat di Sulsel khususnya bisa mendapatkan pinjaman uang dengan mudah sehingga tidak terjerat pinjol.

BNI dan himbara lainnya diminta lebih baik dalam melakukan fungsinya sebagai korporasi. "Terutama dalam pengembangan ekonomi di kawasan Indonesia Timur ini. Kita menyoroti peran BNI dalam melakukan edukasi untuk literasi keuangan karena kita mendapati di Sulawesi Selatan ini banyak juga kasus terkait pinjol. Jadi itu termasuk salah satu peran yang harus dilakukan oleh BNI, mungkin juga harus bersama-sama dengan Himbara lainnya seperti BRI, harus bisa memiliki produk-produk (untuk pinjaman) yang lebih murah, mudah dijangkau oleh masyarakat," ujar Martin di Makassar, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti A.N. Anam pun meminta BNI untuk mempermudah akses kredit kepada masyarakat yang memerlukan pinjaman uang sebagai kebutuhan hidup maupun usaha.

"Banyak masyarakat di daerah sekarang ini terjerat pinjol. Kita tahu



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Foto: Novel/Man

suku bunga KUR BNI (sebesar) 6 persen iya, sangat murah tapi kalau susah untuk apa? Apa strategi BNI dalam mensiasati bagaimana rakyat bisa mengakses kredit seluas-luasnya? Dan harapan kami masyarakat yang perlu (uang) Rp2-3 juta untuk dapat dikasih. Jangan sepelekan rakyat kecil, mereka perlu dibantu, perlu didorong bagaimana

mendapatkan kredit murah tapi dapat aksesnya mudah," tandasnya.

SISTEM RESI GUDANG BELUM MAKSIMAL

Tak hanya persoalan akses kredit, pada kunjungan lainnya yang dilakukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Komisi VI DPR juga menyoroti

persoalan tidak maksimalnya pemanfaatan sistem resi gudang (SRG). Hal itu pun menjadikan sistem tersebut tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya.

Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Hanteru Sitorus mencermati Pemerintah kurang memberi atensi terhadap SRG, sistem tersebut masih dipandang sebelah mata oleh semua *stakeholder*, terutama pemerintah daerah dan juga



Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus.
Foto: Fitri/Man

kementerian yang harusnya terlibat dalam regulasi seperti Kementerian Dalam Negeri.

“Sehingga saat ini, baru sekitar 160 gudang yang dimiliki di seluruh Indonesia, padahal kita punya 496 Kabupaten/Kota,” kata Deddy di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Sucofindo (persero), Dirut Perum Bulog dan sejumlah *stakeholder* lainnya.

Politisi PDI-Perjuangan itu menuturkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan SRG selama ini belum maksimal. Ia berpandangan hal itu karena kompleksitas dari SRG itu sendiri. “Katakanlah dengan berbagai kementerian dan lembaga juga dengan

dunia perbankan, pengelolaan swasta, ini kan semua ekosistemnya belum terbentuk dengan baik,” imbuh legislator dari Kalimantan Utara itu.

Dalam hal ini, dia pun mendorong agar regulasi-regulasi yang berkaitan dengan SRG dilakukan perbaikan. “Juga termasuk bagaimana mendorong pemerintah daerah itu benar-benar serius dalam mendorong tumbuhnya gudang-gudang tempat menyimpan komoditas. Lalu bagaimana juga perbankan atau jasa keuangan yang bisa menumpang daripada resi gudang ini, lalu kemudian bagaimana mitra-mitra yang mau bekerjasama membangun atau mengelola gudang,” pungkasnya.

SRG SEBAGAI JAWABAN ATAS PERSOALAN PANGAN

Masih dalam kunjungan yang sama, Komisi VI DPR menilai SRG memiliki begitu banyak manfaat yang bisa dirasakan masyarakat apabila benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal. Tak hanya di sektor pertanian, SRG juga memiliki manfaat positif disektor perbankan dan pangan. Sehingga, menurut Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuariana akan sangat disayangkan apabila SRG hanya dipandang sebelah mata dan tidak benar-benar dimanfaatkan secara maksimal.

Menurutnya, SRG adalah instrumen yang memberdayakan petani dimana komoditi yang dihasilkan mampu memberikan nilai ekonomis. “Resi gudang ini menawarkan banyak manfaat bagi petani sendiri, dunia usaha, perbankan dan bagi pemerintah. Manfaatnya adalah keterkendalian dan kestabilan harga komoditi, melalui fasilitas penjualan sepanjang tahun lalu keterjaminan modal produksi, lalu keeluasaan penyaluran kredit bagi perbankan nasional, serta keterjaminan produktivitas,” kata Nevi di sela-sela kunjungannya.

Untuk diketahui, di tahun 2022 transaksi penerbitan resi gudang

diproyeksikan akan terus meningkat dan mencapai angka lebih dari Rp600 miliar didukung oleh semakin meluasnya daerah pelaksanaan SRG dan semakin bertambahnya jenis komoditas yang diterbitkan oleh sistem tersebut.

Khusus untuk wilayah Kalimantan Selatan, pelaksanaan SRG telah berjalan sejak tahun 2010, berawal dari Kabupaten Barito Kuala kemudian meluas ke Kabupaten Tapin. Saat ini terdapat 4 gudang SRG terdiri dari 2 gudang di Barito Kuala dan 2 Gudang di Tapin, tidak hanya di gudang milik pemerintah daerah, namun juga gudang milik swasta.

Melihat hal itu, Nevi pun menilai SRG sebagai salah satu upaya menjawab ketahanan pangan nasional yang



Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuariana. Foto: Fitri/Man

selama ini, beberapa komoditas seperti kedelai masih dikuasai oleh impor. Sehingga diharapkan, melalui sistem tersebut kebermanfaatn SRG dapat “Bermuara pada meningkatnya daya saing mereka (petani, kelompok tani, koperasi, UMKM) di perekonomian nasional dan lebih jauh lagi di pasar dunia,” tutupnya. ● srw,nvl/es

Soroti Kebijakan Sektor Industri dan EBT

Revitalisasi industri gula nasional merupakan program besar dan kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan strategis yang dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif di tanah air.



Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat meninjau operasional pabrik gula di Lamongan, Jatim. Foto: Ariel/Man

“Guna mencapai sasaran iklim investasi yang kondusif, perlu adanya fasilitas memperoleh bahan baku dalam rangka pembangunan pabrik gula baru maupun perluasan,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin dialog Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI, Kadis Perindustrian Jawa Timur, Bupati Lamongan serta direksi PT Kebun Tebu Mas (KTM), di Lamongan, Jatim.

Komisi VII DPR RI berkesempatan meninjau langsung operasional pabrik gula Kebun Tebu Mas. Komisi VII berharap memperoleh informasi yang komprehensif terkait kondisi terkini industri gula, kendala yang dihadapi oleh pabrik gula dalam upaya peningkatan produksi gula serta dukungan yang diperlukan dalam melakukan akselerasi revitalisasi pabrik gula.

Di tempat yang sama, Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengungkapkan, revitalisasi industri gula sangat diperlukan, mengingat

kebutuhan gula yang terus meningkat. Secara nasional, pada tahun 2016 produksi gula kristal putih (GKP) hampir mencapai 2,5 juta, sementara 2021 terus turun menjadi 2,35 juta ton GKP, sementara kebutuhan terus meningkat. “Tahun 2021-2022 perkiraan kebutuhan gula kristal sebanyak 2,8 sampai 3 juta ton, ini masih ada kekurangan sekitar 400-700 GKP per tahun,” kata Putu Juli Ardika.

Selain Dirjen industri agro, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi juga mengungkapkan, hubungan antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan PT KTM berjalan dengan baik. “Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Lamongan didominasi oleh sektor pertanian, termasuk di dalamnya agroindustri, sehingga *support* dan dukungan terhadap industri ini harus senantiasa dilakukan,” pungkas Bupati Lamongan.

DORONG INDUSTRI PEMBERDAYAAN UMKM INDONESIA

Mengetahui potensi besar peran industri tepung terigu di Indonesia, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman berharap industri tepung terigu berkontribusi terhadap pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya, sebagian besar UMKM, yang bergerak di sektor makanan, tengah menghadapi krisis di masa pandemi Covid-19. “Keberadaan industri tepung ini telah memberikan pemasukan negara yang besar. Kami mendorong industri tepung juga ikut memberdayakan UMKM, mulai dari peningkatan kualitas produk, marketing, dan juga mungkin bantuan modal,” tutur Maman usai memimpin Kunjungan



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi VII DPR RI ke PT Indofood-Divisi Bogasari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Foto: Saum/Man

Kerja Komisi VII DPR RI ke PT Indofood-Divisi Bogasari, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Politisi Partai Golkar itu menilai peran industri dalam memberdayakan UMKM akan turut membuka lapangan kerja di tingkat daerah. Bergerak di bidang yang sama, industri dapat bahu-membahu mengedukasi UMKM untuk fokus mengolah potensi daerah, terutama di bidang kuliner.

Di sisi lain, ia pun mendorong Kementerian Perindustrian untuk menyederhanakan tahapan sertifikasi UMKM sekaligus distribusi produk. Dengan membangun koordinasi lintas kementerian, seperti BPOM, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian bisa membangun iklim bisnis yang membuka peluang UMKM untuk memperoleh pangsa besar, baik nasional maupun internasional.

"UMKM di negara kita (jumlahnya) besar sekali. Ternyata di tengah pandemi, *buffer zone* yang mengamankan masyarakat agar tidak terlalu jatuh dan terjerembab adalah UMKM. Kita mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan. Namun, negara dan industri harus terus memacu dan ditingkatkan kembali (pemberdayaan UMKM)," tandasnya.

PERTAMINA HARUS PERHATIKAN EBT

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menjelaskan, di era sekarang menuju target netral karbon, banyak perusahaan global berlomba-lomba untuk mengembangkan portofolionya ke arah energi baru dan terbarukan (EBT). Dalam hal ini, PT Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) III Plaju dipercaya pemerintah untuk mengembangkan bahan bakar nabati berbasis *Crude Palm Oil* (CPO) yang merupakan bahan bakar lebih ramah lingkungan melalui *Project Green Refinery*.

"Pengembangan ini bertujuan untuk mendukung bauran energi nasional dan target kemandirian energi nasional dengan memperluas penggunaan energi terbarukan yang berkelanjutan," jelas Eddy saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dalam rangka pengawasan kinerja mitra Komisi VII, terkait kinerja Pertamina RU III Plaju dan perkembangan proyek *Green Refinery* sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, di Kantor Pertamina RU III Plaju, Palembang, Sumatera Selatan.

Politisi Fraksi PAN ini berharap Pertamina RU III Plaju bisa mengoptimalkan produksi dengan mengikuti perkembangan terkini serta

memperhatikan penggunaan energi terbarukan. "Walaupun sudah dibangun sejak tahun 1904, diharapkan Pertamina RU III Plaju terus menunjukkan eksistensinya melalui bermacam inovasi dan pengembangan teknologi demi mencapai optimalisasi produksi dan keunggulan operasional dengan mengikuti perkembangan terkini," papar Eddy.

PT Pertamina RU III Plaju merupakan kilang tertua di Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai salah satu tiang ketahanan energi nasional. Komisi VII berharap dengan kunjungan ini bisa menciptakan peningkatan sinergi antara Komisi VII dengan para mitra kerja dalam rangka menjalankan tugas-tugas konstitusional. Kunjungan pengawasan ini sesuai amanat UUD 1945.



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno. Foto: Eko/Man

Dalam kesempatan ini Komisi VII juga menggali informasi terkait dengan profil dan kinerja Pertamina RU III Plaju, serta perkembangan proyek *Green Refinery* sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional. Permasalahan yang dihadapi dan dukungan yang diharapkan oleh para mitra kerja, mengingat salah satu fungsi *additional* dari Komisi VII adalah fungsi *problem solving*. • afr,eko,ts/es

Tinjau Pencairan Program Bansos

Komisi VIII DPR RI mengirimkan tiga tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara, dan Sumatera Utara guna menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitra kerjanya.

Di Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII TB Ace Hasan Syadzily melihat secara langsung pencairan dan penyaluran program-program bantuan sosial dari Kementerian Sosial untuk masyarakat Manggarai Barat

Adapun sejumlah program-program tersebut adalah Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 16.142 KPM senilai Rp15.030.900.000; Bantuan ATENSI untuk anak yatim untuk 13 orang senilai Rp11.300.000, bantuan aksesibilitas untuk 18 orang senilai Rp43.800.000, bantuan kebutuhan dasar ODGJ untuk 11 orang senilai Rp5.500.000; dan Bantuan

Sosial Program Sembako tahun 2022 periode Januari-Maret untuk 13.258 KPM senilai Rp7.954.800.000.

“Komisi VIII DPR RI Melihat secara langsung bagaimana program dari Kementerian Sosial yang dialokasikan untuk Kabupaten Manggarai Barat. Ada banyak program-program bantuan sosial dari Kementerian Sosial, misalnya ada Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) sebagai bentuk perhatian pemerintah bagi masyarakat yang terkena pandemi Covid-19,” kata Ace sesuai melakukan penyaluran bantuan sosial, di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT.

Ace mengatakan, Komisi VIII DPR selalu mendukung program bansos, terutama Program ATENSI, dimana

dana tersebut diperuntukkan kepada anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, Ace menekankan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar selalu melakukan pemuktahiran data-data penerima bantuan kepada Kementerian Sosial. Sehingga bantuan-bantuan sosial tersebut betul-betul sampai dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya.

“Kami juga mendorong kepada pemerintah daerah agar proses pemuktahiran data dilakukan secara update kepada Kementerian Sosial supaya nanti jangan sampai ada kesalahan data,” pesan politisi Partai Golkar tersebut.

SOROTI BIAYA HAJI TAHUN 2022

Anggota Komisi VIII DPR RI Wastam menyoroti mahalannya biaya haji yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 ini yang berpotensi akan memberatkan para calon jemaah haji. Dibandingkan dengan biaya haji pada tahun-tahun sebelumnya, Wastam menilai biaya haji tahun ini yang direncanakan sebesar Rp45 juta, tergolong mahal.

Terkait hal itu, Wastam menegaskan siap memperjuangkan agar biaya haji minimal sama seperti tahun lalu. Demikian disampaikan Wastam usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VIII meninjau Asrama Haji Ternate, Provinsi Maluku Utara.

“Komisi VIII menilai biaya haji tahun ini terlalu mahal. Sebagai tindak lanjut, Komisi VIII siap memperjuangkan agar biaya haji minimal sama seperti biaya haji tahun lalu. Di antaranya melalui upaya realokasi pos anggaran untuk mensubsidi biaya haji, sehingga dapat membantu meringankan beban biaya calon jemaah,” ujar Wastam.

Di sisi lain, politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan Komisi VIII DPR



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily menyaksikan penyaluran bantuan sosial, di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT. Foto: Kiki/Man



Anggota Komisi VIII DPR RI Wastam (kiri) saat mengikuti kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Provinsi Maluku Utara.
Foto: AnronMan

RI juga mendalami berbagai opsi untuk meningkatkan kinerja asrama haji. Termasuk dalam hal pengelolaan aset asrama dan peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga asrama haji ke depannya diharapkan lebih mandiri.

Wastam mendorong Kementerian Agama semakin memaksimalkan pelayanan terbaik Asrama Haji terutama terhadap para calon jemaah haji. “Sehingga melalui Asrama Haji, para calon haji bisa benar-benar mendapatkan pelayanan sesuai dengan haknya dan mendapatkan kenyamanan,” pungkas Wastam.

UU PESANTREN BENTUK REKOGNISI NEGARA

Sementara di Medan, Sumatera Utara, Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti mengatakan, keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan bentuk rekognisi (pengakuan) negara atas lembaga pendidikan pesantren. UU tersebut juga sekaligus afirmasi atas kekhasan dunia pesantren dibanding lembaga pendidikan lainnya.

“UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi sejarah baru bentuk rekognisi (pengakuan) negara terhadap

pesantren yang eksistensinya sudah ada sejak berabad-abad silam, jauh sebelum Indonesia merdeka,” kata Endang di hadapan para pengasuh pesantren di Asrama Haji, Medan.

Ditambahkan Endang, UU ini juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren sebagai lembaga yang memiliki kekhasan, keaslian, dan bercorak ke-Indonesiaan. UU Pesantren lahir dari kegelisan para kiai, santri, dan pengasuh pesantren.

Pasalnya, dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang kemudian diperkuat PP Nomor 55 Tahun 2007, hanya menempatkan pesantren sebagai pendidikan Islam non formal.

UU Sisdiknas inilah yang jadi sumber kegelisahan dunia pesantren. Dengan lahirnya UU Pesantren, maka pesantren pun diakui sebagai lembaga formal setara dengan lembaga pendidikan umum lainnya. “Padahal pesantrenlah sebagai institusi pendidikan tertua dan berkontribusi besar terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang seyogyanya mendapat tempat yang baik dan utama dalam Sistem Pendidikan Nasional kita,” tandas politisi Partai Golkar itu.

UU Pesantren, jelas Endang lagi, sudah disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI, 24 September 2019 lalu. “Alhamdulillah berkat kerja keras bersama, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang menggunakan hak konstitusinya mengusulkan naskah awal RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan telah berhasil disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 24 September 2019 menjadi UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren,” tutup legislator dapil Jawa Tengah IV itu. ●mh,qq,aa/es



Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti bertukar cendera mata saat Kunker ke Sumatera Utara. Foto: HusenMan

Soroti Penanganan Covid-19 dan Kepesertaan JKN-KIS

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam reses masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke tiga daerah diantaranya membahas terkait penanganan pandemi Covid-19.

Di Gorontalo, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyoroti terkait dengan penanganan permasalahan Covid-19, bahwa alat untuk tes Covid di Gorontalo hanya dimiliki oleh BPOM, sementara reagen yang dimiliki oleh BPOM masih terbatas. Bahkan masyarakat Gorontalo yang akan melakukan tes PCR Covid-19 harus ke Manado atau Makassar. Oleh karena itu ia menyarankan agar TCN yang digunakan untuk tes TBC dapat menjadi alternatif lain dalam melakukan tes Covid-19, dengan hanya mengganti cartridge yang dimiliki.

“Saya katakan kalau TCN itu kan sebenarnya butuh cartridge, lagi-lagi soal cartridge ini yang mereka kesulitan untuk membeli. Jadi TCN itu adalah alat yang untuk mendeteksi TBC sebetulnya, cuma dengan diganti cartridge-nya bisa untuk semacam PCR, bisa untuk mendeteksi Covid. Di beberapa daerah ada yang memiliki TCN ini, karena TCN ini alatnya tidak sebesar PCR dan lain sebagainya tapi dengan cartridge-nya bisa dilakukan. Cuma cartridge-nya ini kita memang belum memiliki independensi kedaulatan secara penuh, karena cartridge ini harus dari luar negeri,” paparnya di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Gorontalo.



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat memimpin Tim Kunker Komisi IX ke Gorontalo. Foto: Ndy/Man

Ninik, sapaan akrabnya memaparkan, sejak awal Covid-19 melanda dunia, Indonesia sudah berebutan dengan negara lain untuk mendapatkan cartridge. Bahkan pada awal-awal Covid-19 melanda, Indonesia hanya mendapatkan sekitar 6000 cartridge per minggu, dan untuk dibagikan ke seluruh Indonesia. Tentu hal ini sangat kurang, sehingga pemerintah daerah harus membelinya sendiri. Ninik beranggapan perlu dicarikan solusi konkret terkait permasalahan ini.

LIBATKAN TOKOH AGAMA DALAM VAKSINASI

Sementara di Papua, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menilai bahwa penanganan pandemi di Provinsi Papua Barat sudah relatif baik, kecuali capaian angka vaksinasi. Menurutnya peran pemerintah sudah baik, tetapi untuk meningkatkan angka vaksinasi juga diperlukan peran dari tokoh agama dan tokoh adat setempat.

“Kami lihat yang paling menjadi masalah yaitu tentang angka vaksinasi. Angka vaksinasi tahap I baru 50-an persen kemudian vaksinasi tahap II sekitar 30-an persen. Jadi memang satu

catatan terpenting dari pertemuan ini adalah kita butuh strategi ataupun pola untuk mempercepat vaksinasi di Papua Barat ini,” kata Melki saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI bertemu jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat di Manokwari, Papua Barat.

Politisi Partai Golkar itu melanjutkan, bahwa instansi-instansi yang ada di Papua Barat sudah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan vaksinasi tahap I dan tahap II misalnya dengan memberikan vaksin gratis, pembagian



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat memimpin Tim Kunker Komisi IX ke Papua Barat.
Foto: Ndy/Man

sembako dan *doorprize* sepeda motor bagi masyarakat yang ingin divaksin.

“Sudah banyak anggaran untuk membuat semacam insentif kepada orang yang akan divaksin. Tetapi memang nampaknya butuh kolaborasi yang sangat kuat terutama dari aspek tokoh agama dan tokoh adat sehingga jika pemerintah dibantu dengan tokoh agama dan tokoh adat mudah-mudahan vaksinasi di Papua Barat ini bisa lebih cepat lagi,” harap legislator dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) II tersebut.

IMBAU MASYARAKAT JADI PESERTA JKN-KIS

Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham meminta pemerintah daerah di Provinsi Maluku melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat, khususnya yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Kami (Komisi IX) meminta pemerintah daerah di Provinsi Maluku untuk mensosialisasikan dan mengedukasi Inpres Nomor Nomor 1 Tahun 2022

kepada masyarakat untuk turut serta menjadi peserta Program JKN-KIS,” ungkap Aliyah saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Maluku, di Kantor Gubernur Maluku.

Pasalnya, lanjut Aliyah, Inpres Optimalisasi Pelaksanaan JKN yang akan diberlakukan pada 1 Maret itu

akan menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai persyaratan bagi urusan administrasi. “Inpres Nomor 1 Tahun 2022 optimalisasi kepesertaan JKN yang diinstruksikan Presiden akan diberlakukan tanggal 1 Maret, kami mangajak warga yang ada di Maluku yang belum menjadi peserta,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.

Namun, Aliyah juga meminta BPJS meningkatkan kualitas layanan BPJS Kesehatan maupun fasilitas layanan kesehatan yang menerima penggunaan BPJS Kesehatan serta terus memperbaiki data peserta BPJS Kesehatan. Diketahui Presiden Joko Widodo meneken Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berlaku mulai 1 Maret 2022.

Secara umum, Inpres tersebut berisi instruksi kepada berbagai kementerian atau lembaga hingga kepala daerah untuk mengambil langkah dalam optimalisasi JKN. Berdasarkan Inpres itu, syarat bukti kepesertaan BPJS Kesehatan berlaku untuk sejumlah hal, antara lain jual-beli tanah; pembuatan SIM, STNK, dan SKCK; hingga kepesertaan calon jemaah haji dan umrah. ● [ndy,cas,rmm/es](#)



Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham. Foto: Ria/Man

Bahas PTM dan Persiapan PON XXI

Saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 yang terdeteksi sejak Maret 2020, terus menyebar ke hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Dampak Pandemi Covid-19 melanda hampir di seluruh sendi kehidupan, seperti kesehatan, ekonomi, pariwisata, maupun pendidikan. Semua aktivitas masyarakat harus menyesuaikan protokol kesehatan Covid-19.

“Dalam dunia Pendidikan, mayoritas sekolah harus kembali menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Meskipun ada berbagai cara yang dapat ditempuh guna

menyelenggarakan interaksi guru-murid, seperti kunjungan guru ke rumah murid atau penugasan untuk dikerjakan di rumah, namun pada prakteknya proses belajar daring, lebih sering terjadi. Gelombang ketiga pandemi Covid-19 membuat sebagian besar daerah kembali menunda pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah dimulai sejak awal tahun 2022,” ucap Agustina.

Politisi PDI-Perjuangan tersebut mengatakan, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang berkepanjangan

berdampak pada pembelajaran siswa, peserta didik semakin tertinggal dalam belajar, memperlebar kesenjangan pendidikan, dan juga berdampak nyata pada hilangnya pengalaman belajar (learning lost), dan putus sekolah.

“Ancaman hilang generasi (lost generation) akibat pandemi juga kian nyata. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI telah mewacanakan uji coba pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka secara terbatas, namun orang tua masih diberikan hak mengizinkan anaknya untuk bersekolah dengan PTM terbatas atau tetap PJJ,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi X DPR RI mendatangi beberapa sekolah di Kota Manado, antara lain yaitu SD Negeri Kolongan, SMP Advent Unklab Airmadidi, SMA Unklab Airmadidi, SMAN 1 Guru Lombok Kalawat, guna melihat pelaksanaan sistem Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) dan juga Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), serta menyerap berbagai masukan, keluhan dan kendala yang dihadapi sekolah di Sulawesi Utara, khususnya di masa pandemi Covid-19.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti saat memimpin Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau sejumlah sekolah di Manado, Sulut. Foto: Dep/Man

Saat menyambangi kompleks SMP Advent Unklab Airmadidi dan SMA Unklab Airmadidi, Agustina merasa terpujau akan kondisi dan suasana yang ada di sekolah swasta tersebut. Menurutnya, SMP Advent dan SMA Unklab adalah tipe sekolah yang sangat diharapkan dan menjadi dambaan banyak orang.

“Pertama kali saya melihat suasana sekolah ini seperti bermimpi. Sekolah yang kita harapkan dan kita dambakan adalah seperti ini. Rapi, bersih, tertata, bahkan pohon-pohonnya tumbuh dengan sehat. Lantainya juga bersih dan semuanya serba *perfect*. Dengan demikian kita bisa membayangkan jika anak-anak masuk sekolah, tentu suasana bathinnya sangat terdukung dengan situasi pengelolaan yang seperti ini,” puji Agustina.

Di sana ia melihat proses para guru dalam melakukan pengajaran kepada siswanya yakni dengan menularkan semangat energi belajar, dimana ketika memulainya dengan cara memberikan clue sehingga para siswa bersemangat dan merasa dirinya bisa.

“Ini adalah suasana belajar yang sangat luar biasa. Saya yakin dengan melihat berbagai piala penghargaan yang terpampang di sekolah ini pasti sekolah ini, baik SD, SMP, dan SMA nya sering mengantarkan siswanya menjadi juara. Para guru dan suasana sekolahnya semuanya menebarkan energi positif,” tuturnya.

Agustina berharap pandemi Covid-19 bisa segera berlalu dan bisa mendengar kembali riuh renyah suara anak didik di sekitar selasar sekolah serta mereka bisa bercengkerama dengan para gurunya. “Kalau belajar *online* itu walaupun materinya selesai, tetapi secara psikologi anak-anak tetap membutuhkan sentuhan, sapaan, dan tatapan mata dari para gurunya,” ucapnya.

KAWAL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PON XXI

Sementara itu di Provinsi berbeda, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih didampingi Menpora Zainuddin Amali bertukar cendera mata dengan Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Foto: Erman/Man

Fikri Faqih menyatakan, Komisi X DPR RI berkomitmen mendukung dan mengawal pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan PON XXI yang akan diselenggarakan di Aceh-Sumut pada tahun 2024. Ia menyampaikan, PON XXI ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di dua provinsi.

“Kita akan terus mengawalnya dan kami sangat yakin PON XXI Aceh-Sumut akan berjalan sukses,” ujar Fikri ketika memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi X DPR RI dengan Gubernur Aceh Nova Iriansyah beserta jajaran di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, akhir Februari lalu.

Pada pertemuan yang dihadiri langsung oleh Menteri Pemuda Olahraga Zainuddin Amali itu, Fikri mengatakan, kehadiran Menpora bersama dengan Komisi X ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun prestasi olahraga nasional terutama di Aceh yang akan menjadi tuan rumah PON XXI tahun 2024 mendatang.

Di sisi lain, Fikri juga menyampaikan, Komisi X bersama Menpora baru saja menyelesaikan UU Keolahragaan.

Lahirnya UU tersebut dipandang sebagai bentuk kesungguhan proyeksi keberhasilan prestasi olahraga Indonesia di masa depan. “Berkat kerjasama dan dorongan yang kuat (dari Menpora), Komisi X baru saja pecah telur melahirkan UU Keolahragaan,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menpora Zainuddin Amali mengaku akan akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung PON 2024. “Kita akan mendorong kementerian terkait khususnya yang menangani infrastruktur yakni Kementerian PUPR agar sarana dan prasarana dapat segera dibangun,” Zainuddin.

Menpora juga meminta Pemerintah Aceh agar merencanakan pembangunan fasilitas olahraga dapat terintegrasi sehingga bisa digunakan secara berkelanjutan. “Artinya, perencanaannya harus direncanakan secara matang sehingga pembangunan sarana olahraga ini benar-benar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi lainnya,” pungkasnya. ● dep.es/es

Awasi Tren Pemulihan Ekonomi hingga Tingkat Kemiskinan

Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke tiga daerah yakni Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Bandar Lampung guna mendalami berbagai isu yang memang menjadi ranah kewenangannya. Seperti halnya pengawasan yang dilakukan Komisi XI DPR RI di Kalimantan Timur terkait pemulihan ekonomi.

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengapresiasi berbagai kerja sama dan kolaborasi mitra kerja Komisi XI DPR RI di Provinsi Kalimantan Timur yang telah berupaya maksimal membangun momentum pemulihan ekonomi nasional dan regional tahun 2021 dan 2022. Menurutnya, momentum pemulihan ekonomi domestik terus menguat sepanjang tahun 2021. Pertumbuhan PDRB tahun 2021 Kaltim Timur mencapai 2,48 persen (yoy). Dari sisi kontribusi komponen pengeluaran, net-ekspor memiliki kontribusi terbesar dengan 49,38 persen dan 30,24 persen, sedangkan pengeluaran pemerintah berkontribusi sebesar 3,94 persen.

Demikian diungkapkan Dito saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Balikpapan, Kaltim, Februari lalu.

Politisi Partai Golkar ini melanjutkan, kinerja penyaluran kredit Kaltim tahun 2021 mulai tumbuh positif sejalan dengan perbaikan kinerja perekonomian Kaltim. Pada tahun 2022, diperkirakan kinerja penyaluran kredit Kaltim tetap mampu melanjutkan tren positif seiring dengan prakiraan terus membaiknya kinerja perekonomian di seluruh sektor di Kalimantan Timur dengan asumsi bahwa kasus Covid-19 pasca varian Omicron dapat terkendali serta berkurangnya pembatasan kegiatan di berbagai sektor ekonomi.



Tim Kunker Komisi XI DPR RI foto bersama dengan mitra kerja di Kaltim. Foto: Taufan/Man

“Dukungan bagi dunia usaha baik itu melalui penyaluran kredit Ultra Mikro, KUR, dan Non-KUR bagi UMKM, dan pembiayaan bagi Korporasi di Kalimantan Timur tetap akan didukung oleh Pemerintah melalui kebijakan PEN, Bank Indonesia melalui kebijakan moneter dan sistem pembayaran, OJK melalui kebijakan stimulus di sektor jasa keuangan, dan Perbankan Himbara serta Jamkrindo. Selain itu, reformasi struktural dan reformasi fiskal diharapkan dapat memberikan peningkatan nilai tambah perekonomian Kalimantan Timur,” tegas Dito.

SOROTI TINGKAT KEMISKINAN DI NTT

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), saat memimpin Tim Kunjungan Kerja

Komisi XI DPR RI, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menyoroti tingkat kemiskinan. Mengingat angka kemiskinan di NTT pada September Tahun 2015 sebesar 22,58 persen, dan pada Tahun 2021 hanya turun menjadi 20,44 persen. Sementara persentase penduduk miskin nasional pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah, sekaligus menjadi tantangan bagi Komisi XI DPR RI.

“Kita ingin memberikan perhatian khusus kepada NTT, karena tingkat kemiskinan yang masih akut 20 persen lebih ini menjadi tantangan kita (Komisi XI DPR RI), karena secara nasional kita sudah mengalami penurunan di bawah satu digit, tapi NTT masih di atas dua digit,” ungkap Fathan.



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi. Foto: Hanum/Prima

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu menilai, dengan bauran kebijakan antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat memberikan rasa optimis akan ada peningkatan dari segi kualitas hidup, peningkatan dunia kerja dan juga memacu pertumbuhan ekonomi di NTT bisa lebih baik.

“Karena itu juga kami di sini memantau seluruh program-program pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah NTT. Bagaimana perkembangan bank-bank di NTT dalam penyaluran kredit, bagaimana sinergi Bank Indonesia, bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan sebagainya,” jelas Fathan.

Namun demikian, meskipun kemiskinan di NTT mengalami penurunan, ketimpangannya belum banyak berubah. Fathan pun mengatakan penyaluran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di NTT melalui perlindungan sosial, stimulus pajak, hingga pendapatan dari sektor pajak hingga saat ini sudah mengalami peningkatan.

MINTA SELURUH POTENSI DI LAMPUNG DITINGKATKAN

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro meminta seluruh potensi yang ada di Lampung seperti

pertanian, industri pengolahan, minerba dan batu bara untuk terus ditingkatkan. menurutnya, sasaran bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak hanya bermain di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), tapi juga membantu pemerintah untuk membidik sektor pertanian, industri pengolahan, sektor batu bara hingga industri manufaktur.

“Agar apa? Agar pendapatan pajak kita makin hari makin maksimal, sumbangan PDRB Lampung terhadap nasional itu bisa meningkat dari tahun

ke tahun,” ujar Fauzi usai mengikuti rapat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Himbara, Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), dan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), di Bandar Lampung, Lampung.

“Nah, kita melihat bahwa potensi yang sangat luar biasa dimiliki Lampung adalah penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar nomor 4 atau nomor 5 di Indonesia,” sambung politisi Partai NasDem tersebut. Fauzi menjelaskan bahwa sumbangan sektor pajak dan perpajakan itu hampir di angka Rp10 triliun per tahun, dari total pajak Indonesia yang kurang lebih di kisaran Rp1.200 triliun.

Di sisi lain, Fauzi berharap kepada OJK untuk lebih melindungi masyarakat, melayani masyarakat, dan memberikan literasi kepada masyarakat terkait pinjaman *online* (pinjol). “Khususnya bimtek (bimbingan teknis) yang banyak masyarakat terlena (kepada pinjol) harus diberikan literasi, pemahaman, edukasi, sehingga masyarakat Lampung dan masyarakat pada umumnya sadar bahwa (pinjol) ini legal, bahwa ini *enggak* boleh, bahwa ini boleh,” saran Fauzi lebih lanjut. ● hnm,tn,hal/es



Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro. Foto: Munchen/Prima

Lonjakan Harga Bahan Pokok, Jangan jadi 'Agenda Tahunan'

Kenaikan harga komoditas pangan menjelang bulan Suci Ramadhan seolah menjadi 'agenda tahunan' yang pasti terjadi. Dan mirisnya, tahun ini beberapa komoditas sudah mengalami kenaikan, bahkan sempat menghilang sejak beberapa bulan sebelum datangnya bulan puasa.

Sempat menghilang beberapa pekan dari pasaran, minyak goreng tiba-tiba muncul ketika pemerintah mencabut ketetapan HET (harga eceran tertinggi).

Kondisi tersebut tentu saja mendapat sorotan dari DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menilai pemerintah sejatinya tidak bisa berlindung dan berdalih bahwa kenaikan harga sembako menjelang Ramadhan merupakan fenomena yang wajar terjadi setiap tahunnya.

Menurutnya jika setiap tahun selalu terjadi kenaikan harga sembako, seharusnya pemerintah sudah tahu di mana titik permasalahannya atau apa penyakitnya. Sehingga ada sebuah kebijakan khusus untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga tersebut.

"Jangan dijadikan ini biasa, bahwa tahun lalu juga naik. Ini pemerintah punya tugas," ujar Rachmat Gobel kepada wartawan, akhir Maret lalu.

Lebih lanjut Politisi Partai NasDem ini mengaku sedikit memahami jika kenaikan harga terjadi pada beberapa komoditi impor. Karena hal itu dipengaruhi oleh faktor eksternal (luar negeri). Namun yang tidak bisa dipahaminya, jika melambung harga beberapa komoditas yang notabene merupakan produk atau hasil buatan dalam negeri yang berbagai bahannya



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Foto: Dok BKSAP/Prima

tersedia di dalam negeri.

"Kalau bahannya ada, tersedia dan diproduksi di dalam negeri, kenapa bisa naik? Pemerintah harus kontrol dong," tegas pimpinan DPR RI kordinator bidang Industri dan Pembangunan itu.

DPR RI dengan fungsi pengawasannya tentu tidak tinggal diam. Khusus untuk membahas permasalahan tersebut, DPR (melalui beberapa AKD terkait) telah memanggil beberapa menteri seperti Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, hingga Menteri ESDM, untuk duduk bersama mencari solusi atas permasalahan ini. Dari sana Gobel menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan operasi pasar guna menstabilkan harga dengan segera.

"Operasi pasar harus dilakukan dalam waktu dekat agar rakyat bisa menjalani puasa dengan tenang, nyaman ibadahnya, khususnya para pedagang yang banyak menggunakan minyak goreng," pungkasnya.

Di Komisi VI DPR RI, sejak jauh hari sudah meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengantisipasi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan jelang Ramadhan. Beberapa pekan menjelang puasa, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada minyak goreng, namun beberapa komoditas lain seperti gula, telur, daging, bahkan cabai dan lain-lainnya.

"Masyarakat dalam dua tahun terakhir sudah mengalami kesulitan karena dampak pandemi Covid-19. Ditambah

dengan kelangkaan dan kenaikan minyak goreng. Jangan sampai bebannya terus bertambah dengan kenaikan kebutuhan dasar lainnya jelang bulan puasa,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Bangun Hartono.

Merujuk pernyataan Mendag M. Lutfi mengenai adanya oknum atau mafia minyak goreng di Komisi VI DPR beberapa waktu sebelumnya, Rudi meminta Kementerian Perdagangan segera berkordinasi dengan pihak berwajib, jika di lapangan ditemukan adanya oknum tertentu yang melakukan penyimpangan untuk komoditas apapun.

Selain itu, ia juga meminta agar jalur distribusi harus diawasi dengan ketat dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.

MAKSIMALKAN PERAN BAPANAS

Hal senada juga terjadi di Komisi IV DPR RI yang bermitra dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Anggota Komisi IV DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Bapanas segera bertindak untuk mengatasi tren kenaikan harga pangan jelang Ramadhan dan lebaran yang cukup mengkhawatirkan.

Adapun komoditas yang mulai melonjak harganya antara lain, beras, jagung, kedelai, gula, telur, daging, bawang, cabai, dan minyak goreng. Padahal, pemerintah berulang kali menegaskan ketersediaan pangan aman hingga saat ini. Namun tentunya ketersediaan tersebut tidak akan banyak berarti, jika ada persoalan pada rantai distribusi.

Ia mencontohkan minyak goreng yang hingga saat ini harganya masih cukup tinggi, dan untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga murah warga di sejumlah daerah masih harus mengantri untuk mendapatkannya. Dengan otoritas yang dimiliki, Bapanas mempunyai peran strategis dalam memastikan ketersediaan stok berbagai komoditas pangan dan memperbaiki rantai distribusi. Tentunya dengan bekerja sama dengan Satgas Pangan

MESKIPUN BARANG ADA TETAPI JIKA TERJADI PENIMBUNAN OLEH DISTRIBUTOR DAN SPEKULAN MAKA MASYARAKAT SEBAGAI KONSUMEN AKAN TETAP DIRUGIKAN KARENA AKAN TERJADI GEJOLAK HARGA

Anggota Komisi IV DPR RI
Cucun Ahmad Syamsurijal. Foto: Jaka/Man



Mabes Polri, perbaikan tata kelola berbagai komoditas seharusnya bisa segera dituntaskan.

“Bapanas dan Satgas Pangan harus menguatkan kerjasama agar proses pengadaan dan distribusi berbagai komoditas pangan bisa diperbaiki. Muaranya, masyarakat sebagai konsumen akan mendapatkan harga kebutuhan pangan yang murah dan terjangkau,” tambahnya.

Cucun juga mendesak pemerintah agar tidak melepaskan harga komoditas pokok ke keseimbangan pasar sebagaimana yang dilakukan pada harga minyak goreng kemasan. “Meskipun barang ada tetapi jika terjadi penimbunan oleh distributor dan

spekulasi maka masyarakat sebagai konsumen akan tetap dirugikan karena akan terjadi gejolak harga,” ujarnya.

Sementara itu dikutip dari berbagai media nasional, Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto memastikan pasokan komoditas pangan saat Ramadhan dan Lebaran aman. Hal tersebut berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan Bapanas hingga Mei 2022 dimana stok beras surplus 8,7 juta ton dan stok jagung surplus 3,2 juta ton. Sedangkan bawang merah tercatat surplus 92.000 ton, bawang putih surplus 104.900 ton. Diharapkan rencana impor bawang putih pada Maret-Mei sebesar 145.000 ton dapat terasiliasi dengan baik.

Begitupun dengan cabai besar posisinya juga terbilang aman yakni surplus sampai Mei 27.900 ton, cabai rawit surplus 40.383 ton, daging sapi surplus 31.153 ton, dan daging ayam ras surplus 357.700 ton. Begitupun dengan telur ayam surplus 98.500 ton, minyak goreng juga posisinya sampai Mei diperkirakan masih ada surplus sekitar 663.493 ton. Serta gula konsumsi surplus 544.000 ton. Realisasi impor gula konsumsi juga diharapkan dapat terealisasi sesuai rencana. Adapun rencana impor gula konsumsi pada Maret-Mei sejumlah 772.900 ton.

Selain itu Bapanas juga terus memonitor harga. Bapanas mencatat harga beras dan jagung tercatat stabil. Meski terjadi kenaikan harga kedelai di Rp13.292 per kilogram, hal terbilang cukup tinggi dari rata-rata harga yang biasanya Rp10.000 per kilogram.

Bapanas juga terus melakukan pemantauan ketersediaan dan harga pangan setiap minggunya melalui sistem *early warning* yang sudah dibangun. Ia mencontohkan, saat ini harga daging ayam sudah mulai agak naik. Salah satu mitigasi yang disiapkan adalah berkomunikasi dengan asosiasi pedagang dan stakeholder agar pasokan dapat terjaga sehingga harapannya harga akan cenderung stabil nantinya. ●ayu/es



DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)



Aidah Muslimah: Serap Aspirasi dengan Silaturahmi



Anggota DPR RI Aidah Muslimah saat turun ke jalan menyapa konstituennya. Foto: Ist/Pdt

Tak perlu acara formal, para wakil rakyat bisa menyerap aspirasi dari konstituennya kapan saja dan di mana saja. Bahkan tak jarang, Anggota Dewan menyambangi dan melibatkan diri dalam aktivitas keseharian masyarakat.

Aidah Muslimah, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan ini turun langsung sembari menyerap aspirasi konstituennya di kawasan wisata Kampung Hijau, Kelurahan Sungai Bilu, dari RT 1 hingga RT 5. Sehari sebelumnya, ia juga membaur bersama masyarakat di kawasan Jalan Benua Anyar, Kelurahan Benua Anyar, Kota Banjarmasin.

Selain berdiskusi tentang keluhan kesah masyarakat, Aidah juga membagikan kupon kepada para Ketua RT untuk disebar kepada warga. Dari kupon itulah, warga diminta untuk menuliskan apa saja harapan, saran, serta masukan untuk wilayah mereka.

“Reses yang dilakukan kali ini lebih kepada bersilaturahmi dengan masyarakat, serta memberikan bantuan berupa sembako pada

mereka, yang dapat kupon dari RT, itu yang berhak menerima,” jelas Aidah.

Ia juga berterima kasih pada warga yang turut hadir dalam kegiatan hari ini. “Semoga kegiatan hari ini mampu menyerap aspirasi warga terkait berbagai perkembangan di sini, lewat apa yang mereka sampaikan,” lanjut wanita itu.

Selanjutnya, seluruh aspirasi yang disampaikan warga, baik itu berupa saran, masukan maupun pengaduan masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses ini akan dituangkan ke dalam laporan kegiatan reses dan selanjutnya akan disampaikan ke pusat.

“Kemudian, masukan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan perencanaan program, agar pelaksanaannya dapat tepat sasaran dan sesuai aspirasi serta kebutuhan masyarakat di daerah,” tutupnya. •tn/es

John Kenedy Aziz: Resmikan Koperasi NU

Selama pandemi Covid-19, ekonomi masyarakat memang bergerak lambat. Namun, itu tak boleh menyurutkan semangat membangun kembali geliat perekonomian rakyat kecil. Adalah koperasi salah satu penggerak ekonomi yang tetap eksis di tengah pandemi ini. Koperasi adalah soko guru. Dari koperasilah rakyat kecil menumpukan harapan.



Anggota DPR RI John Kenedy Aziz saat meresmikan kantor koperasi NU. Foto: IstiPrima

mendongkrak koperasi menjadi besar,” ungkap John.

Di daerah lain, koperasi didirikan berdasarkan komoditas yang dihasilkan di daerah tersebut. Misalnya, lanjut politisi Partai Golkar ini, ada koperasi sawit, karena daerah tersebut penghasil sawit. Ada pula koperasi nelayan, karena penghasil ikan. Dengan model koperasi berdasarkan komoditas, keberlanjutan koperasi tetap terjaga sekaligus memberi harapan besar bagi kehidupan masyarakat.

John berharap, Koperasi Konsumen NU di Padang Pariaman ini

Anggota DPR RI John Kenedy Aziz bersama Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, Februari lalu, meresmikan Koperasi Konsumen Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bustanul Yaqin, Pungguang Kasiak, Lubuak Aluang, Sumatera Barat (Sumbar). Ini bentuk kepedulian John bersama Pemda setempat untuk membantu masyarakat, khususnya komunitas pesantren. Koperasi ini diharapkan menjadi

pemantik kemajuan ekonomi masyarakat di tengah pandemi.

John kebetulan berasal dari dapil Sumbar II, yang meliputi Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi,

“Di Padang Pariaman ini belum ada koperasi yang bisa bertahan dan berkembang. Kenyataan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya belum ada sentra usaha ekonomi produktif di daerah ini yang bisa

mampu memberi terobosan dan inovasi baru bagi masyarakat setempat. Koperasi ini juga diharapkan bisa membantu para anggotanya membangun usaha produktif.

“Ke depan, koperasi ini bisa menciptakan terobosan dan inovasi baru di bidang usaha produktif. Tentu ini untuk mengangkat ekonomi masyarakat khususnya para anggota koperasi, sehingga koperasi bisa berkembang dengan pesat,” seru Anggota Komisi II DPR itu. ●mh/es

Endang S. Thohari: Gelar Bimtek Perkebunan di Bogor

Anggota DPR RI Endang S Thohari Daerah Pemilihan Jawa Barat III yang meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, Pada Reses ini menggelar bimbingan teknis (Bimtek) perkebunan serta audiensi dengan penyuluh dan petani bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Pajajaran Suite BNR, Endang menjelaskan konsep perkebunan di perkotaan, yaitu perkebunan dengan pemanfaatan ruang terbuka hijau, dengan konsep tematik berdasarkan komoditas, pengolahan hasil perkebunan dan eduwisata dengan tema perkebunan.

“Ada kebutuhan zona hijau perkotaan, seperti untuk rekreasi, mengurangi populasi, ruang terbuka dan pelestarian keanekaragaman hayati,” katanya, seraya mengatakan hal ini perlu untuk terus dikembangkan.

Selain itu, Legislator Fraksi Gerindra itu juga memaparkan mengenai perannya di Kota Bogor, dalam bidang pertanian yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Ia memaparkan

tiga poin yang menjadi pembahasan.

Pertama, dalam pertemuan itu, ia memperkenalkan teknologi alsintan pasca panen combine harvester di Kota Bogor, pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT) dan keberhasilan membuat minuman sehat atau herbal hasil olahan dari kebun yang dikelola oleh KWT.

Ketiga pengembangan kampung tematik dengan ciri khas buah, yaitu Kampung Manggis di Kelurahan Situgede, Kampung Durian di Kelurahan Rancamaya.

“Dengan mengaplikasikan desiminasi hasil penelitian Balitbagtan di Kota Bogor, seperti tanaman padi untuk daerah urban, kambing boerka dan lainnya. Serta menginisiasi pasar tani di Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Memberikan pemahaman untuk kemajuan pertanian dan perkebunan di Bogor adalah target Anggota Komisi IV DPR RI. Untuk itu, tak mengenal waktu, kapanpun, dimanapun ia terus mendengarkan aspirasi dan sekuat tenaga mewujudkan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat. ●rnm/es



Anggota DPR RI Endang S Thohari saat mengadakan Bimtek Budidaya dan Hilirisasi Produk Hasil Perkebunan di Bogor. Foto: Ist/Prima

Subardi: Bantu Perawatan Pasien Autoimun

Dipilih oleh konstituen sebagai wakilnya di Senayan, sudah menjadi kewajiban bagi Anggota DPR RI untuk turun langsung membantu masyarakat yang sedang kesusahan. Salah satunya yang dilakukan oleh Anggota DPR RI Subardi, ia membantu konstituennya untuk mendapatkan perawatan yang dibutuhkan.



Anggota DPR RI Subardi saat berkunjung ke rumah Wagini. Foto: Ist/Prima

Kepada Wagini, konstituennya yang sedang mengidap penyakit autoimun, Subardi memfasilitasi sebuah ambulans untuk mengantar ke RSUD Dr Sardjito Yogyakarta. Warga asal Kecamatan Nanggulan, Kabupaten

Kulon Progo, itu dirujuk agar memperoleh penanganan medis yang lebih baik atas penyakit autoimun yang menyebabkan tubuhnya mengalami kelumpuhan.

Subardi menyatakan segala kebutuhan Wagini akan berupaya dipenuhi. Begitupun pada saat

kontrol berkala nanti, untuk melihat perkembangan Wagini.

“Saya menugaskan Rumah Aspirasi agar Wagini diperiksa rutin ke RS terdekat. Bu Wagini sudah diurus BPJS-nya sehingga lebih mudah. Keinginan Bu Wagini hanya satu yakni ingin sembuh dan ingin pulih seperti semula,” ujar Subardi.

Legislator dapil DIY tersebut menjelaskan, Wagini dibawa ke rumah sakit dibantu Rumah Aspirasi Anggota DPR RI Subardi. Mulai dari penjemputan di rumah ke RSUD Nyi Ageng Serang pada 1 Maret lalu dan kini telah berada di RSUD Dr Sardjito.

Sementara itu, Wagini merasa senang mendapatkan proses medis yang akan ia jalani. Ia tak

membayangkan bisa mendapatkan perawatan hingga di rumah sakit tipe A. Bagi Wagini, melalui bantuan yang difasilitasi oleh Subardi itu diharapkan membuat dirinya bisa beraktivitas dan menggerakkan anggota tubuhnya.

“Saya sangat bersyukur akhirnya bisa sampai Sardjito. Kepada Pak Subardi, matur nuwun sudah bantu saya mulai dari rumah, ke RSUD (Nyi Ageng Serang) Kulon Progo, dan akhirnya sampai kesini,» kata Wagini.

Adapun Koordinator Rumah Aspirasi Subardi Latnyana mengatakan sejumlah relawan ikut membantu merujuk ke RSUD Dr Sardjito sesuai arahan dokter. Sesampainya di RSUD Dr Sardjito, Wagini dibawa ke poliklinik pemeriksaan.

Sepanjang pemeriksaannya,

Wagini senantiasa didampingi perwakilan Rumah Aspirasi tersebut.

“Proses selanjutnya tergantung diagnosa dokter. Bila harus mendapat perawatan maka bu Wagini akan mondok di sini. Namun bila diperkenankan rawat jalan maka kami antar pulang kembali,” kata Latnyana. ●pun/es

Bisri Romly: Pantau PIP dan PTM di Pekalongan



Anggota DPR RI Bisri Romly saat meninjau penyaluran PIP dan PTM di Pekalongan. Foto: ist/mtv

Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) harus dikawal, agar tidak salah sasaran. Karena, PIP sangat membantu meringankan beban yang harus dikeluarkan wali murid yang sedang berjuang melewati masa Pandemi Covid-19.

Anggota DPR RI Bisri Romly memantau PIP dan Pembelajaran Tatap Muka di Sejumlah Sekolah di Pekalongan dalam kunjungan dapilnya (Kundapil) beberapa waktu lalu. Baginya, kunjungan ini merupakan sebuah kewajiban konstitusi yang harus dijalaninya.

“Sejak Jumat sampai hari ini kami memantau beberapa sekolah seperti SMK Maarif NU Diponegoro, Kecamatan

Karanganyar, SMA PGRI 2 Kajen dan SMP Negeri Kandangserang. Kami memantau seperti apa pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut,” kata Bisri Romly kepada **Parlementaria**.

Diketahui, kegiatan kundapil tersebut berfokus pada pemantauan pembelajaran tatap muka dan realisasi pelaksanaan PIP di Kabupaten Pekalongan yang menjadi daerah pemilihannya. Kegiatan pemantauan

tersebut berlangsung di beberapa sekolah mulai dari tingkat SMK hingga SMP dan SD di beberapa lembaga pendidikan, sejak Jumat hingga Sabtu 25-26 Maret 2022.

“Sebagai mitra kerja dari Kemendikbudristek, beberapa sekolah mengusulkan beasiswa program PIP melalui saya. Tentu aspirasi dan usulan ini kami lanjutkan ke pemerintah sebagai bentuk kerja dari Anggota DPR RI,” jelasnya.

Dirinya pun mengungkapkan, sebagai Anggota DPR RI dari dapil Jawa Tengah X yang meliputi Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Batang dan Kota Pekalongan, pihaknya tentu memiliki kewajiban konstitusi mengusulkan aspirasi dari daerah pemilihan. [hal/es](#)

Achmad: Pesantren Harus Berdampak Positif Bagi Masyarakat

Anggota DPR RI Achmad melakukan reses masa persidangan dengan mengunjungi Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar di Kota Pekanbaru, Riau. Dalam kesempatan tersebut, juga digelar doa bersama dan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Al-Azhar di pondok pesantren itu.



Anggota DPR RI Achmad saat bersilaturahmi dengan konstituennya. Foto: Ist/Prima

Achmad mengatakan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, memang perlu dibangun sarana dan prasaraja yang memadai, salah satunya adalah masjid. “Makna di balik pembangunan ini adalah pembangunan peradaban.

Dengan pembangunan ini melahirkan para pendakwah, ilmuwan dan disamping itu pembangunan ini bisa menjadi daya tarik bagi pesantren,” jelasnya.

Achmad berjanji akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat dan berkoalisi dengan rakyat. Sebagai

wakil rakyat dapil Riau I, Achmad merasa bertanggung jawab untuk membangun gedung di pondok pesantren ini sesuai dengan harapan masyarakat juga merupakan perjuangan di Partai Demokrat.

Pada kesempatan itu, Achmad juga sempat menyerahkan bantuan madrasah kepada MTs Al Kautsar sebesar Rp150 juta yang diserahkan kepada pengurus Pondok Modern Al-Kautsar. “Mudah-mudahan pembangunan gedung ini lancar, sehingga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga bisa memacu semangat untuk membangun,” harap mantan bupati Rokan Hulu dua periode itu.

Kemudian, Pimpinan Pondok Modern Al-Kautsar Ali Mukhlisin mengatakan jika Al Kautsar di usia 33 tahun punya niat yang besar yakni untuk memulai pembangunan gedung Al-Azhar.

“Gedung ini cukup besar memiliki 4 lantai. Lantai pertama untuk kantor, lantai dua dan tiga untuk ruang belajar santri, serta lantai 4 ruang serba guna. Secara hitung-hitungan untuk pembangunan ini menghabiskan Rp32 miliar,” jelasnya.

“Ini mimpi yang sangat besar bagi kami. Gedung ini bernama Al-Azhar dan menggunakan nama yang lama. Tahun lalu ada bangunan lama yang sudah dibongkar dan gedung itu kita bangun kembali tahun ini,” sambungnya.

Dia berharap, dengan adanya pembangunan gedung baru Al Azhar di kompleks Pondok Modern Al-Kautsar ini bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya terutama untuk para santri dalam menuntut ilmu. • **tn/es**



Anggota DPR RI Diah Nurwitasari turun langsung ke SPBU untuk mendengar keluhan masyarakat terkait kenaikan harga BBM. Foto: Ist/Prima

Diah Nurwitasari: Serap Aspirasi terkait Kenaikan BBM

Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi PKS Diah Nurwitasari, memantau secara langsung efek kenaikan harga pertamax dan isu langkanya BBM solar yang terjadi belakangan ini di SPBU Al-Ma'soem. Diah karena berada dekat kawasan industri yang ada di Kabupaten Bandung.

Menurut pantauan tim saya di lapangan, SPBU ini besar dan sering menjadi tempat pengisian solar kendaraan-kendaraan besar dari pabrik-pabrik yang ada di sekitarnya. Juga karena tempat antrian motornya terpisah, rapih dan mampu menampung antrian yang panjang.

Oleh karena itu, saya memilih SPBU ini untuk mengetahui beberapa hal dari masyarakat secara langsung,” kata Diah.

Sebelum ke tempat pengisian BBM, Diah menemui manajemen SPBU. Menurut penuturan manajemen SPBU, saat ini pasokan masih normal walaupun ada kalanya dalam momen tertentu kadang pasokannya dibatasi.

Diah kemudian bertanya pada sopir mobil box yang sedang mengantri untuk mengisi solar. Supir itu mengungkapkan sulitnya mendapatkan solar.

“Sudah dua minggu ini sulit mendapatkan solar, hari kemarin saya mengantri lama sekali di SPBU disalah satu rest area Tol Purbaleunyi. Bahkan minggu kemarin saya pernah dari Bandung sampai Sumedang tak ada satu pun SPBU yang sedia solar, akhirnya terpaksa saya pakai dexlite,” ucapnya.

Tak cukup sampai disitu, Diah Nurwitasari mencoba berdialog dengan pengguna sepeda motor yang sedang antri pertalite. “Bapak sudah biasa pakai pertalite?” tanya Diah. “Kadang pakai pertamax kadang pertalite, tapi setelah harga pertamax naik jadi Rp12.500 saya lebih memilih pertalite walaupun harus antri panjang seperti ini,” ungkapnya.

Petugas pengisi pertalite untuk sepeda motor pun membenarkan kondisi tersebut. “Mulai tanggal 1 kemarin, antrian motor pengisi pertalite menjadi lebih panjang dari biasanya. Mungkin karena banyak yang beralih dari pertamax yang tambah mahal Bu,” ujarnya.

Kondisi seperti ini, lanjut Diah, merupakan kondisi umum di sejumlah SPBU setelah adanya kenaikan harga pertamax. Diah mengatakan, yang terdampak bukan hanya kalangan menengah ke atas tapi juga para pengguna pertalite yang notabene di klasifikasikan Pertamina sebagai kalangan menengah ke bawah.

Dia mengimbau pemerintah menunda menaikkan harga BBM disaat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri seperti sekarang ini.

“Tak ada kenaikan bbm pun harga-harga kebutuhan masyarakat pasti naik, apalagi sekarang diperparah juga dengan langkanya solar di beberapa SPBU. Kondisi ini menjadi catatan bagi saya untuk disampaikan dalam sidang komisi dengan mitra terkait. Do’akan kami agar mampu dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat,” ucap Diah mengakhiri. ● ann/es

Ibnu Mahmud: Serahkan Sertifikat Tanah Ke Masyarakat Bantul

Kesadaran masyarakat akan kepemilikan tanah masih perlu ditingkatkan. Masing-masing stakeholder harus bersinergi menyosialisasikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar hak-hak masyarakat atas tanahnya bisa memiliki kedudukan hukum yang kuat.

Anggota Komisi II DPR RI Ibnu Mahmud menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk Sosialisasi Program Strategis Nasional.

Dalam gelaran sosialisasi tersebut, Ibnu Mahmud menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah kepada masyarakat yang ada di sekitar wilayah Kapanewon, Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Legislator dapil DIY itu sekaligus menyampaikan bahwa PTSL merupakan wujud reforma agraria yang merupakan salah satu program strategis Kementerian ATR/ BPN berkaitan dengan pendaftaran tanah dimana pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 12 Tahun 2017 tentang percepatan PTSL di seluruh Indonesia.

“Program PTSL merupakan salah satu hal yang menjadi fokus utama dari Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Komisi II DPR RI. Kita patut apresiasi kinerja BPN yang berusaha mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia dengan cakupan yang sangat luas. Dengan perkembangan teknologi,

banyak persoalan pertanahan yang selalu muncul di tengah masyarakat dan ini menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh BPN untuk segera mencari solusi, salah satunya dengan program PTSL ini,” ujar Ibnu.

Sementara itu, Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Suwito, mengungkapkan Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah 506,8 Km dengan estimasi jumlah bidang tanah sebanyak 668.641 bidang. Dari jumlah tersebut sampai saat ini telah terdaftar sebanyak

668.641 bidang atau 99.63 persen dan belum terdaftar sebanyak 1.091 bidang. Sedangkan capaian pendaftaran tanah melalui PTSL yang dilaksanakan sejak tahun 2017 sebanyak 137.584 bidang atau 20.58 persen dari jumlah bidang tanah terdaftar di Kabupaten Bantul.

“PTSL merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat, mencegah sengketa pertanahan. Selain itu, nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang dapat menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima sertifikat,” tutup Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Suwito. ● pun/es



Anggota DPR RI Ibnu Mahmud menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis kepada masyarakat. Foto: Ist/Prima

Asep A. Maoshul Affandy: Camping dan Salurkan Bantuan kepada Masyarakat



Anggota DPR RI Asep A. Maoshul Affandy saat camping dan berdiskusi dengan masyarakat. Foto: Ist/Prima

Silaturahmi dengan masyarakat di dapil, bagi anggota DPR RI KH. Asep A. Maoshul Affandy sejatinya dilakukan kapan saja dan di mana saja. Hal itu juga dilakukan sembari mendengarkan langsung keinginan dan harapan masyarakat untuk diperjuangkan di Senayan.

Saat reses, sederet agenda menanti Asep. Di antaranya kunjungan Ke Yayasan Miftahul Khoir Panyaungan Pamalayan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Asep mendengar langsung aspirasi dan keluhan masyarakat yang disampaikan para Kiai dan santri se-Kota Ciamis.

“Hari ini saya duduk di Komisi IV DPR RI, bermitra dengan Kementerian Pertanian, KKP, KLHK dan yang lainnya. Di

dalamnya saya selalu mengupayakan agar pondok pesantren dan insan-insan nya, bisa memanfaatkan alokasi anggaran dan bantuan dari mitra. Agar pesantren semakin berdaya saing dan bisa mandiri dalam segala hal, karena pesantren menjadi role model kemandirian pendidikan dan ekonomi,” ujar Asep kala itu.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Bapak Kepala Desa, MUI, DPC PPP Kabupaten Ciamis dan unsur-

unsur tokoh masyarakat. Semuanya antusias berdiskusi langsung dengan Anggota DPP PPP tersebut.

Di lain kesempatan yang dikemas dalam camping, Asep menyalurkan bantuan sapi yang berasal dari Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO), serta bantuan benih melalui Kebun Bibit Rakyat (KBR).

Ia sangat berharap agar masyarakat bisa memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya agar dapat berkembang dan berkesinambungan. Pihaknya tentu akan terus mengawal program ini sampai sukses, agar tercipta lapangan kerja secara terbuka, dan menghasilkan kesejahteraan sebagaimana yang diharapkan.

“Mudah-mudahan saya nanti kesini lagi progress-nya sudah pesat berkembang,” pungkasnya. ● ayu/es



Sahabat Alam Sang Pengelola Lingkungan

Ekho Kurniawan. Foto: Dok

Menjaga lingkungan tempat kita hidup sehari-hari merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban. Jika lingkungan rusak maka para penghuninya pun harus menanggung dampak, perilaku masyarakat menentukan kualitas lingkungan. Maka kesadaran pada pentingnya menjaga lingkungan harus tertanam pada setiap penghuninya.

Ekho Kurniawan merupakan sosok yang punya kepedulian terhadap lingkungan, lebih dari itu bahkan dia merupakan *founder* dan pembina Bank Sampah Sahabat Alam (BSSA).

BSSA merupakan gerakan yang mengajak dan mengedukasi masyarakat agar bijak dalam mengelola sampah. Karena sampah yang tidak dikelola

dengan baik akan menjadi polusi yang merusak lingkungan. Tanpa pengelolaan yang baik, sampah dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Coba hitung berapa banyak sampah yang dihasilkan dalam 1 hari. Bila jumlah tersebut dikalikan dengan jumlah seluruh penduduk bumi bayangkan berapa banyak sampah yang akan menggunung.

Maka di setiap lingkungan masyarakat, dibutuhkan banyak orang yang punya kesadaran menjaga dan merawat lingkungan dengan baik seperti Ekho Kurniawan. Atas saran BSSA, dia bersama orang-orang yang terlibat di dalamnya menjalankan program pengelolaan sampah yang patut diapresiasi. BSSA mempunyai beberapa program dan kegiatan, mulai dari 4 program unggulan, yaitu ada Sedekah Hijau, Sampah Emas, Sedekah Jelantah dan Sampah Dapur Jadi Sayur.

“Untuk Program Sedekah Hijau nantinya masyarakat dapat memilah dan mengumpulkan sampah anorganik yang bernilai, untuk disedekahkan dalam bentuk uang dan makanan. Program Sampah Emas adalah masyarakat menabung sampah anorganik yang



sudah dipilah dan bernilai jual, untuk ditukarkan dengan emas sesuai dengan jumlah sampah yang disetorkan,” jelas Ekho saat diwawancarai **Parlementaria** awal April 2022.

Program Sedekah Jelantah adalah masyarakat mengumpulkan minyak jelantah yang tidak dipakai lagi, dan diserahkan ke BSSA untuk dikelola untuk diserahkan kepada pihak pengepul dan nantinya diolah menjadi biodiesel. Dan Program Sampah Dapur Jadi Sayur sesuai dengan judulnya masyarakat dapat menukarkan sampah organik yang berasal dari rumah tangga atau industri untuk ditukarkan dengan sayuran baru.

Bahkan Ekho berencana membuat program pengelolaan sampah yang bisa menjadi beasiswa sarjana. “Saya berpikir ada program sarjana dari sampah. Dari sampah orang bisa jadi sarjana, atau bisa disebut beasiswa sampah.” Menurutnya program ini masih dalam tahap rencana, akan dikonsultasikan dengan beberapa pihak lagi.

BSSA menjalankan programnya di Desa Kampung Apar, Kecamatan Pariaman Selatan. *Founder* BSSA merupakan Lulusan S1 Teknik Lingkungan Universitas Andalas (Unand) Padang, dan telah menempuh studi S2 Teknik Lingkungan di Kampus yang sama, dia sangat konsen untuk mengatasi masalah lingkungan apalagi yang berkaitan dengan sampah.



Ekho Kurniawan saat berdialog dengan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini. Foto: Dok

“Sejak remaja memang saya sangat tertarik dengan isu lingkungan, dimana masalah yang menjadi momok di setiap daerah dan negara di seluruh dunia adalah sampah, tetapi di negara yang sudah maju, mereka sudah memanfaatkan sampah ini menjadi berguna dan bermanfaat,” ungkapnya Ekho.

Dia juga menjelaskan tentang lima aspek pengelolaan sampah, yaitu: aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek peraturan, aspek peran serta masyarakat atau sosial, dan aspek teknis operasional. Dari lima aspek ini menurut Ekho aspek sosial adalah yang tidak mudah.

“Dari lima aspek pengelolaan sampah yang paling susah adalah aspek sosial. Aspek teknis, hukum,

lembaga dan teknologi relatif tidak susah. kalau aspek sosial sudah beres yang lain akan mudah menurut saya,” paparnya.

Masyarakat kita masih menghadapi banyak kendala dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah. Kita dihadapkan dengan masih rendahnya akses pelayanan sampah, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), masih rendahnya komitmen pemerintah daerah (pemda) dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Indonesia masih perlu untuk belajar dari negara-negara lain yang telah berhasil dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

●eko/es

Forum ASGP

Indra Iskandar Sampaikan Penerapan *Green Energy* di DPR



Sekjen DPR RI Indra Iskandar foto bersama dengan para delegasi forum ASGP. Foto: Rumi/Man

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyampaikan pencapaian Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mewujudkan parlemen modern dalam Sidang Asosiasi Sekretaris Jenderal Parlemen (*Association of Secretaries General of Parliaments-ASGP*) yang masih merupakan rangkaian acara Sidang IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali.

“Saya akan menyampaikan mengenai peran penting dari Sekretariat Jenderal DPR RI yang mengusung konsep parlemen modern,” kata Indra saat menjadi pembicara dalam sidang ASGP di Nusa Dua, Bali.

Menurut Indra, DPR RI senantiasa melakukan reformasi kelembagaan

dengan mengusung konsep parlemen modern, salah satunya dengan mendorong pemanfaatan energi hijau yang ramah bagi lingkungan.

Tahapan transisi energi membutuhkan dukungan serta *political will*, sejalan dengan itu sejak Desember 2021, Setjen DPR RI membangun panel surya untuk memenuhi kebutuhan

tambahan listrik gedung-gedung yang berada di kompleks parlemen.

“Pemasangan panel listrik ini menunjukkan komitmen DPR RI untuk membangun *green building*, meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan, dan menjadi pelopor upaya penurunan emisi gas rumah kaca,” tutur Indra.

Pembangunan panel surya ini merupakan hasil kerja sama dengan pihak swasta, yakni PT Agra Surya Energi. Indra menyebut pembangunan panel surya dan taman energi mengusung konsep *green building*. Lebih lanjut, Indra berharap pembangunan panel surya tersebut dapat menjadi pelopor pembangunan energi surya di tanah air.

Di sesi berbeda, Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Inosentius Samsul menyampaikan sudah saatnya pembangunan gedung parlemen dirancang dengan konsep *green building* dan berkelanjutan.

Dia mengatakan pembangunan gedung parlemen berbasis *green energy* diharapkan dapat direalisasikan di Ibu Kota Negara baru. “Menurut saya konsep green building ini bisa menjadi inspirasi juga bagi kita dalam merencanakan pembangunan gedung baru di Ibu Kota Negara nanti,” katanya.

Selain kebijakan ramah lingkungan, lanjut Indra, penguatan sistem pendukung sarana dan prasarana terus diperkuat agar pemenuhan hak rakyat untuk dapat mengakses dan mengetahui DPR RI lebih dekat. Hal itu diwujudkan melalui implementasi keterbukaan informasi publik. “DPR sudah mulai membuka akses seluas-luasnya dengan elemen masyarakat baik langsung maupun melalui teknologi, bahkan sebelum pandemi Covid-19,” ujarnya.

Indra menambahkan, kondisi pandemi Covid-19 telah mendorong untuk pemanfaatan potensi teknologi sepenuhnya dan melakukan langkah adaptasi. Layaknya parlemen lain, DPR RI mulai gencar memanfaatkan berbagai platform media untuk mengakomodir pelaksanaan rapat secara virtual. “Hak atas informasi menjadi sangat penting dalam upaya menjadikan proses keterbukaan penyelenggara negara kepada publik,” katanya.

Selain itu, Setjen DPR RI terus berinovasi dengan menghadirkan 100 layanan aplikasi untuk mendukung pelayanan kepada anggota parlemen.



Delegasi Forum ASGP menyaksikan pertunjukan Tari Kecak. Foto: Rumi/Man

Infrastruktur digital tersebut tidak hanya memudahkan anggota parlemen, tetapi juga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat serta mendorong budaya paperless yang ramah lingkungan.

Selanjutnya, Indra menekankan bahwa reformasi kelembagaan membutuhkan upaya yang serius dari Setjen DPR RI agar mampu mewujudkan cetak biru reformasi lembaga DPR RI. “Tentunya, upaya penguatan Setjen DPR RI melalui proses reformasi kelembagaan yang sedang dilakukan sangat membutuhkan dukungan semua pihak guna mewujudkan demokrasi modern di Indonesia,” imbuhnya.

PERKENALKAN PARIWISATA BALI

Sebelum menutup sidang ASGP, Indra Iskandar bersama peserta delegasi yang tergabung dalam Asosiasi Sekretaris Jenderal Parlemen (ASGP) memperlihatkan kekayaan alam dan budaya masyarakat Bali.

Di mulai dengan acara lunch yang penuh keakraban, dilanjutkan dengan minum teh bersama, rombongan delegasi berkunjung ke kawasan Pura Luhur Uluwatu, Kabupaten Badung.

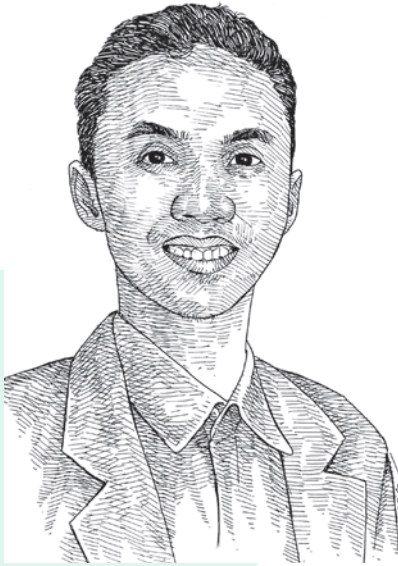
“Saya ingin mengatakan bahwa di Bali banyak sekali tempat yang indah. Tidak hanya di Uluwatu, maupun Nusa

Dua, namun banyak sekali tempat-tempat indah lainnya. Untuk itu, saya mengundang para delegasi bisa berkunjung kembali membawa sanak keluarga untuk menikmati destinasi wisata yang ada di negara Indonesia,” ujar Indra.

Pura Luhur Uluwatu merupakan salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi, karena menyuguhkan tarian khas Bali dengan pemandangan matahari tenggelam. Tari Kecak Uluwatu dimainkan 50 sampai 100 penari. Para penari laki-laki akan mengucapkan cak-cak-cak saat menari dengan menggunakan sarung hitam-putih.

Indra berharap, momen pertemuan internasional pertama yang diadakan di Bali sepanjang pandemi ini akan kembali mengangkat citra Bali sebagai destinasi wisata dunia dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat Bali.

“Saya kira dengan kunjungan kita hari ini, ada aspek positifnya bisa membuka cakrawala bagi turis-turis lain dalam hal ini Asosiasi Sekretaris Jenderal di seluruh dunia agar bisa mengunjungi tempat-tempat wisata di Indonesia, baik dengan keluarga ataupun dengan parlemen-parlemen sehingga destinasi wisata yang ada di Indonesia bisa dikenal di mata dunia,” pungkas Indra. ●ann/es



Oleh: dr. Ridho Pambudi
Dokter Umum di Klinik Mitra Bakti,
Srengseng

Tips Jaga Kesehatan Ditengah Lonjakan Varian Omicron

Pandemi covid-19 nampaknya belum bisa sepenuhnya hilang. Palsalnya saat ini, varian virus ini sudah semakin berkembang. Omicron menjadi varian yang baru-baru ini muncul. Gejala virus omicron diketahui lebih cepat perkembangannya dibandingkan varian lain. Bagaimana gejala dari virus ini? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Sebelum mengulas tentang gejala virus Omicron, tak ada salahnya jika kita terlebih dahulu mengenal varian baru corona ini.

Berdasarkan penjelasan di helo.sehat.com, WHO mengumumkan varian ini pada 26 November 2021. Organisasi kesehatan dunia ini menyatakan bahwa omicron mempunyai strain B.1.1.529 sebagai varian yang harus diwaspadai. Sebab varian ini memiliki karakter tersendiri yang berbahaya untuk tubuh.

Awalnya kita harus tahu dulu Omicron itu apa sih? Omicron itu adalah penamaan strain dari variasi mutasi genetik (dapat diketahui melalui pemeriksaan Whole Genome Sequencing) dari virus SARS Cov-2 atau lebih dikenal virus Covid19. Virus memang selalu bermutasi menyesuaikan lingkungannya, umumnya bersifat netral atau merugikan virus, namun dalam beberapa kasus kecil dapat menguntungkan virus.

Omicron sendiri bersama varian virus Covid19 lain seperti Alpha, Beta, Gamma, dan Delta masuk dalam Varian of Concern (VOC) yang ditentukan

oleh WHO. Mudahnya varian² VOC tsb adalah varian yang memiliki peningkatan penularan dan virulensi dibandingkan varian lainnya.

Omicron sendiri dikatakan memiliki penularan yang jauh lebih cepat beberapa kali lipat dibandingkan varian Delta. Masa inkubasi atau waktu dari terpapar virus Covid19 varian Omicron sampai muncul gejala adalah sekitar 3-5 hari. Gejala pada pasien yang menderita Covid19 varian Omicron yang paling sering antara lain: pilek, sakit kepala, kelelahan yang tidak jelas penyebabnya, nyeri tenggorokan, batuk serta demam/meriang.

Untuk tips menghadapi Omicron, pada dasarnya sama seperti menghadapi varian lain. Upaya menjaga kesehatan yang terbaik adalah pencegahan/preventif. Apa saja? Paling mudah adalah mengikuti arahan dan program pemerintah terkait pandemi Covid19.

Termasuk didalamnya 5M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, dan Membatasi Mobilisasi) + menyegerakan diri untuk mendapat Vaksinasi Covid19. Kedua upaya tersebut ibarat ujung mata

tombak, dalam persenjataan melawan Covid19, sehingga kedepannya kita bisa benar² bisa hidup berdampingan dengan virus Covid19 di New Normal ketika status nanti perlahan akan berganti dari Pandemi menjadi Endemi.

Selain itu penting juga memperhatikan asupan nutrisi harus bergizi seimbang, istirahat yang cukup, melakukan aktivitas fisik dan olahraga, serta hindari stres psikologis berlebihan. Dalam kondisi sehat, dalam



upaya mencegah, jika makanan sehari² sudah memenuhi gizi seimbang (karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral cukup), suplementasi vitamin tidak diperlukan.

Namun, jika kurang yakin silakan konsumsi multivitamin (B, C, E, Zinc, dsb) sesuai anjuran. Begitu pula suplementasi vitamin D, jika merasa

terpapar cukup sinar matahari, tidak perlu minum suplementasi vitamin D. Namun, jika aktivitas mayoritas di dalam ruangan, perlu dipertimbangkan suplementasi vitamin D tambahan.

Istirahat yang cukup adalah sekitar 7-8 jam tidur berkualitas untuk orang dewasa. Aktivitas fisik termasuk diantaranya berolahraga paling tidak

3x dalam seminggu dengan durasi 30 menit/kali olahraga. Lebih utama di ruang terbuka yang terpapar sinar matahari, namun tidak berkerumun dan tetap menjaga protokol kesehatan yang berlaku. Untuk stres psikologis, perlu dipahami hal-hal yang menimbulkan dan apa yang dapat membantu kita *me-release*-nya. ●



Nusa Penida Pulau Indah nan Eksotis

Pulau kecil yang berada di sebelah tenggara Pulau Bali dan terpisah oleh Selat Badung ini memiliki daya tarik yang besar di kalangan wisatawan. Selain pesona alamnya, berikut dibagikan pengalaman penulis ketika sedang berwisata ke Nusa Penida, Bali.

Nusa Penida berasal dari bahasa Bali, Nusa artinya pulau dan Penida (Ped-Ida) Ped berarti kematian serta Ida berarti kekuasaan. Maka Nusa Penida dapat berarti pulau yang memiliki kekuasaan besar yang mematikan. Pulau Nusa Penida adalah pulau terbesar dari ketiga pulau dan masyarakat lokal sering menyebut dengan nama Nusa Gede atau besar.

Kondisi alam pulau Nusa Gede terdiri dari daratan landai dan daratan perbukitan yang dikelilingi oleh lautan. Pulau ini memiliki daerah yang sangat kering, dan tanah di daerah ini memiliki kandungan kapur yang tinggi. Karena hal ini, sebagian besar masyarakat lokal, memilih mata pencaharian sebagai petani rumput laut, sebagai nelayan dan ada juga yang memilih sebagai pedagang.

Semenjak awal tahun 2014, pariwisata Nusa Penida berkembang sangat pesat sehingga menarik minat banyak wisatawan untuk berlibur. Perkembangan pariwisata yang sangat pesat ini, membuat banyak masyarakat lokal Nusa Penida berubah mata pencaharian. Ada yang berusaha di bidang akomodasi, transportasi, serta restoran.

Perkembangan sektor wisata di daerah ini masih sangat lambat, sebagian besar wisatawan yang berlibur di pulau Nusa Penida, bertujuan untuk foto serta melakukan aktivitas wisata Bali water sports seperti; snorkeling dan scuba diving.

Untuk saat ini, jika anda liburan ke Pulau Nusa Penida, anda tidak akan menemukan klub pantai seperti di kawasan tempat wisata Seminyak Bali. Namun pulau Nusa Penida tetap layak untuk anda kunjungi karena menawarkan keunikan alam. Di pulau Nusa Penida, anda akan menemukan banyak pemandangan alam dengan yang sangat unik jika anda gunakan sebagai latar belakang foto.

Daya tarik wisata Nusa Penida terletak pada tiga hal, yaitu; pantai pasir putih, pemandangan indah dari



Nusa Penida. Foto: Ria/Man

atas tebing tinggi dan keindahan pemandangan bawah laut. Pulau ini juga terkenal akan tempat wisata eksotis dan unik terutama tempat wisata pantai pasir putih seperti Pantai Atuh Nusa Penida dan *Broken Beach* Nusa Penida. Pemandangan pantai pasir putih di pulau Nusa Penida sangat indah.

Dulu objek wisata pantai pasir putih pada kawasan pulau Nusa Penida sangat jarang mendapat kunjungan wisatawan. Karena dulunya akses jalan ke pantai pasir putih di Nusa Penida belum memadai. Namun saat ini secara perlahan, infrastruktur jalan di Nusa Penida mulai berkebang pesat. Dengan adanya infrastruktur jalan ke objek wisata di Nusa Penida, membuat wisatawan tertarik liburan ke pulau Nusa Penida.

PEMANDANGAN INDAH DARI ATAS TEBING TINGGI

Sebagian besar daratan di Nusa Penida berada di atas tebing, serta pemandangan tebing di bagian selatan pulau Nusa Penida menghadap ke Samudra Hindia. Sehingga pemandangan laut dari atas tebing terlihat sangat indah terutama di sore hari. Lokasi populer untuk melihat pemandangan indah Samudra Hindia dari atas tebing seperti, Bukit Pantai Kelingking Nusa Penida, Banah Cliff, dan Saren Cliff.

Daya tarik utama Nusa Penida yang akan didapatkan oleh traveller ketika berkunjung ke pulau ini adalah pesona

pemandangan pasir putih yang indah dengan pemandangan dari atas tebing yang mengesankan serta pastinya pemandangan alam bawah laut dengan terumbu karang yang juga sangat mengesankan.

KEINDAHAN PEMANDANGAN BAWAH LAUT

Daya tarik wisata Nusa Gede terletak pada aktivitas wisata bahari yang lebih familiar dengan nama Bali Watersport. Aktivitas wisata bahari Nusa Penida yang paling populer adalah aktivitas menyelam (scuba diving) dan aktivitas snorkeling.

Pulau Nusa Gede karena dikelilingi lautan lepas, membuat pulau ini memiliki area aktivitas wisata menyelam yang sangat luas. Selain itu biota laut masih alami dan terjaga, seperti terumbu karang dan ikan langka Mola – Mola.

Suasana pantai dengan air jernih dan pantai berpasir lembut menjadi tempat yang dibutuhkan untuk menyegarkan diri. Bahkan, dilansir dari laman Euronews, Sabtu (01/01/2021), berikut adalah 9 pantai terindah di dunia, dua di antaranya ada di Indonesia. Pantai terindah di dunia dinobatkan kepada Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. Pantai ini hanya memiliki panjang 80 meter. Pantai ini menjadi lokasi foto yang populer dengan latar tebing berbentuk *Tyrannosaurus Rex* dan lautan biru cerah yang menakjubkan serta tanaman hijau tropis. ● rnm/es

RUSLAN M DAUD:

Trail Adventure, Gotong Royong Tanpa Syarat

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menikmati keindahan alam. Salah satunya adalah olahraga trail adventure. Selain adrenalin menjadi terpacu, keindahan alam pun tersibak kala para rider sudah menggeber motonya memasuki kawasan hutan.

Adalah Ruslan M. Daud, salah satu politisi yang duduk di Senayan, memilih *trail adventure* sebagai salah satu aktivitas di sela-sela kesibukannya. Bahkan, Bupati Bireun periode 2012-2017 ini beberapa kali menginisiasi *event* yang melibatkan para rider Bireuen, Aceh dan sekitarnya.

Terbaru, pada tanggal 5-6 Maret 2022 lalu, Ruslan bersama para rider melakukan penjelajahan Gunung Goh Bireuen yang dibalut dalam *event* menggelar *event* HRD Trail Adventure 2 Day GOH Expedition. Tak kurang dari 500 rider berpartisipasi dalam *event offroad* tersebut.

Bagi Ruslan, HRD Trail Adventure 2 Day GOH Expedition bukanlah ajang perlombaan untuk menang dan gagah-gagahan. Namun lebih mengarah kepada terjalinnya silaturahmi, kekompakan, kerja

sama serta menikmati keindahan alam yang belum banyak terungkap.

“*Event* trail bukan perlombaan, mereka semua hanya berkumpul dalam kekeluargaan, menaklukkan medan bersama-sama dan menjalin silaturahmi sesama penghobi motor trail,” ujar Ruslan kepada **Parlementaria** baru-baru ini.

Gotong royong tanpa syarat, itulah yang digambarkan Ruslan ketika para rider menaklukkan halang rintang. “Kalau sudah dalam balutan lumpur (di jalur), itu ga ada lagi yang namanya polisi, pejabat, Anggota DPR, masyarakat sipil. Semuanya sama, semua saling membantu,” tuturnya.

Kepada para penyelenggara, wakil rakyat yang ditugaskan di Komisi V DPR RI ini mengimbau agar olahraga ini benar-benar dijadikan sarana untuk

Anggota DPR RI Ruslan M. Daud.
Foto: Doc/Prima

mempromosikan keindahan alam yang belum tersingkap. Penyelenggara juga harus jeli memilih jalur-jalur dan destinasi wisata yang dilalui jalur tersebut.

“Saat *event* peserta datang dari komunitas-komunitas dan klub-klub motor trail dari mana-mana. Inilah kesempatan kita memperkenalkan potensi jalur lokal. Di balik kepayahan dan lelahnya menaklukkan medan jalur tabas, ada keindahan alam yang belum banyak terjamah. Di situlah tersimpan kenikmatan dan kepuasan bagi para rider,” terangnya. ● rnm/es



Kenalkan Bali pada Presiden IPU

Forum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali berjalan dengan sukses. Pertemuan para anggota parlemen dunia itu terselenggara berkat kerja sama parlemen Indonesia.

Kendati sidang IPU usai, momen keakraban antar anggota parlemen dunia terus berlanjut. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma mengajak Presiden IPU Duarte Pacheco dan putranya Guilherme mengunjungi sejumlah tempat wisata yang ada di Ubud, Gianyar, Bali.

Pacheco bersama putranya mendatangi Pasar Ubud, sebagai destinasi pertama. Pacheco memborong sejumlah baju, kain, ukiran bali hingga asesoris gelang maupun tas hasil kerajinan pelaku UMKM.

Pacheco tampak senang dan menyampaikan terima kasih menggunakan bahasa daerah Bali yaitu matur suksma oleh pedagang setempat.

Politikus Demokrat itu mengajak Pacheco ke lokasi wisata *Sacred Monkey Forest Sanctuary*. Di sana, Pacheco mengaku takjub melihat keindahan alam yang menjadi tempat pariwisata dipenuhi hewan monyet.

Ia berharap, kedatangan Presiden IPU, Duarte Pacheco ke Ubud Bali menunjukkan bahwa wilayah tersebut sudah siap kembali menjadi destinasi utama pariwisata dunia.

“Sebagai tuan rumah, hari ini saya bersama sahabat saya Presiden IPU, Duarte Pacheco berkunjung ke Ubud, Bali. Saya ingin memperlihatkan kepada beliau filosofi bali yaitu Tri Hita Karana.

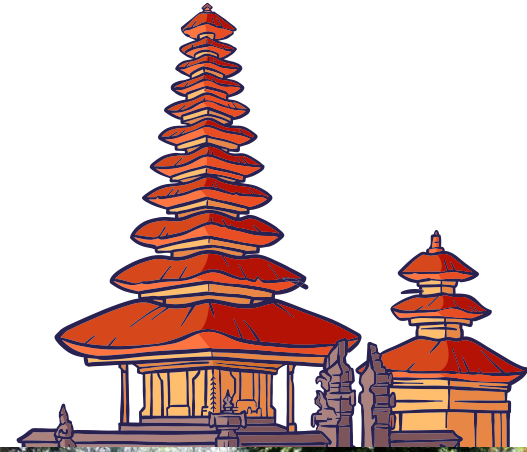


Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana memperkenalkan wisata dan budaya Bali kepada Presiden IPU Duarte Pacheco. Foto: Tiara/Man

Melihat secara langsung UMKM dan pariwisata yang mulai menggeliat kembali,” kata Putu, yang merupakan anggota DPR asal Bali.

Filosofi Tri Hita Karana merupakan konsep hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Sang Pencipta. Menurutnya, kearifan lokal ini sangat relevan dalam menjawab tantangan global, seperti *climate change* atau perubahan iklim.

Selanjutnya, Pacheco diajak mengunjungi Museum Rudana untuk melihat berbagai macam koleksi karya-karya lukisan sang maestro. Begitu tiba di Museum Rudana, Presiden IPU disambut dengan gamelan tari Bali.



Putu berharap Pacheco sebagai Presiden IPU, yang memiliki anggota 178 negara dari seluruh dunia, bisa menyampaikan pesan atau mempromosikan Indonesia dan juga Bali ke berbagai negara anggota IPU. Sebab, intensitas Pacheco berkeliling dunia memimpin berbagai sidang cukup tinggi.

“Beliau diharapkan sebagai Presiden IPU sering berkeliling dunia memimpin sidang-sidang 178 negara itu untuk menyuarakan tentang Indonesia dan juga Bali, baik untuk menggaungkan seni budaya, permuseuman, dan pariwisata. Oleh karena itu, saya meminta beliau sebagai duta promisi Bali, Indonesia,” pungkasnya. ● ann/es



SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

MENGUCAPKAN :
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH

PUASA RAMADAN 1443 H

